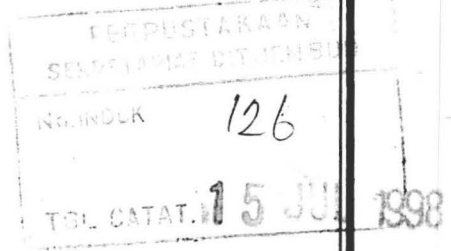


SEJARAH KOTAMADYA BANDA ACEH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL BANDA ACEH
1996/1997

SEJARAH KOTAMADYA BANDA ACEH



disusun oleh :

Rusdi Sufi
Irina Dewi Wanti
Seno
Djuniat



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL BANDA ACEH
1996 / 1997

1954年10月1日

1954年10月1日

1954年10月1日

1954年

SEJARAH KOTAMADYA BANDA ACEH

Tim Penulis

Ketua : Rusdi Sufi
Anggota : Iriani Dewi Wanti
Seno
Djuniat

Penyunting : Iriani Dewi Wanti

*Gambar Sampul : Pendopo Gubernur Propinsi Daerah Istimewa
Aceh*

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

ISBN 979/95312/1/7

**Penerbit : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh, 1997**

PERPUSTAKAAN KEBUDAYAAN DITJEN KEBUDAYAAN	
TGL. TERIMA	19-01-00
TGL. CATAT	19-01-00
NO. INDEK	1165/00
NO. CLASS	959.81 SUF.
KOPILKI:	1

S A M B U T A N
DIREKTUR DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI
TRADISIONAL
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Indonesia terdiri dari banyak pulau yang dihuni oleh berbagai etnis dan sub etnis. Setiap etnis memiliki ciri khas baik dari segi adat, kebudayaan, dan latar belakang sejarah yang berbeda-beda, namun mempunyai satu visi yang bersamaan yaitu kemerdekaan dan perdamaian abadi. Keaneka ragaman ini merupakan kekayaan yang perlu mendapat perhatian khusus, karena dari sanalah akar tradisi dapat digali untuk tetap menumbuhkan kembangkan pola tingkah laku beradab dan berbagai kebijaksanaan yang berhubungan dengan moral dan etika berbangsa.

Bertitik tolak dari kondisi ini, penerbitan buku "SEJARAH KOTAMADYA BANDA ACEH" karya tim penulis dari Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh perlu mendapat sambutan yang hangat. Penerbitan buku ini merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk dapat mengenal dan mengetahui sejarah pertumbuhan dan perjuangan bangsa Indonesia sekaligus menunjukkan kepada generasi mendatang bahwa bangsa Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk tetap eksis dalam memajukan bangsa dan negaranya.

Pada akhirnya diharapkan juga dapat menghilangkan sikap etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat yang majemuk serta memperkuat ketahanan dan kesatuan bangsa.

Terbitnya buku ini tentu saja didukung oleh berbagai pihak, antara lain kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, dan

lain-lain. Karya ini tentunya masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Karena "tidak ada gading yang tak retak". Kepada para penulis saya ucapkan terima kasih dan terus berkarya.

Akhir kata semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.



September 1997

Anhar Gongong
130 321 407

**SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Salah satu cara melestarikan nilai-nilai luhur bangsa adalah melalui penelitian dan pendokumentasian serta menyebarluaskan / publikasi. Karenanya, saya dengan senang hati menyambut baik terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, dalam rangka menginformasikannya kepada masyarakat tentang masalah kesejarahan dan nilai-nilai tradisional.

Tentunya hasil penelitian yang disajikan dalam buku ini masih merupakan upaya awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Namun saya mengharapkan buku ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan guna memperluas cakrawala pembaca serta dapat dijadikan rujukan untuk bahan penelitian lebih lanjut.

Dengan hadirnya buku semacam ini masyarakat Indonesia yang majemuk dapat saling memahami sejarah dan kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memahami dan mengerti tentang berbagai budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian dan penyelesaian penerbitan buku ini.

Banda Aceh, September 1997



Drs. H. Ng. Daeng Malewa

NIP. 130 186 666

KATA PENGANTAR

Kota sebagai pusat pemukiman di mana terjadi berbagai kegiatan yang berupa pelayanan, kemudahan, perdagangan, pemerintahan, hiburan, proses produksi dan sebagainya. Perkembangan kota itu sendiri sebagai akibat urbanisasi menjadi tema sejarah sosial. Sejarah pertumbuhan kota-kota di Indonesia telah banyak ditulis oleh ahli sejarah dan sosiologi, mengingat kota dengan kehidupannya yang kompleks sangat menarik untuk dibahas.

Banda Aceh sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh dapat dipastikan telah lahir dan berkembang beriringan dengan muncul dan berkembangnya masyarakat Aceh di dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam lintasan sejarahnya, Banda Aceh pernah menjadi kota maritim, perdagangan, tamaddun bahkan kota metropolitan pada masanya. Di balik kegemilangan yang pernah dialaminya kota ini juga mengalami kemunduran demi kemunduran yang diakibatkan oleh imperialisme / kolonialisme dan pemberontakan-pemberontakan di daerah yang mengancam stabilitas nasional. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya cepat dapat berlangsung menjadi terkendala.

Tindakan arif yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat menciptakan suasana damai, sebagai konsekuensinya pembangunan di Kota Banda Aceh akhirnya dapat berlangsung sebagaimana layaknya kota-kota lain di Indonesia. Pembangunan berlangsung berkesinambungan dan terencana.

Buku ini mengungkapkan tentang pertumbuhan dan perkembangan Kotamadya Banda Aceh beserta dinamika kehidupan kota yang didukung oleh masyarakat dan pemerintah pusat, Pemda Tk. I dan terutama Pemda Tk. II Kotamadya Banda Aceh.

Diharapkan uraian dalam buku ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penulisan sejarah yang akan datang. Selain itu, memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan kota Banda Aceh yang memiliki sejarah cukup panjang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, sehingga

penulisan dapat terwujud, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga hasil karya ini dapat memberikan inspirasi dan semangat kepada semua pihak dalam membangun negara Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang kita cita-citakan.

Banda Aceh, April 1997

Kepala Balai Kajian Sejarah dan
Nilai Tradisional Banda Aceh

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rusdi Sufi', written over a horizontal line.

Drs. Rusdi Sufi

Nip. 130 672 191

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	v
Sambutan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	3
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Tujuan dan Manfaat	5
1.5. Metode Penelitian	5
1.6. Sistematika Penulisan	6
Bab II Gambaran Umum Kotamadya Banda Aceh	8
2.1. Geografi dan Topografi	8
2.1.1. Demografi	9
2.1.2. Mata Pencarian	16
2.1.3. Mobilitas Sosial	21
2.2. Pendidikan	25
2.3. Sarana Komunikasi dan Transportasi	34
2.3.1. Pers	35
2.3.2. Radio	36
2.3.3. Televisi	39
2.3.4. Telepon	39
2.3.5. Transportasi	40
Bab III Sejarah Singkat Kotamadya Banda Aceh	44
3.1. Masa Kesultanan	44
3.2. Masa kolonial Belanda	52
3.3. Masa Pendudukan Jepang	58
3.4. Masa Perjuangan Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan	66

3.5. Pasca Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan	71
Bab IV Perkembangan Kotamadya Banda Aceh	77
4.1. Pemekaran Kota	77
4.2. Kehidupan Sosial Politik	79
4.3. Kehidupan Ekonomi	83
4.4. Kehidupan Sosial Budaya	87
4.5. Kehidupan Beragama	89
4.6. Pariwisata	92
Bab V Kesimpulan	97
Daftar Pustaka	99
Gambar Peta Kotamadya Banda Aceh	102

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I : Pertambahan Jumlah Penduduk Kotamadya Banda Aceh Dari Tahun 1957 - 1995	11
Tabel II : Penduduk Kotamadya Banda Aceh Dewasa / Anak-Anak Menurut Kecamatan dan jenis Kelamin	12
Tabel III : Penduduk Kotamadya Banda Aceh Warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 1995	13
Tabel IV : Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama	14
Tabel V : Banyaknya Pencari Kerja Dirinci Menurut Pendidikan Dalam Kotamadya Banda Aceh Tahun 1994	24
Tabel VI : Nama Sekolah-Sekolah Gubernemen Pada Masa Pemerintahan Belanda di Kutaraja	29
Tabel VII : Sekolah Dasar/Kelas / Gedung / Murid Tahun 1975 di Banda Aceh	32
Tabel VIII: Jumlah Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Atas Tahun 1975 di Kota Banda Aceh ..	33
Tabel IX : Banyaknya Sekolah Guru dan Murid Dirinci Menurut Jenis Sekolah dan Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh Tahun 1994	34
Tabel X : Siaran Radio Non Pemerintah di Kotamadya Banda Aceh	38
Tabel XI : Banyaknya Kantor Pos dan Giro Dirinci Perkecamatan Dalam Kotamadya Banda Aceh Tahun 1994	40
Tabel XII : Panjang Jalan Dirinci Menurut Jenis Permukaan di Kotamadya Banda Aceh Tahun 1994	41
Tabel XIII: Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Dalam Kotamadya Banda Aceh 1994	42
Tabel XIV: Banyaknya Kendaraan Bermotor Tahun 1994	43
Tabel XV : Luas Kotamadya Banda Aceh dirinci Per Kecamatan Tahun 1994	77
Tabel XVI: Banyaknya Tempat Peribadatan Di Kotamadya Banda Aceh Tahun 1994	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah masa lalu telah membuktikan bahwa di masa jayanya kerajaan Aceh pada abad ke 17, Banda Aceh yang pada waktu itu digelar Bandar Aceh Darussalam tersohor sebagai kota dagang, pusat agama Islam, ilmu pengetahuan di Asia Tenggara. Bahkan jauh sebelumnya pada abad ke 15 Banda Aceh telah muncul sebagai pusat kekuatan dan perlawanan yang tangguh.

Banda Aceh didirikan oleh Sultan Alaidin Johan Syah pada hari Jumat tanggal 1 Ramadhan 601 H (bertepatan dengan tanggal 22 April 1205).¹⁾ Sultan Alaidin Johan Syah sebagai seorang utama (sarjana) yang telah dididik dan dilatih dalam lembaga pendidikan Islam dayah Cot Kala Peureulak pada tanggal tersebut mengeluarkan dekrit tentang pembangunan ibukota negara yang baru untuk menggantikan Lamuri. (ibukota negara Kerajaan Hindu Indera Purba). Berdasarkan hasil penyelidikan tim ahli, lokasi untuk kota baru tersebut adalah dekat sungai Kuala Naga (Krueng Aceh) antara Gampong Pande dan Balang Peureulak, dan kota tersebut mulanya dinamakan Banda Darussalam.²⁾

Selama pemerintahan Sultan Alaidin Johan Syah, ibukota negara masih tetap di Lamuri, sekalipun kota Banda Darussalam telah dinyatakan dengan resmi berdiri, namun Banda Darussalam baru dengan resmi dipindahkan pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Mahmud Syah I (1267 - 1309 M) yaitu cucu dari Sultan Alaidin Johan Syah.³⁾

¹⁾ "Kesimpulan-Kesimpulan Seminar Hari Jadi Kota Banda Aceh", *Kota Banda Aceh Hampir 1000 Tahun*, (Banda Aceh : Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh, 1988), hal. 20

²⁾ A. Hasjmy, *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan*, (makalah seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara. 1980), hal. 2

³⁾ *Ibid.*

Setelah pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Husain Syah (1465 - 1480 M) ia berhasil menggabungkan kerajaan Darussalam, kerajaan Islam Pidie dan kerajaan Islam Jaya menjadi satu federasi dengan nama kerajaan Aceh, kota Banda Darussalam diubah namanya menjadi kota Banda Aceh. ⁴⁾

Banda Aceh terus berkembang, bahkan pada waktu jayanya kerajaan Aceh pada abad ke 16 dan ke 17, Banda Aceh menjadi tersohor, sekaligus sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, kebudayaan dan pusat pendidikan agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan ini juga dikenal sebagai lima besar dunia dalam bidang agama Islam yang setaraf dengan Bagdad, Damaskus, Agra, Isfahan dan Aceh Darussalam.

Sebagai pusat perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di kawasan Asia Tenggara, kerajaan ini terus dihadapkan kepada ancaman yang datang dari bangsa Barat. Pertama-tama yaitu bangsa Portugis yang ingin menguasai Aceh dapat diusir, bahkan dari Malaka yang telah ditaklukkannya pada tahun 1511.

Sejak tahun 1873, kerajaan Aceh kembali menghadapi serangan dari kolonialisme Belanda. Pada saat Jenderal Van Swieten melakukan agresor merebut Keraton Darus Dunia (Dalam) tanggal 24 Januari 1874 ibukota negara (Banda Aceh) dirubah namanya menjadi Kutaradja. ⁵⁾ Perubahan yang dilakukan oleh Van Swieten menjadi Kutaradja bertujuan politis, ingin menunjukkan kepada Gubernur Jenderal di Batavia dan kepada raja Belanda di Amsterdam seolah-olah ia telah berhasil menguasai istana raja dan menguasai kerajaan.

Rakyat Aceh memberikan perlawanan yang cukup sengit terhadap kolonialisme Belanda, meskipun kemudian Belanda berhasil menduduki Dalam kerajaan Aceh tetapi rakyat Aceh tidak pernah berhenti untuk berjuang hingga Belanda angkat kaki dari tanah Aceh pada tahun 1942.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Banda Aceh tidak semata-mata

⁴⁾ *Ibid.*, hal. 3

⁵⁾ *Ibid.*, hal. 4

menjadi ibukota daerah Aceh tetapi juga pernah menjadi Ibukota Propinsi Sumatera Utara dan bahkan ditetapkan pemerintah pusat sebagai tempat kedudukan resmi Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia mulai tanggal 4 Agustus 1949.

Banda Aceh pernah dijadikan tempat pusat pengatur perlawanan terhadap pasukan penjajah yang datang kembali ke Indonesia, terutama dengan daerah Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Pada waktu pemerintahan pusat RI yang berkedudukan di Yogyakarta dikuasai musuh, sekali lagi Banda Aceh berperan besar dalam membantu pemerintah pusat. Dari kota inilah semua kebijaksanaan dirumuskan dan untuk dijalankan. Peran lain yang menonjol pada masa revolusi kemerdekaan (1945 - 1949) Banda Aceh tampil sebagai daerah modal.

Dalam lintasan sejarah Banda Aceh memiliki kronologis sejarah yang cukup panjang, bahkan setelah kemerdekaan Banda Aceh masih memiliki berbagai dilema, diantaranya terjadi beberapa kali pergantian status, sebagai ibukota keresidenan, menjadi Ibukota Propinsi Daerah Aceh, kemudian kembali menjadi Ibukota Keresidenan Aceh yaitu dengan menggabungkan daerah ini ke dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan demikian kota Banda Aceh sekaligus merangkap dua fungsi, baik sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh maupun sebagai ibukota Daerah tingkat II Kotamadya Banda Aceh.

Stabilitas pemerintahan dan politis dalam suatu kawasan dapat mendukung pembangunan yang akan dilaksanakan, maka pada masa Orde Baru pembangunan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh juga dilaksanakan. Banda Aceh akan tetap mempertahankan identitasnya sebagai *Serambi Mekah* dan denyut kehidupan yang dapat dirasakan di daerah ini adalah Agama, budaya dan pendidikan.

1.2. Permasalahan

Dilihat dari segi kehidupan kota Banda Aceh yang memiliki empat kegiatan utama yaitu sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, ilmu pengetahuan dan kebudayaan kegiatan tersebut yang mempercepat tumbuh dan berkembangnya kota Banda Aceh dari zaman Kerajaan Aceh Darussalam hingga masa pemerintahan Republik Indonesia.

Sebagai kota paling barat Indonesia keberadaan Banda Aceh patut diperhitungkan bagi peneliti sejarah bangsa Indonesia. Propinsi Daerah Istimewa Aceh memiliki bukti nyata bagi penulisan ini. Aceh memiliki beribu-ribu naskah yang ditulis oleh pujangga dan cendikiawannya terdahulu. Naskah-naskah tersebut berisikan nilai-nilai agama dan budaya yang telah dikembangkan sejak zaman dahulu, dan pada saat ini masih tetap diayomi oleh masyarakatnya.

Sumber-sumber sejarah tentang kegemilangan Aceh juga telah dituliskan oleh orang Asing, sejak Tome Pires berkunjung ke Sumatera di abad ke 16 hingga penulis-penulis zaman kolonial, kesemuanya dapat memberikan suatu jejak sejarah bagi sejarawan kita pada saat sekarang ini untuk dapat dijadikan bukti tentang suatu kebudayaan yang pernah ada di Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya Banda Aceh yang ada di dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh itu sendiri masih memiliki berbagai dilema, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Semuanya ini dapat diatasi berkat pemimpin-pemimpin di daerah ini bersama rakyat untuk mengentaskan berbagai permasalahan dengan tetap berperang pada agama, adat (budaya) dan meningkatkan mutu pendidikan, untuk menuju masyarakat yang adil makmur materiel dan spiritual.

Untuk itu perlu adanya penulisan sejarah lokal yang bertujuan untuk melihat lebih jauh proses pertumbuhan dan perkembangan kehidupan kota Banda Aceh yang didukung oleh sumber-sumber yang cukup banyak di dapatkan di daerah ini.

1.3. Ruang Lingkup

Sejarah bersifat multidimensional yang meliputi berbagai aspek yang kompleks dalam kehidupan, karena itu penulisan sejarah kota Banda Aceh ini memiliki ruang lingkup beberapa masalah yaitu, tentang pertumbuhan dan perkembangannya mulai dari pemerintahan, sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, agama, pariwisata dan lain-lain. Dengan demikian dapat melihat lebih jauh perkembangan kehidupan kota Banda Aceh dari zaman ke zaman.

Scope temporal dalam penulisan ini dimulai sejak adanya kota Banda Aceh pada abad ke 13 yang dibangun oleh Sultan Alaidin Johan Syah. Kronologis penulisan yang cukup panjang dibagi menjadi dua pembagian temporal yaitu sejarah singkat kota Banda Aceh yang menguraikan kota Banda Aceh pada masa pemerintahan Kesultanan sampai berakhirnya perang kemerdekaan. Kedua : Perkembangan kehidupan kota Banda Aceh yang dititik beratkan pada zaman pembangunan dimulai dari pelita I sampai akhir pelita V.

Scope spasial penelitian ini adalah kota Banda Aceh yang meliputi empat kecamatan yang ada di dalamnya.

1.4. Tujuan dan Manfaat

Penulisan sejarah kota Banda Aceh tentunya mempunyai tujuan dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, pemerhati sejarah dan masyarakat yang berminat terhadap buku-buku sejarah. Tujuan penulisan ini antara lain :

1. Penulis akan menyajikan data kesejarahan secara faktual mengenai pertumbuhan penduduk, sarana dan prasarana kota Banda Aceh, tingkat pendidikan, penghasilan dan lain-lain yang mendukung perkembangan kota ini.
2. Untuk merekam dan mendokumentasikan peristiwa-peristiwa sejarah di daerah atau sejarah lokal itu dalam hubungannya dengan sejarah nasional.

Diharapkan dari tujuan ini juga memberikan manfaat sebagai bahan informasi sejarah pada generasi sekarang dan yang akan datang.

1.5. Metode Penelitian

Suatu penulisan sejarah yang paling utama adalah harus didukung oleh fakta-fakta yang ada. Pengamatan saja tidak cukup tanpa adanya bukti-bukti sejarah. Seorang sejarawan harus mampu mengindahkan langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan penulisan sejarah, yaitu tahap pengumpulan sumber, *verifikasi* (kritik sejarah), interpretasi (analisa) dan penulisan.

Sebelumnya penulis telah mengumpulkan sumber-sumber bacaan

dari berbagai buku baik dari penulis lokal maupun sumber-sumber asing. Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, Perpustakaan Wilayah di Banda Aceh dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Selain itu penulis juga mengumpulkan data melalui Kantor Pusat Statistik baik Propinsi maupun Kotamadya untuk melengkapi data.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif kuantitatif, kualitatif digunakan dalam memperoleh data, kuantitatif untuk melihat hasil yang dicapai.

Sejarah perkembangan kota tentu saja memiliki permasalahan yang kompleks, untuk itu perlu adanya suatu pendekatan yang multidimensional, untuk itulah nantinya di dalam penulisan ini tidak terlepas dari ilmu bantu sejarah, diantaranya sosiologi dan antropologi.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan Sejarah Kota Banda Aceh ini dibagi dalam lima bab yaitu :

Bab I Pendahuluan : terdiri dari latar belakang permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kota Banda Aceh : dalam bab ini akan menguraikan keadaan kota Banda Aceh secara umum, dilihat dari letaknya berupa topografi dan jumlah penduduk (demografi), mata pencaharian dan mobilitas penduduk serta keadaan sarana komunikasi dan transportasi.

Bab III Sejarah Singkat Kota Banda Aceh : isi bab ini menguraikan sejarah kota Banda Aceh mulai dari terbentuknya kota Banda Aceh oleh Sultan Alaidin Johan Syah dan kesultanan-kesultanan yang memerintah di Kerajaan Aceh Darussalam, zaman imperialisme dan kolonialisme di Aceh masa Portugis dan Belanda, zaman pendudukan Jepang, masa perjuangan kemerdekaan hingga perjuangan pasca kemerdekaan. Kesemuanya diuraikan dalam tiap-tiap sub bab.

Bab IV Perkembangan Kehidupan Kota Banda Aceh : dalam bab ini

diuraikan kehidupan kota Banda Aceh dalam perkembangannya yang dititik beratkan pada masa pembangunan Orde Baru dalam bidang sosial politik, sosial ekonomi, kehidupan sosial budaya, agama dan kepariwisataan yang dapat menunjang pembangunan di kota Banda Aceh.

Bab V Adalah bab kesimpulan, yang merupakan bagian akhir dari penulisan dan sekaligus akan menyimpulkan semua tulisan yang ada dari tiap-tiap bab dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam bab I.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTAMADYA BANDA ACEH

2.1. Geografi dan Topografi

Kota Banda Aceh adalah ibukota propinsi Daerah Istimewa Aceh dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan administrasi. Dalam peta terlihat bahwa Banda Aceh terletak di ujung bagian yang paling barat dan yang paling ke utara dari negara Republik Indonesia. Dalam *Journal of the straits Branch of Royal Asiatic Society* (JSBRAS) 1874 disebutkan bahwa Bandar Aceh Darussalam terletak antara $95^{\circ} 13'$ dan $98^{\circ} 17'$ bujur timur dan antara $2^{\circ} 48'$ dan $5^{\circ} 40'$ lintang utara. ¹⁾

Keadaan iklim Kotamadya Banda Aceh adalah basah, atau antara 33,3% - 60% (tipe c dan d). Curah hujan rata-rata 2.000-3.000 mm / tahun musim kemarau antara bulan Maret sampai bulan Agustus dan musim hujan dalam bulan September sampai dengan Februari, selain itu Kotamadya Banda Aceh mengalami dua musim yaitu musim barat dan musim timur. Pada musim barat bertiup angin dari arah barat ke arah timur mulai bulan April sampai bulan September, sebaliknya pada musim timur angin berhembus dari arah timur ke arah barat pada bulan Oktober sampai Desember.

Keadaan geologi Kotamadya Banda Aceh hampir seluruhnya terdiri dari susunan tanah aluvial muda dan terumbu koral, yang berarti keadaannya tanahnya kurang baik, sebab banyak mengandung pasir dan batu kerikil, selain itu juga terdiri dari tanah aluvial dan campuran podsolik merah kuning. Di tengah kota mengalir sungai Kreung Aceh yang hulunya berasal dari gunung Seulawah lebih kurang 70 km dari Kotamadya Banda Aceh dan bermuara di Kuala Aceh lebih kurang 5 km dari pusat kota.

¹⁾Rusdi Sufi, *Beberapa Catatan tentang Banda Aceh Pada Masa Pendudukan Belanda* dalam Bulletin CAKRA HIMAS No. 5 (Banda Aceh : Himpunan Mahasiswa Sejarah, FKIP Unsyiah, 1993), hal. 1

Kotamadya Banda Aceh yang berada di kanan dan kiri Krueng Aceh dihubungkan oleh 3 buah jembatan yaitu jembatan Peunayong, jembatan Pante Perak dan jembatan Surabaya. Selain Krueng Aceh juga terdapat beberapa sungai kecil diantaranya Krueng Daroy dan Krueng Dhoi.

Kondisi kota Banda Aceh yang sangat rendah, menyebabkan perbedaan permukaan laut dengan kawasan pemukiman kecil sekali bahkan pada saat air laut pasang permukaan darat sebagian ada yang sama dan ada juga yang lebih rendah dari permukaan laut. Hal demikian menyebabkan kawasan utara yang sebagian besar sangat rendah mengalami infiltrasi air laut sehingga airnya asin dan juga sering banjir. Akibat lainnya ialah aliran air buangan dari daerah pemukiman penduduk pada tempat-tempat tertentu menjadi lamban dan terhalang.

Gorong-gorong yang tergenang terdapat di hampir seluruh kawasan kota yang rendah permukaannya. Keadaan ini tidak hanya membuat wajah kota Banda Aceh pada tempat-tempat tertentu kotor dan berbau, tetapi juga merupakan sarang nyamuk dan penyakit. Rendahnya kawasan kota ini menyebabkan dimusim hujan pada tempat-tempat tertentu sering banjir.

2.1.1. Demografi

Penduduk Kotamadya Banda Aceh dari tahun ke tahun selalu bertambah. Sebelum kedatangan bangsa Belanda, kota yang dulunya bernama Bandar Darussalam penduduknya sebagian besar adalah orang Aceh ditambah dengan pemukiman-pemukiman orang Jawa, Keling, Kedah, Cina, Arab, Turki, Melayu, Minangkabau dan lain-lain. Kota ini pada zaman Kesultanan sudah sangat ramai dikunjungi para nelayan lebih-lebih pada masa kebesaran Kerajaan Aceh Darussalam yang diperintah oleh Sultan Iskandar Muda dan pengganti-penggantinya sampai ratusan tahun lamanya. Setelah kota Banda Aceh dikuasai oleh kolonialisme Belanda, kota ini menjadi Ibukota Gubernemen Belanda di Aceh dan pada tahun 1874 oleh pemerintah kolonial Belanda dan diganti namanya menjadi Kutaraja.

Pada zaman Belanda komposisi penduduk berubah, sebagian besar

orang-orang Aceh dan para pedagang muslim menyingkir keluar kota karena mereka memusuhi Belanda yang dianggapnya kafir. Kutaraja banyak dihuni oleh pemukim-pemukim Belanda baik militer maupun sipil, para *ambtenaar* dan imigran dari berbagai suku bangsa yang pro Belanda.

Penduduk Kutaraja pada zaman Belanda, komposisinya dapat disebutkan di antaranya yaitu orang Aceh ada 746 jiwa.²⁾ Orang Minangkabau 482 jiwa dan orang Jawa lebih banyak jumlahnya diperkirakan ada 1937 jiwa. Orang Cina mencapai 10.726 jiwa (volstelling, 1930 : 24 - 27)³⁾

Pada zaman Jepang komposisi penduduk berubah lagi orang-orang Belanda dan para *ambtenaar* sudah tidak ada lagi. Orang-orang Aceh yang tadinya menyingkir keluar kota mulai mengadakan pemukiman baru di Kutaraja. Kemudian pada zaman kemerdekaan orang-orang Jepang mulai angkat kaki dari Kutaraja.

Jumlah orang-orang Aceh di Kutaraja sangat sedikit pada masa sebelum kemerdekaan, tetapi terjadi sebaliknya setelah kemerdekaan, jumlah orang Aceh meningkat, karena kesadaran dan kebanggaan mereka tinggal di ibukota propinsi. Pada masa pemerintahan Belanda mereka enggan untuk tinggal bersama kafir. Kemungkinan lain karena pemekaran daerah Aceh Besar dijadikan bagian dari Kotamadya Banda Aceh yang umumnya terdiri dari penduduk asli Aceh.

Penduduk Kotamadya Banda Aceh terdiri dari kelompok etnis Aceh yaitu : kelompok etnis Gayo, Alas, Aneuk Jame, Tamiang, Kluet, Jawa, Sunda, Minangkabau, Melayu, Batak, Cina dan sebagainya.⁴⁾ Sensus penduduk berdasarkan suku bangsa terakhir dilakukan pada tahun 1930, setelah itu hingga saat ini tidak pernah dilakukan lagi.

²⁾ Rusdi Sufi, *Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud Proses Adaptasi Sosial Kehidupan di Perkampungan Miskin Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh : Depdikbud, 1993), hal. 6

³⁾ T. Syamsuddin, *Pemetaan Suku Bangsa Melalui Aspek Budaya di Kotamadya Banda Aceh*, (Banda Aceh : Depdikbud, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Badan Aceh, 1995/1996), hal. 7

⁴⁾ Rusdi Sufi, *op. cit.*, hal. 8

Sejak Kutaraja menjadi Kotamadya Banda Aceh pada tahun 1957, penduduknya dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I
Pertambahan Jumlah Penduduk Kotamadya Banda Aceh
Dari Tahun 1957 - 1995

No	Tahun	Jumlah Penduduk / Jiwa
1.	1957	20.976
2.	1971	53.626
3.	1979	69.755
4.	1980	72.617
5.	1990	184.630
6.	1995	209.334

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Banda Aceh

Pertambahan penduduk di samping karena adanya kelahiran baru, juga disebabkan tingginya arus perpindahan penduduk dari desa dan kota-kota lain dalam Daerah Istimewa Aceh ke Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh untuk alasan ekonomi dan pendidikan.

Menurut sensus penduduk tahun 1971, penduduk Kotamadya Banda Aceh yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar adalah 27,3 %. Berdasarkan data tahun 1982 jumlah ini sudah meningkat lebih banyak lagi. Kalau menurut sensus tahun 1971, penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang masih bersekolah 40,6 % yang berarti jumlah lebih tinggi dari pada prosentase untuk seluruh daerah Aceh (22,2 %) dan seluruh Indonesia (17,1 %) ⁵

⁵Sensus Penduduk 1971, Seri B No. 3 : Penduduk Menurut Kecamatan Di Luar Pulau Jawa, Madura, Angka Sementara tabel : 7,01, 09

Pada tahun 1980 dengan jumlah penduduk 72.617 jiwa dan luas daerah 11,08 km² berarti kepadatan penduduk Kota Banda Aceh tahun 1980 per km² adalah 6.550 jiwa, suatu jumlah angka yang relatif padat. Dari jumlah 72.617 jiwa itu, dapat digolongkan dalam usia dewasa dan usia anak-anak, penduduk dewasa berjumlah 47.080 jiwa dan anak-anak 25.537 jiwa (sumber : kantor Statistik Kotamadya Banda Aceh), atau lebih sepertiga jumlah penduduk.

Berdasarkan tingkat usia komposisi jumlah penduduk Kotamadya Banda Aceh lebih dari 1/3 nya terdiri dari anak-anak. Keadaan ini dirasa tidak begitu baik dalam kondisi usaha peningkatan pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Selain itu salan satu konsekwensinya perlu adanya penyediaan pangan dan fasilitas pendidikan serta kesempatan kerja yang cukup masa-masa yang akan datang. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II
Penduduk Kotamadya Banda Aceh Dewasa / Anak - anak
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan	Dewasa			Anak-Anak		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Meuraxa	18.213	17.359	35.572	12.627	12.028	24.055
2. Baiturrahman	18.890	18.113	37.003	9.225	8.040	17.265
3. Kuta Alam	20.726	19.043	39.769	9.131	9.257	18.388
4. Syiah Kuala	12.788	12.373	25.161	6.065	6.056	12.121
Kotamadya Banda Aceh	70.617	66.888	137.505	36.448	35.381	71.829

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Banda Aceh : 1990

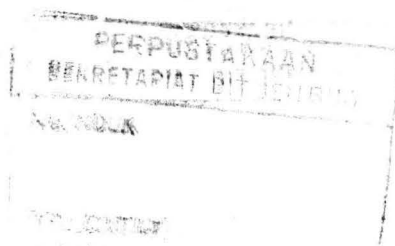
Data terakhir di tahun 1995 penduduk Kotamadya Banda Aceh meningkat menjadi 209.334 jiwa dengan perincian 208,584 jiwa warga negara Indonesia dan 750 jiwa warga negara Asing yang tinggal sementara di Banda Aceh, untuk lebih jelasnya mengenai komposisi penduduk tahun 1995 dapat dilihat pada tabel terlampir.

Tabel III
Penduduk Kotamadya Banda Aceh warga
Negara Indonesia / warga Negara Asing menurut Kecamatan
dan jenis kelamin tahun 1995

No.	Kecamatan	Warga Negara Indonesia			Warga Negara Asing		
		Laki-laki	Perejman	Jumlah	Laki-laki	Perejman	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meuraxa	30.217	29.350	59.567	23	37	60
2.	Baiturrahman	28.068	26.092	54.160	47	61	108
3.	Kuta Alam	29.613	28.070	57.683	244	230	474
4.	Syiah Kuala	18.770	18.404	37.174	83	25	108
	Jumlah	106.668	101.916	208.584	379	353	750

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Banda Aceh.

Penduduk asli Kotamadya Banda Aceh 100 % beragama Islam. Ada pula yang beragama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu dan Budha, serta Kong Fhu Tse. Tetapi mereka bukan orang Aceh, melainkan keturunan dari suku-suku lain. Berdasarkan sumber Kantor Statistik Kotamadya Banda Aceh pada tahun 1980 jumlah penduduk 71,525 jiwa, komposisi penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel IV :
Komposisi Penduduk Berdasarkan agama

No.	Penduduk	Jumlah
1.	Agama Islam	66.568
2.	Agama Kristen Protestan	3.317
3.	Agama Kristen Katolik	910
4.	Agama Budha	730
	Jumlah	71.525

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Banda Aceh tahun 1980

Dilihat secara persentase, maka 90 % dari jumlah penduduk Kotamadya Banda Aceh beragama Islam, hal-hal yang menyangkut dengan pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam jauh lebih menonjol dari pada agama-agama lain. Namun kehidupan beragama adalah harmonis, toleransi antara umat beragama tetap terjaga.

Berdasarkan pengamatan dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan rakyat dalam Kotamadya Banda Aceh relatif lebih baik bila dibandingkan dengan daerah-daerah pedesaan di Daerah Tingkat II lainnya di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal ini tentunya berkait erat dengan keadaan sosial, tingkat pendidikan dan tersedianya fasilitas kesehatan. Faktor tersebut disebabkan Kotamadya Banda Aceh sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah memiliki fasilitas yang lebih baik bila dibandingkan dengan tempat-tempat / kota-kota lainnya.

Tingkat kesehatan masyarakat erat hubungannya dengan lingkungan dan kebersihan dimana masyarakat itu tinggal, karena masalah tata kota dan kelestarian lingkungan juga berhubungan dengan

kependudukan dan perlengkapan industri. ⁶⁾ Berdasarkan pengamatan dapat disebutkan bahwa kesadaran masyarakat kota Banda Aceh masih rendah terutama tentang kesehatan lingkungan. Selain itu masalah kebersihan di Kotamadya Banda Aceh juga masih belum seperti yang diinginkan meskipun di wilayah - wilayah tertentu ada yang sudah dapat dikatakan memenuhi syarat kesehatan, terutama pada daerah-daerah pemukiman penduduk yang tergolong sebagai daerah elite untuk Kotamadya Banda Aceh seperti daerah Geuceu dan perkampungan Bandar Baru.

Di tempat-tempat pemukiman penduduk lainnya dan pada tempat-tempat pusat kegiatan ekonomi masyarakat, pusat pasar seperti pasar Aceh, pasar Peunayong dan pasar Seutui merupakan daerah yang belum begitu bersih. Pada musim hujan sering kali ada genangan-genangan air yang sering kali menyebabkan tempat tersebut menjadi kotor. Hal ini lebih-lebih lagi di daerah-daerah atau pemukiman penduduk yang letaknya dipinggiran kota, dimana masyarakat masih hidup dengan cara-cara yang belum memenuhi syarat kesehatan. Mereka banyak yang dengan mudah membuang sampah dalam saluran-saluran air; membuat jembatan di depan rumah yang kebetulan dilewati "parit induk kota" tanpa mengindahkan peraturan konstruksi yang berlaku, membuat bangunan rumah yang mengenai tanggul sungai atau membuat jamban (WC) umum yang di atas sungai ; membangun kilang-kilang minyak kelapa di tengah-tengah pemukiman penduduk dan pinggir-pinggiran sungai. Semuanya merupakan faktor pengganggu kesehatan dan tata lingkungan kehidupan kota Banda Aceh.

Di Kotamadya Banda Aceh pada tahun 1982 terdapat tiga buah rumah penyantun anak yatim piatu yaitu : 1. Panti Asuhan Setui, dengan jumlah yatim piatu 50 orang; Panti Asuhan Muhammadiyah, dengan jumlah yatim piatu sebanyak 60 orang ; dan 3 panti asuhan Nirmala, dengan jumlah yatim piatu 47 orang. ⁷⁾

⁶⁾ R.E Socatmadja, *Ilmu Lingkungan*, (Bandung : ITB, 1997)

⁷⁾ Rusdi Sufi *op. cit.*, hal. 37



2.1.2. Mata Pencaharian

Sumber pendapatan kerajaan Aceh pada zaman kesultanan adalah hasil perniagaan yang dilakukan di pelabuhan Aceh dan daerah takluknya. Selain itu juga dari bea cukai kapal-kapal asing yang berlabuh di pelabuhan Aceh. Mata pencaharian rakyat adalah nelayan, berdagang dan bercocok tanam. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai tukang emas, tukang periuk, tukang meriam, tukang kapal, tukang besi, tukang tenun dan pembuat berbagai minuman keras.⁸⁾

Hasil utama Kerajaan Aceh sebelum abad 19 adalah beras, daging, ikan, buah-buahan dan binatang ternak. Hasil tersebut tidak dapat di eksport karena tidak laku dipasar internasional, hanya digunakan untuk kebutuhan pasar dalam negeri. Hasil-hasil yang di eksport adalah lada, timah, emas, sutra, minyak, kapur barus, kemenyan, pinang dan gajah. Produksi utama yang menjadi primadona perdagangan adalah lada, sedangkan barang-barang yang di import adalah pakaian dari India dan porselin dari Cina.

Hasil bumi Kerajaan Aceh Darussalam yang menjadi sumber utama pendapatan pada abad 19 yang di eksport melalui pelabuhan pantai barat dan selatan ialah lada, kapur barus dan getah rambung. Dari pantai Utara dan Timur dihasilkan pinang, padi dan lada. Barang - barang import yang penting yaitu bahan pakaian, barang pecah belah, pisau, pacul yang umumnya berasal dari daratan Cina.

Setelah Belanda menguasai Aceh, kehidupan perekonomian masyarakat di Kutaraja mengalami banyak perubahan seiring dengan hijrahnya orang-orang Aceh dan pedagang-pedagang Islam keluar kota. Di Kutaraja Belanda menerapkan sistem monopoli perdagangan, penyerahan wajib, penanaman wajib dan pajak tanah yang harus dibayarkan dengan paksa. Setelah tahun 1874 pemerintah kolonial Belanda memaksa beberapa daerah uleebalang di Aceh untuk mengakui kedaulatan Belanda dan melaksanakan apa yang dikehendaknya sesuai dengan peraturan pemerintah Belanda.

⁸⁾ Muhammad Ibrahim, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta : Depdikbud, Ditjarahnitra, Proyek IDSN, 1991), hal. 81

Setelah Jepang menduduki Kutaraja, perekonomian rakyat menjadi lebih parah lagi. Rakyat banyak yang dipaksa melakukan romusya dan hasil bumi rakyat banyak yang diminta dengan paksa.

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 peranan Jepang praktis telah lumpuh. Namun masyarakat Kutaraja belum sempat memperbaiki perekonomiannya karena masih dalam suasana perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Pembangunan ekonomi baru terasa setelah Kutaraja beralih namanya menjadi Banda Aceh. Mata pencaharian dari sebagian besar warga kota Banda Aceh adalah di sektor non agraris dan bersifat heterogen. Hal ini disebabkan perkampungan-perkampungan penduduk kota tersebut berada di dalam dan sekitar pusat-pusat kegiatan ekonomi, pemerintah, pariwisata, perhubungan, komunikasi, transportasi dan lain-lain.

Banda Aceh mendapat julukan "kota pegawai". Di Kotamadya Banda Aceh 40 % mata pencaharian penduduk adalah pegawai negeri, ABRI 10 %, pedagang 20 %, buruh, tukang, nelayan, dan mereka yang bergerak dalam bidang industri dan jasa 10 %, pelajar/mahasiswa 20 %. Kebutuhan bahan makanan berupa hasil pertanian untuk keperluan penduduk didatangkan dari kampung-kampung lain / daerah tetangganya yaitu kabupaten Aceh Besar, kabupaten Pidie, dan kabupaten-kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Aceh.

Pada tahun 1981 keadaan mata pencaharian masyarakat dapat disajikan sebagai berikut. Jumlah pegawai negeri ada 971 orang yang meliputi pegawai tingkat atas, menengah dan rendahan yang dibedakan sesuai dengan golongan, pangkat dan jabatan. Pegawai negeri menengah ke bawah merupakan kelompok mayoritas. Sedangkan mereka yang berpangkat dan mempunyai kedudukan atau jabatan merupakan golongan minoritas yang dianggap sebagai golongan elite.

Kelompok elite lain adalah golongan pengusaha, pedagang besar dan orang-orang yang sukses dalam usahanya menjadi wiraswastawan seperti pemilik tambak / empang, pemilik kapal, dan lain-lain yang bisa menentukan nasib ekonomi rakyat kecil.

Lapisan pekerjaan rendah bila ditinjau dari segi ekonomi yaitu kaum buruh, tukang jahit, bengkel, tukang las, tukang kaleng, tukang kemasan, nelayan yang tidak memiliki kapal sendiri, tukang becak, sopir labi-labi yang tidak memiliki mobil angkutan sendiri, pembantu rumah tangga, pelayan toko dan pekerjaan rendah lainnya.

Dari gambaran di atas, bukanlah bersifat konstan, artinya mata rantai pekerjaan itu senantiasa berubah dari tahun ke tahun. Hal ini sangat tergantung kepada kemajuan dan prestasi kerja yang mereka capai dalam mengarungi bahtera hidup mereka sehari-hari. Perlu diutarakan pula, bahwa selain dari pada itu masih terdapat diantara mereka yang menambah sumber penghasilan dengan jalan beternak ayam, itik, lembu dan kambing secara kecil-kecilan.

Bagi pegawai rendah maupun para pensiunan dan purnawirawan untuk menambah penghasilan demi kesejahteraan keluarganya mereka tidak jarang yang melakukan kegiatan bisnis seperti menjual kue melalui restoran-restoran tertentu yaitu dengan membuat dan mengantarkannya ke warung-warung langganan dengan pemilik restoran. Ada juga yang menambah penghasilan dengan cara membuka kedai kopi, warung nasi dan tukang cukur (potong rambut).

Berhubung di Kotamadya Banda Aceh ini dihuni berbagai suku bangsa pendatang, untuk memudahkan klasifikasi mengenai pekerjaan yang dominan diantara warga pendatang tersebut, maka perlu dikaji tentang mata pencaharian penduduk berdasarkan mayoritas suku bangsa yang ada. Penduduk yang paling dominan disamping orang Aceh juga terdapat orang-orang Tionghoa dan Minangkabau.

Orang-orang Tionghoa kebanyakan mata pencahariannya di bidang perdagangan, jasa dan industri. Pusat usaha mereka melalui toko-toko di pasar Aceh, pasar Peunayong dan pasar Seutuy. Toko-toko besar pada umumnya adalah milik orang Tionghoa. Di jalan perdagangan 60 % adalah milik mereka dan 70 % toko di Peunayong. Demikian juga perusahaan menengah dan perusahaan kecil dan usaha pertokoan kebanyakan adalah milik orang Cina.

Setelah peristiwa G.30 S PKI orang-orang Cina WNA banyak yang dipulangkan ke negeri Cina. Ketika mereka berangkat untuk

pulang, banyak toko yang di jual kepada penduduk asli (orang Aceh). Pada tahun 1971 orang - orang Tionghoa itu banyak yang kembali dan berusaha lagi di Banda Aceh. Pengusaha pribumi mengalami persaingan keras terhadap pengusaha Cina. Pada tahun 1972 mulai bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor, sepeda, alat elektronik, alat-alat bangunan seperti paku, kawat, cat, seng, mesin, onderdel, alat-alat besi, foto studio, bengkel sepeda motor, pabrik sabun, angkutan barang dan sebagainya. ⁹⁾ Pengusaha pribumi terutama orang-orang Aceh banyak yang kalah ulet, kalah hemat, kalah bersaing di dibandingkan dengan pengusaha orang-orang Cina sehingga tidaklah aneh jika pengusaha pribumi banyak yang jatuh bangkrut sedangkan pengusaha Cina menjadi kaya.

Pengusaha Cina memperoleh modal dan kredit barang dari pengusaha Cina di Medan, Mereka juga mendapat fasilitas dengan memperoleh barang model baru yang mungkin tidak diberikan kepada pengusaha pribumi. Kejujuran untuk memegang amanah, menyeter bayaran barang-barang lebih banyak dilakukan oleh pedagang Cina dari pada pedagang pribumi. Ini merupakan salah satu faktor suksesnya pedagang Cina di samping karena bakat dan keuletan. Pengusaha Cina juga mengusahakan kredit dari Bank Dagang Negara yang nasabahnya sebagian besar adalah orang - orang Cina. ¹⁰⁾

Kelompok penduduk yang cukup besar jumlahnya di luar etnis Aceh adalah orang-orang Minangkabau yang mata pencahariannya kebanyakan pedagang dan tukang. Sebagai pedagang mereka ada yang menjadi pedagang besar, menengah dan kecil. Pedagang besar terdiri dari pedagang kain, dan yang menjadi pedagang menengah antara lain, pedagang kasur dan pedagang kopyah. Pedagang kecil terdiri dari pedagang cendol, es dan sebagainya.

Orang Minangkabau di Banda Aceh dulunya ada juga yang bekerja sebagai tukang sado. Pekerjaan ini dilakukan terutama sebelum

⁹⁾ Pasifikus Anok, *Kembalinya Pengusaha Tionghoa Di Banda Aceh*, (Banda Aceh : Pusat Pelatihan Ilmu-Ilmu Sosial, 1976), hal. 13

¹⁰⁾ T. Syamsuddin, *op. cit.*, hal. 23 - 24

kemerdekaan dan usaha ini di mulai hanya cukup untuk makan keluarga atau sebagai tambahan pendapatan di kala pensiun. Pekerjaan menjadi tukang sado ini dari tahun ke tahun terus merosot. Bahkan setelah kemerdekaan tampaknya jenis pekerjaan ini telah ditinggalkan sama sekali.

Sistem ekonomi yang mereka kembangkan pada tahap-tahap pertama mereka datang ke Banda Aceh diikat oleh struktur sosialnya. Bentuk ikatan tradisional itu berupa keluarga yang berasal dari satu ibu (saudara seibu atau sekandung) dari satu ninik (saudara sekaum atau saudara sepesukuan) membentuk satu kesatuan yang bersifat gotong royong. Salah seorang pedagang kain bertindak seperti pola yang telah kita sebutkan.

Sistem ini akan membawa hasil yang memuaskan jika dapat terus dibina sesuai dengan prinsip ekonomi. Namun perlu diketahui bahwa jatuhnya pedagang kain orang-orang Minangkabau di Banda Aceh disebabkan oleh keadaan ekonomi setelah terjadinya melaise di dunia tahun 1930 lebih-lebih pada masa pemerintahan Jepang.

Mereka mulai kehidupan di Banda Aceh dalam kondisi yang sederhana artinya mereka tidak banyak membawa bekal untuk menetap di Banda Aceh karena itu pada masa kedatangannya di Banda Aceh, mereka banyak yang tinggal di rumah sewa yang sederhana dan kemudian sebagian yang telah mampu mendirikan rumah sewa sederhana pula.

Setelah kemerdekaan, banyak orang Minangkabau yang mulai maju dalam bidang perdagangan dan mencari kota yang lain untuk berusaha. Mereka banyak yang memilih Medan dan Jakarta serta beberapa kota lainnya. Bagi mereka yang bekerja sebagai pegawai yang telah memperoleh kedudukan, untuk mulai membuat rumah yang lebih baik dan memilih daerah strategis yang sekarang dikenal dengan daerah elite. Sebagai penduduk kota, orang Minangkabau mulai kurang dikenal identitas sukunya, karena kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, kecuali bagi mereka yang tetap menggunakan bahasa Minang di rumah dan teman-teman, serta

menggunakan gelar yang telah dikukuhkan menurut adat Minang. ¹¹⁾

Walaupun Kota Banda Aceh didukung oleh daerah belakang yang relatif cukup mempunyai potensi ekspor, tetapi Banda Aceh tidak berkembang ke arah kota pengeksport. Banyak ekspor produksi pertanian yang dihasilkan daerah Aceh seperti kopi, karet, minyak nilam, rotan, pinang dan lain-lain, dieksport melalui pelabuhan Belawan di propinsi Sumatera Utara. Hal ini jelas merupakan kerugian bagi daerah Aceh. Apabila pelabuhan yang ada di Banda Aceh dapat ditingkatkan dengan fasilitas yang memadai untuk kepentingan ekspor tersebut, maka ekspor hasil-hasil produksi pertanian di Aceh dapat dilakukan di Banda Aceh. Hal ini tentunya dapat memberi sumbangan terhadap peningkatan pendapatan daerah Kotamadya Banda Aceh.

Tingkat kesejahteraan penduduk berhubungan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pengertian kesejahteraan sangat luas, namun ada cara-cara tertentu untuk mengukurnya. Salah satu cara untuk menilai / mengukur tingkat kesejahteraan penduduk Kotamadya Banda Aceh dengan mendasarkan pada pendapatan masyarakat Kotamadya Banda Aceh itu sendiri. Berdasarkan suatu studi yang pernah dilakukan tentang pendapatan masyarakat Kotamadya Banda Aceh menunjukkan bahwa 40 % penduduk berpendapatan terendah menerima 16 % dari total pendapatan, 50 % penduduk berpendapatan menengah menerima 16,9 % dari total pendapatan. 10 % penduduk golongan berpendapatan tertinggi menerima 47,1 % dari total pendapatan seluruhnya. ¹²⁾

Menurut ukuran Bank Dunia, tingkat pendapatan Kotamadya Banda Aceh, tidak berada di bawah garis kemiskinan; namun dari berbagai distribusi pendapatan yang merata mengalami kepincangan. ¹³⁾

2.1.3. Mobilitas Sosial.

Mobilitas sosial terjadi sebagai akibat terjadinya gejolak sosial

¹¹⁾ *Ibid.*, hal 34 - 36

¹²⁾ Rusdi Sufi, *op. cit.*, hal. 33

¹³⁾ Sumber : Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap Ke Tiga 1979 / 1980 - 1983 / 1984 Kotamadya Tingkat II Banda Aceh

maupun terjadinya urbanisasi. Hal semacam ini tampaknya terjadi pula di Kotamadya Banda Aceh. ¹⁴⁾ Urbanisasi mengarah kepada penambahan penduduk (mobilitas horizontal), dengan kata lain penduduk Kotamadya Banda Aceh menjadi semakin padat (lihat data kepadatan penduduk di Kotamadya Banda Aceh dari tahun ke tahun). Pertambahan penduduk yang pesat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman baru sehingga adanya mobilitas horizontal ikut pula mempersempit lingkungan hidup penduduk kota. Pembukaan lapangan kerja baru seperti yang dikembangkan oleh pemerintah daerah tidak cukup untuk menampung para pencari kerja yang datang dari berbagai pelosok Daerah Istimewa Aceh. Hal ini pula yang mengakibatkan terjadinya mobilitas vertikal baik yang positif maupun yang negatif.

Gerak masyarakat yang vertikal dan positif dapat kita lihat dengan tumbuhnya kelompok-kelompok pengusaha baik dalam dunia wisata seperti perhotelan, restoran *art shop*, *trafel* maupun dalam dunia usaha lainnya. Dengan sendirinya masalah gerak vertikal ini menyangkut pula masalah status sosial dari golongan masyarakat yang tampak mengalami perubahan.

Status ini bukan hanya dapat dicapai melalui dunia usaha tetapi dapat pula melalui pendidikan. Berdirinya Universitas Syiah Kuala, IAIN Ar-Raniri dan perguruan tinggi swasta lainnya merupakan salah satu tempat yang dapat memberikan harga diri bagi masyarakat kota Banda Aceh.

Semakin padatnya Kota Banda Aceh telah membawa suatu problem tersendiri bagi masyarakat, seperti turunnya status bagi golongan masyarakat yang gagal dalam menjawab tantangan hidup seperti terjadinya pengangguran, gangguan keamanan / kriminalitas, gelandangan dan pengemis.

Pemerintah daerah telah berusaha untuk mengatasi dampak negatif

¹⁴⁾ Astrid S. Soesanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Bina Cipta, 1977), Hal. 98 - 99

dari pemekaran kota Banda Aceh, misalnya pemilikan kartu tanda penduduk, pemulangan orang-orang yang tidak memiliki kartu penduduk ke daerah asalnya dan melarang beroperasinya tempat-tempat maksiat.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa jumlah penduduk dalam wilayah Kotamadya Banda Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari penduduk 72.617 jiwa tahun 1980 dan dengan luas 11,08 km², Kotamadya Banda Aceh termasuk padat penduduknya dengan kepadatan rata-rata 6.550 jiwa per km² menurut angka pada kantor Sensus dan Statistik Kotamadya Banda Aceh, tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 4,5 % per tahun. Hal ini bisa terjadi karena Kotamadya Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Aceh mempunyai berbagai macam fasilitas seperti adanya perguruan tinggi, kegiatan perdagangan yang lebih berkembang, lapangan pekerjaan yang lebih luas, menjadikan faktor pendorong bagi masyarakat untuk berurbanisasi. Kebenaran ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya angkatan kerja di Kotamadya Banda Aceh, dari tahun 1971 sebesar 26,1 % menjadi 31,3 % pada tahun 1978.¹⁵⁾ Namun penduduk di Kotamadya Banda Aceh, sangat dipengaruhi oleh "ledakan" pemerintahan dan pendidikan seperti yang telah disebutkan diatas.

Bila dilihat penduduk sebagai faktor produksi, maka penambahan penduduk adalah sebagai faktor yang menguntungkan, tetapi disisi lain penambahan penduduk ini dapat pula menimbulkan berbagai masalah, baik yang menyangkut bidang ekonomi maupun sosial. Pertumbuhan penduduk dapat menjadi faktor penghalang perkembangan ekonomi, hal ini terjadi karena laju pertumbuhan produksi belum dapat mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk.

Mencari data tentang mata pencaharian penduduk Kotamadya Banda Aceh merupakan pekerjaan yang cukup sulit. Hal ini disebabkan karena adanya sebagian penduduk yang belum mempunyai sumber mata pencaharian tetap. Bagi mereka sulit untuk membedakan mana

¹⁵⁾ Repelita III Daerah Istimewa Aceh, *Kesempatan Kerja*, hal. 86

pekerjaan, pokok dan mana pekerjaan sambilan. Mengenai jumlah pencari kerja di Kotamadya Banda Aceh dari tingkat SD sampai dengan Sarjana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V
Banyaknya Pencari kerja dirinci menurut Pendidikan
Dalam Kotamadya Banda Aceh tahun 1994.

No.	Tingkat Pendidikan	Yang Belum ditempatkan tahun ini		Yang terdaftar tahun ini.		Yang ditempatkan tahun ini	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	SD dan yang setingkat	542	60	42	7	170	61
2.	SLP / setingkat	1343	388	144	83	38	17
3.	SLA / setingkat	12612	10132	1834	1552	409	535
4.	Sarjana Muda	19	8	491	655	162	163
5.	Sarjana (S1)	3017	2116	1223	864	191	189
	Jumlah	18679	14990	3735	3161	920	965

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Banda Aceh.

Berdasarkan data statistik di atas, dapat diketahui masih besarnya angka pengangguran di Kotamadya Banda Aceh. Dari jumlah mereka yang masih menganggur, yang terbesar adalah lulusan SLP dan SLA. Jumlah lulusan sarjana yang masih menganggur juga cukup besar, hal ini menjadi beban pemikiran bagi pemerintah daerah untuk mengentaskannya. Solusi apa yang harus diambil agar mereka dapat pekerjaan yang layak dan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Banda Aceh. Berbagai upaya telah dilakukan seperti; pemberian dana IDT bagi mereka yang mau berusaha, dengan menyalurkan Bandes dan memberi kemudahan dalam memberi ijin usaha, pinjaman lunak dengan bunga ringan, kredit usaha kecil, kredit candak kulak dan

sebagainya. Bagi mereka yang tidak memiliki keahlian khusus dapat diberikan pelatihan atau kursus-kursus yang menunjang bagi mereka agar bisa melakukan wira usaha seperti menjahit, bengkel, montir, tukang dan sebagainya.

2.2. Pendidikan

Dalam arti umum pendidikan ialah segala usaha dan perbuatan dari satu generasi tua untuk mengalihkan segala pengalaman, pengetahuan, kecakapan serta keterampilan kepada generasi muda untuk memungkinkan fungsinya kelak dalam kehidupan. Jadi dalam arti luas ialah penyerahan kebudayaan dari yang tua kepada yang muda, corak pendidikan itu erat hubungannya dengan cara penghidupan, agama, filsafat serta cita-cita suatu bangsa. Jika suatu bangsa itu berubah cita-citanya maka berubah pula corak pendidikan itu. ¹⁶⁾

Pendidikan di Banda Aceh sebenarnya tidak lepas dari kebudayaan serta sejarah Kotamadya Banda Aceh baik dalam kemajuan dan kemunduran yang dicapai kota tersebut dalam pendidikan. Secara garis besar periode-periode pendidikan di Banda Aceh dapat kita bagi sebagai berikut :

1. Pendidikan pada masa Kerajaan Bandar Darussalam sampai tahun 1907.

Pendidikan ini ada 2 macam yaitu pendidikan praktis dan pendidikan keagamaan. Mengenai pendidikan praktis pada zaman kerajaan Bandar Darussalam, di antaranya yaitu meliputi keahlian memahat batu, keahlian membuat alat-alat pertanian, keahlian membuat benda-benda tembikar, keahlian menganyam, pandai besi, kerajinan emas dan perak, kerajinan pertukangan dan mengukir kayu, perkapalan,

¹⁶⁾ *Monografi Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta : Proyek Pengembangan Kebudayaan Depdikbud, 1976), hal. 124

pendidikan persenjataan dan angkatan perang Aceh. Pendidikan keagamaan diletakkan di Meunasah, setiap gampong mempunyai Meunasah. Di Meunasah inilah anak-anak menerima pendidikan agama untuk pertama kali. Meunasah adalah lembaga pendidikan yang rendah. Di sini anak-anak menerima pelajaran dari seorang guru yang mengepalai Meunasah yang disebut Teungku Meunasah. Dalam tugasnya memberi pendidikan agama kepada anak-anak dibantu oleh beberapa orang murid yang lebih cerdas yang pada beberapa tempat disebut sida (pembantu) pelajaran yang diberikan di Meunasah ialah pelajaran membaca Al-Quran, Tajwid, sembahyang, puasa dan hal-hal yang praktis dan pelajaran membaca berzanji. Buku-Buku pelajaran terkenal antara lain misalnya : *Masa Ilal Mubtady, Bidayatul Salihin*.

Untuk memperoleh pendidikan Agama yang lebih tinggi, anak-anak belajar di lembaga yang lebih tinggi pula, lembaga ini disebut Rangkang atau Pesantren atau Madrasah. Rangkang ini biasanya terdapat pada *kemukiman* yaitu gabungan dari beberapa gampong. Pelajaran yang diberikan biasanya membaca Al Quran, Ilmu Tauhid, Fikh, Imam Tajwid, Tafsir, Hadist dan Sejarah Rasul. Biasanya pelajar-pelajar putri masih diijinkan, tetapi golongan puteri jumlahnya sudah berkurang. Teungku meunasah tidak menerima gaji, hanya menerima sedikit bantuan dari murid-muridnya, masyarakat dan dari Masjid.

Pelajaran Tinggi Agama Islam di Aceh terdapat di ibukota Kerajaan Aceh yaitu Banda Aceh Darussalam. Rangkang tersebut bernama Jami'ah Baiturrahman. Pelajaran Tinggi ini pada abad 16 dan 17 merupakan pusat pendidikan tertinggi di Aceh. Tempat mencari ilmu bagi pemuda dari segenap pelosok nusantara dan terkenal di Asia Tenggara. Guru-gurunya adalah ulama-ulama Aceh sendiri serta ulama-ulama dari Mesir dan Persi. Banyak tipe dan bentuk dari Pelajaran Tinggi ini meniru Peguruan Tinggi Agama di Mesir (Kairo), Bagdad dan negara-negara Islam lainnya. Pelajaran Tinggi ini membahas

masalah-masalah Hadist, Thaib (Kesehatan), Perobatan, Sejarah Hizab (Fala qiyoh), Siajasah (pemerintahan), Ahli (logika), Pertanian, Hukum, Filsafat, ke-Tuhanan (Tauhid), Hurb (peperangan), perbendaharaan dan perbandingan ilmu hukum.

Pelajaran Tinggi ini telah bertahan ratusan tahun dan dipimpin oleh generasi-generasi yang satu berbeda dengan yang lainnya, tetapi ajaran-ajaran Islam telah mendarah daging pada rakyat Aceh, bahkan jabatan pemerintahan penasehat Sultan pun adalah golongan Ulama / Agama. Jadi pendidikan agama pada abad 16 dan 17 di Aceh dilakukan oleh golongan agama sebagai panggilan hidup serta dibantu oleh negara sebagai pendidikan negara. Umumnya agama Islam di Aceh bermazhab Syafii dan pengaruh Qadariyah juga didapati ulama-ulama dan pertentangan paham ulama-ulama di Aceh telah pula terjadi antara paham "wihdatul wujud" (pan theisme) dan wihdatusy syuhud (ran and theisme) sebagaimana halnya pandangan ulama-ulama yang silam telah mendirikan pengajaran yang tinggi agama di Aceh antara lain Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumathrany dan Syekh Abdurrauf As Singkil.

Tingginya ilmu agama di Aceh merupakan salah satu faktor hampir dari seluruh bangsa di Asia Selatan dan Asia Tenggara datang menuntut ilmu ke Banda Aceh Darussalam. Demikian pula dari Indonesia dan Asia Tenggara jika akan pergi ke Mekah mereka singgah dahulu di ibukota Kerajaan Aceh untuk naik kapal ke Mekah sambil mereka menuntut ilmu di Aceh. Demikian pula setelah kembali dari Mekah juga singgah lagi di Aceh sebelum berangkat ke negeri masing-masing.

2. Pendidikan di zaman Belanda.

Pada tanggal 21 Agustus 1907 Belanda resmi menguasai Aceh dan melaksanakan pemerintahan. Dengan demikian pendidikan di Aceh mulai menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Di Kutaraja masih ada sekolah-sekolah agama yang berbentuk Madrasah, Pesantren, Dayah, Pengajian dan sebagainya disamping juga pendidikan

gubernemen/sekolah-sekolah Belanda.

Sekolah-sekolah Gubernemen didirikan pemerintah Belanda, merupakan alat dari pemerintah penjajah. Tujuan utama dari pemerintah Belanda adalah sekedar keperluan pemerintah dalam pengadaan tenaga administrasi tingkat bawah seperti pesuruh (opas) kantor, pegawai rendahan dan sebagainya. Membuka sekolah rendahan untuk dapat sekedar membaca, menulis dan berhitung. Untuk keperluan itu di Kutaraja kemudian didirikan tiga buah sekolah Belanda yang diberi nama *Vervolgschool Met Nederlandsche* ialah sekolah sambungan yang menggunakan bahasa Belanda. Kemudian dibangun sebuah Sekolah Dasar untuk anak-anak putri yang ditambah pelajaran jahit menjahit. Sekolah putri ini diberi nama *Meisjes School*. Sebuah sekolah *Hollandsch Inlandsche School (HIS)* yaitu sekolah sambungan yang mempunyai tujuh kelas dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sebuah sekolah *Europesche Lagere School (ELS)* ialah sekolah untuk anak-anak orang Belanda dan beberapa anak Bangsawan. Berdiri sejak tahun 1917. Sebuah sekolah khusus anak-anak orang Cina yang diberi nama *Hollandsche Chinese School (HCS)* berdiri tahun 1917. Sebuah sekolah khusus anak-anak militer Belanda dari suku Ambon yang bernama *Hollandsche Ambonsch School (HAS)* dan sebuah lanjutan yang bernama MULO berdiri pada tahun 1922. Untuk lebih jelasnya mengenai data sekolah Belanda yang ada di Kutaraja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VI
Nama Sekolah - Sekolah Gubernemen Pada Masa
Pemerintahan Belanda di Kutaraja.

No.	Nama Sekolah	Banyaknya	Alamat	Tahun Berdiri	Pimpinan
1	2	3	4	5	6
1.	Volkschool Sekolah Desa	3 buah	Kampung Baru Kuta Alam Seutuy	1914 1916 1921	
2.	Meisjesschool	1 buah	Kampung Neusu	1936	
3.	Vervolgschool Met Nederlandsch	2 buah	Peunayong Merduati	1917 1927	
4.	Vervolgschool Met Lanbew	1 buah	Kampung Baru	1936	
5.	Holandsch Indlandsch School	2 buah	Peunayong Merduati	1917 1927	
6.	Europesch Lagere School (ELS)	2 buah	Peuniti Peunayong	1917 1922	Rom Katolik Medan
7.	Holandsch Chinese School (HCS)	1 buah	Peunayong	1922	
8.	Holandsch Ambonsche School (HAS)	1 buah	Peuniti	1917	
9.	MULO	1 buah	Kampung Baru	1922	
10.	HIS Muhammadiyah	1 buah	Merduati	1928	Pengurus besar Muhammadiyah Yogyakarta
11.	Taman Siswa	1 buah	Merduati	1932	Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta

Sumber : Monografi Daerah Istimewa Aceh, Jakarta : Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976, hal. 160.

Di Kutaraja juga terdapat sebuah sekolah HIS Muhammadiyah. Sekolah ini berfungsi sebagai jembatan antara pendidikan Barat dengan

pendidikan agama. Di sekolah ini anak-anak tidak terpisah dari bangsa dan agamanya. Mata pelajaran agama yang diberikan dengan menitik beratkan pada pengertian dan penguasaan. Sekolah ini berdiri di Kutaraja tahun 1928 dan Taman siswa berdiri di Kutaraja tahun 1932 dipimpin oleh Sutekno Patmo Sumarto. Pendidikan ini berazas Tutwuri Handayani dan perasaan kebangsaan. Taman Siswa di Kutaraja ini merupakan cabang dan bagian dari Taman Siswa Yogyakarta yang disesuaikan dengan keadaan setempat.

3. Pendidikan pada zaman Jepang

Dalam zaman Jepang pendidikan asal berjalan saja. Sekolah dikuasai oleh suasana perang serta guru-guru hidup dalam penekanan dan cengkraman bala tentara Jepang. Sekolah dikuasai oleh disiplin militer dan penanaman semangat pengabdian kepada *Teno Haika*. Pelajaran hanya singkat serta mengutamakan kebudayaan Jepang seperti *Taiso*, bahasa Jepang, nyanyian Jepang, *Kongrohase* dan sebagainya. Guru-guru melaksanakan tugas dengan tekanan bayonet dan tidak menerima gaji. Dalam pendidikan dapat kita lihat beberapa perubahan antara lain :

- a. Semua Sekolah Dasar yang berbeda-beda pada masa Belanda seperti *Volkschool*, *Vervolgschool*, *Ambonsche School*, HIS dan sebagainya disatukan menjadi Sekolah-Dasar serta hanya mempunyai satu bentuk yang diberi nama *Kokumin Gakko*.
- b. Sekolah-Sekolah Agama berjalan terus dengan serba kekurangan dan selalu dibawah penekanan tentara Jepang.
- c. Sekolah-Sekolah lanjutan hanya ada dua buah yaitu :
 1. Syu Gakko : Yaitu Sekolah lanjutan lima tahun yang merupakan lanjutan dari MULO pada masa Belanda. Sekolah ini dipimpin oleh orang-orang Jepang yang bernama J. Hashimoto. Guru-guru lainnya ialah Karim Duriat, Suratno, Ali Murtolo, Mukran, Z. Baharuddin Pasaribu, Hayim MK, A. Azis Ibrahim dan lain-lain.
 2. Sihañg Gakko : Yaitu Sekolah Guru yang lamanya tiga tahun sesudah SD. Dipimpin oleh seorang Jepang bernama Jasuda Isamu. Guru-guru lainnya ialah Baharuddin Harahap, Ibrahim, M. Dawam, A. Siahaan. Pada sekolah lanjutan ini pelajaran bahasa Jepang, gotong royong serta menanamkan semangat untuk mencintai *Dai Toa*.

4. Pendidikan pada awal kemerdekaan tahun 1945 - 1950.

Tahun 1945 - 1950 adalah masa perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Banyak guru-guru yang meninggalkan tugas-tugas sebagai pendidik karena mengalihkan tugas kelapangan militer. Keyakinan bahwa kemerdekaan itu harus diisi dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya selalu ditekankan melalui pendidikan kepada pelajar-pelajar dan pemuda-pemuda, dengan demikian pendidikan didasarkan untuk tujuan kemerdekaan. Dengan demikian pelajar-pelajar mempunyai cita-cita yang tinggi dalam menerima pelajaran. Rakyat termotivasi untuk bersekolah sesuai dengan harapan masing-masing. Sekolah-sekolah tersebut di antaranya yaitu :

1. Sekolah-sekolah Dasar yang berasal dari Sekolah Desa seluruhnya dijadikan Sekolah Rakyat enam tahun. Sekolah-sekolah agama yang berbentuk pesantren dan rangkang tetap dengan nama Pesantren.
2. Sekolah-sekolah agama diorganisir dengan baik dan disatukan kurikulumnya menjadi Sekolah Rendah Islam Negeri (SRI).
3. Sekolah-sekolah agama swasta yang berbentuk pesantren dan Rangkang tetap dengan nama Pesantren.
4. Untuk mendapatkan tenaga guru maka diadakan kursus guru cepat (KGT) yang mendidik pemuda-pemuda yang telah berijazah SSD dan telah berumur untuk menjadi guru. Lama pendidikan untuk KGT ini antara enam bulan sampai satu tahun. KGT ini hanya dua angkatan saja yaitu tahun 1946 dan tahun 1947. Sekolah-sekolah Lanjutan Pertama di antaranya yaitu SMP Negeri Banda Aceh dipimpin oleh Kamili. Sedangkan Sekolah Lanjutan Atas (SMA) Negeri di Kutaraja ialah SMA Negeri I Banda Aceh sekarang merupakan lanjutan dari Shu Gakko zaman Jepang, dipimpin oleh Murtolo, kemudian digantikan oleh Suratno.

Mengenai sekolah-sekolah kejuruan di antaranya : SGM (Sekolah Guru Menengah) Negeri Kutaraja dipimpin oleh M. Jamil. SKKP Negeri Kutaraja dipimpin oleh Nyai Ir. Soekarno dan STN Kutaraja dipimpin oleh Anwar Bustamam. Sekolah Lanjutan Agama Islam SGI (Sekolah Guru Islam) ialah Normal Islam Institut Bireuen pada tahun 1946 diambil alih oleh pemerintah dan dipindahkan ke Banda Aceh dan bertukar nama menjadi SGI.

Sejak tahun 1945 seluruh pendidikan umum di Aceh dipimpin oleh Inspektur Pendidikan dan Pengajaran meliputi Sekolah Rakyat Negeri, Sekolah Lanjutan Pertama dan Atas serta Sekolah-sekolah Kejuruan. Kepala Inspektur Pendidikan dan Pengajaran Umum ini ialah Ali Murtolo dan kemudian Karim Duryat. Semua pelajar-pelajar Sekolah Lanjutan bergabung dalam satu kesatuan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) dan dari pelajar-pelajar Sekolah Lanjutan Islam dalam Tentara Pelajar Islam (TPI). TRIP dan TPI mendapat latihan dasar kemiliteran. Pada tahun 1950 adalah tahun pertama dari SMA dan SGA Negeri Kutaraja dan dapat meluluskan murid-murid dengan jumlahnya yang dapat dihitung dengan jari saja.

5. Pendidikan setelah tahun 1950 hingga sekarang.

Sejak tahun 1950 pendidikan di Banda Aceh maju dengan pesat. Tetapi pada tahun 1953 terjadi pemberontakan DI / TII di Aceh. Hal ini mempengaruhi perkembangan pendidikan di Banda Aceh. Pendidikan yang telah berjalan lancar kembali tidak mendapat perhatian dan berjalan seadanya. Keadaan ini berjalan sampai tahun 1959. Pada tahun 1959 barulah terbentuk kantor perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang dipimpin oleh Azis Ibrahim. Dengan terbentuknya kantor ini barulah perkembangan sekolah berjalan lancar serta pengawasan dan pembinaan pendidikan dapat berjalan dengan intensif. Untuk melihat perkembangan pendidikan tersebut lihat pada tabel :

Tabel VII
Sekolah Dasar/Kelas/Gedung/Murid tahun 1975 di Banda Aceh.

No.	Kodya	Wi- layah	Status	SD	Kelas	Ge- dung	Lokal	Guru	Murid
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Banda Aceh	2	Negeri	31	216	35	106	302	8.906
			Bantuan	4	41	3	23	2	1.496
			Swasta	5	36	5	5	39	1.536
	Jumlah	2		40	293	43	134	343	11.938

Dikutip dari Statistik Dinas P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Tabel VIII
Jumlah Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan
Atas tahun 1975 di Kota Banda Aceh.

No.	Nama Sekolah	SP Peneugrian Th	Jumlah Kelas	Jumlah Siswa	GT	GTT	Peg	Pengikut Ujian 1979	Lulus Ujian 1979
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SMPN Banda Aceh	2106/B/III 23-7-1951	17	727	28	-	3	215	188
2.	SMPN II Banda Aceh	187/SK/B/III 25 - 2 - 1960	11	488	17	-	5	101	97
3.	SMPN III Banda Aceh	80/SK/B/III 30-7-1964	15	562	24	-	8	214	198
4.	SMPN IV Banda Aceh	188/SK/B/III 25-2-1960	16	589	29	-	5	63	57
5.	SMP Aisyiyah Banda Aceh	-	3	44	3	10	1	-	-
6.	SKKP Banda Aceh	4449/B/Kej/ 1952	16	581	31	8	6	182	147
7.	SKKP Aisyiyah Banda Aceh	-	3	44	3	10	1	-	-
8.	SKKA Banda Aceh	-	15	433	17	13	5	142	128
9.	SKKA Aisyiyah Banda Aceh	-	3	81	-	20	1	-	-
10.	SMEP Neg. Banda Aceh	2699/Oe/1953 2-5-1953	9	306	14	6	5	54	51
11.	SMEA Neg. Banda Aceh	729/B/III/57 1-12-1957	9	270	15	8	9	75	75
12.	KPAA Banda Aceh	-	6	125	1	8	3	51	51
13.	KPA Banda Aceh	-	4	90	2	28	1	34	34
14.	PGSLP	-	9	340	-	37	2	282	234
15.	SPG Banda Aceh	884/6 6-5-1950	11	432	15	7	3	75	68
16.	KPG Neg. Banda Aceh	-	13	431	58	1	-	-	-
	Jumlah		161	5543	257	166	58	1488	1328

Sumber : Monografi Daerah Istimewa Aceh, Depdikbud.

Jumlah sekolah ini mengalami perkembangan pada tahun 1994. Hal ini bisa terjadi mengingat kota Banda Aceh mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Jumlah anak-anak usia sekolah pun berlipat ganda. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang telah meningkat maka fasilitas sekolah ditingkatkan. Perkembangan sekolah ini bisa dilihat pada data tabel berikut ini.

Tabel, IX.

Banyaknya sekolah guru dan murid di rinci menurut jenis sekolah dan kecamatan dalam kota Banda Aceh tahun 1994.

No.	Kecamatan	Taman Kanak-Kanak			Sekolah Dasar			SLTP			SLTA		
		Skl	Guru	Murid	Skl	Guru	Murid	Skl	Guru	Murid	Skl	Guru	Murid
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meuraxa	11	44	734	35	317	6824	8	198	2252	11	135	2332
2.	Baitur-rahman	14	54	1325	38	359	6067	9	246	3596	5	36	363
3.	Kuta Alam	16	46	1987	27	276	6191	11	309	4446	15	516	7706
4.	Syiah Kuala	9	20	499	20	175	342	3	102	1324	2	112	1311
	Jumlah	50	167	3695	120	1127	22462	31	855	11618	33	799	11712

Sumber : Kantor Depdikbud Kotamadya Banda Aceh.

2.3. Sarana Komunikasi dan Transportasi.

Pembangunan sistim komunikasi secara langsung akan merubah interaksi antara sesama manusia menjadi lebih praktis. Hal ini dapat kita lihat dalam perkembangan peralatan komunikasi dan transportasi seperti pers, radio, televisi, telepon, jaringan jalan dan alat transportasi untuk menghubungkan daerah luar yang lebih jauh melalui transportasi laut dan udara. Sarana komunikasi yang ada di Banda Aceh di antaranya yaitu koran / pers, televisi, radio, telepon, pos dan giro. Untuk lebih

jelasnya di sini akan kami uraikan satu persatu mengenai perkembangan sarana komunikasi yang ada.

2.3.1. Pers

Mengenai pers di zaman sebelum penjajahan Belanda, kira-kira abad 17, 18 dan 19 di Banda Aceh ada peluncuran informasi melalui penulisan yang dilakukan orang dalam bahasa Melayu dengan aksara Arab. Penulisan ini dilakukan di atas kertas yang berbentuk panjang terurai sampai berpuluh meter panjangnya dengan lebar 5 sampai dengan 10 cm. Penulisan ini berisi bukan saja berita-berita mengenai keadaan negara dan hubungannya dengan negeri luar, akan tetapi termasuk di dalamnya silsilah raja-raja, ramalan-ramalan masa yang akan datang, fatwa ulama dan sebagainya. Ada juga berita itu ditulis di sudut atau di sekeliling dari isi seluruh kitab pelajaran agama, yang paling terkenal dan menarik adalah naskah-naskah yang ditulis seorang wartawan di zamannya bernama Teungku Di Mulek yang mengungkapkan tentang peristiwa-peristiwa zaman lampau dan zamannya penulis sendiri serta ramalan-ramalan masa yang akan datang. Naskah-naskah ini tersimpan di museum University Kebangsaan Melayu di Kuala Lumpur.¹⁷⁾

Peranan pers di abad-abad tersebut, belum dapat diuraikan lebih terperinci karena kita belum memperoleh data-data yang lengkap, selain itu penulisan pers seperti yang kita kenal sekarang tidak ditulis dengan tulisan latin, akan tetapi dengan aksara Arab. Ditambah lagi alat-alat teknologi seperti kita kenal sekarang belum berkembang. Kita mengetahui adanya penulisan pers dalam versi seperti yang kita kenal sekarang pada akhir abad 19 dengan lahirnya sebuah surat kabar resmi pemerintah penjajahan Belanda bernama "*Achese Nieuws Blad*". Siapa penerbitnya, penanggung jawab dan redaktornya tidak diketahui jelas, karena belum diketemukan data-datanya. Keterangan ini diperoleh dari pembicaraan orang ke orang dan masih memerlukan penyelidikan di Museum Gajah, Jakarta.

¹⁷⁾ *Ibid.*, hal. 182

Kegiatan pers di zaman penjajahan Belanda di Banda Aceh tidak banyak yang dapat kita utarakan, karena belum pernah ada survey dan riset ke arah itu. Kecuali terdapat beberapa majalah bulanan, baik yang di tulis dalam aksara latin maupun aksara Arab. Di zaman kemerdekaan pada saat hangat-hangatnya merebut kemerdekaan, lahir surat kabar pertama di Banda Aceh bernama "Semangat Merdeka" sebagai peleburan dari surat kabar "Aceh Simbun", dipimpin oleh Amelz, A. Hasjmy, Abdullah Arief, Matumona dan lain-lain. Pada tahun 1950 lahir surat kabar yang kedua di Banda Aceh dipimpin oleh Kolcad. Hussein Joesoef, A. G. Mutiara Bernama "Tegas".

Menjelang usainya peristiwa berdarah di Aceh pada tahun 1961 Kolead Husein Joesoef menerbitkan surat kabar "Harian Pancacita". Di tahun 1970 berubah namanya menjadi "Api Pancasila", dan pada tahun 1973 berubah lagi menjadi "Aceh Post". Pada tahun 1967 lahir surat kabar harian "Angkatan Bersenjata", "Edisi Aceh" dipimpin oleh Anwar Zeats, "Banda Aceh" dipimpin oleh Jusuf Ubit dan lain-lain, tahun 1973 Harian ini menjadi mingguan bernama "Iskandar Muda".

Sejak tahun 1972 dengan adanya *policy* pemerintah di bidang pembinaan pers yang kuat dan berwibawa dan hidup di atas kakinya sendiri, berangsur-angsur subsidi pemerintah kepada pers dikurangi, maka banyak harian-harian, mingguan berkala, majalah bulanan tidak terbit lagi, bahkan ada yang surat ijinnya dicabut karena sesuai dengan keputusan Menteri Penerangan, bahwa suatu penerbitan pers yang selama lebih dari 6 bulan tidak terbit terus menerus, dengan sendirinya SIT (Surat Izin Terbit) nya dibatalkan, terhentinya penerbitan pers itu antara lain disebabkan karena percetakan untuk mencetak pers hanya satu-satunya di Aceh yaitu Percetakan Negara Banda Aceh. Faktor kedua karena naiknya ongkos cetak dan harga kertas koran dan kelemahan di bidang administrasi dan menejemen perusahaan.

2.3.2. Radio

Mengenai Radio, sejak zaman penjajahan Belanda sampai menjelang proklamasi kemerdekaan, di Banda Aceh tidak ada radio siaran (*broadcasting*). Pemilik-pemilik pesawat penerima hanya dimiliki oleh segelintir orang dengan menangkap siaran-siaran dari Pulau Jawa

dan luar negeri. Di zaman pendudukan Jepang seluruh alat-alat telekomunikasi seluruhnya berada di tangan bala tentera Jepang dan akan mendapat hukuman berat apabila dimiliki oleh rakyat. Karyawan yang bekerja dibidang telekomunikasi tersebut kebanyakan adalah orang-orang Indonesia. Itu sebabnya berita tentang proklamasi diterima di Banda Aceh melalui pemuda-pemuda ini, meskipun agak terlambat.

Setelah kemerdekaan dapat direbut dari serdadu Jepang, para pemuda bekas pegawai-pegawai telekom Jepang itu atas ketrampilan sendiri membuat radio-radio siaran. Radio - radio siaran yang dibuat oleh mereka inilah yang kemudian memegang peranan penting dalam membina kesatuan bangsa dan semangat mengusir penjajah. Mereka inilah yang merupakan benih-benih dari terbentuknya pemancar-pemancar Radio Republik Indonesia. Di zaman perang fisik pemancar-pemancar ini berpindah-pindah tempat dari satu front ke front lainnya, sehingga radio siaran ini dinamakan "Radio Rimba Raya". Ketika daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diduduki oleh tentera Belanda, hanya tinggal Aceh dengan Radio Rimba Raya yang mengumandang ke seluruh dunia, melalui pemancar inilah Pemerintah Darurat Republik Indonesia mengadakan hubungan ke luar negeri, terutama dengan Radio ALL India New Delhi. ¹⁸⁾

Sesudah penyerahan kedaulatan ketika Wakil Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Perwiranegara di tempatkan di Kutaraja, pemancar radio itu ditempatkan di Pavillium Kantor Jawatan Penerangan Aceh. Setelah bidang Mass Media ditangani oleh Departemen Penerangan, maka radio siaran di daerah diorganisir dan dibina menjadi bagian dari urusan Departemen Penerangan dengan nama "Studio Radio Republik Indonesia (RRI)". Sejak zaman kemerdekaan penguasaan dan pemilikan pemancar radio siaran hanya berada di tangan pemerintah, di mana swasta tidak diberikan ijin untuk radio siaran (*broadcasting*). Sejak itu Radio Republik Indonesia (RRI) menjadi pemegang peranan utama dalam kehadiran di dalam masyarakat. Disebabkan faktor-faktor monopoli inilah RRI tersebut menjadi menonjol dalam masyarakat.

¹⁸⁾ *Ibid.*, hal. 184

Di Banda Aceh Radio siaran non pemerintah mulai berkembang sejak tahun 1970 yang semula berasal dari radio-radio amatir. Di Banda Aceh, radio amatir menjelma menjadi radio siaran non pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 55 / 1971, bahwa radio-radio itu tidak diambil alih oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini disebabkan RRI berlokasi di Banda Aceh, di mana kebutuhan untuk penyaluran informasi dapat memanfaatkan RRI setempat. Akan tetapi mereka mengadakan operasi sendiri-sendiri dengan siaran kata dan lagu baik komersial maupun pengembangan seni budaya dalam rangka menyesuaikan diri dengan PP. NO. 55/1971 tersebut dan surat keputusan Menteri Penerangan No. 39/1972.

Lebih dari 20 buah stasiun radio siaran non pemerintah yang beroperasi di Daerah Istimewa Aceh, setelah disaring sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Aceh sejak tahun 1973 dengan nama "Tim Pembina Siaran Radio Non Pemerintah" sampai pada hari ini hanya tinggal 8 buah yang diberi ijin beroperasi di udara dan 6 buah di antaranya telah mendapat ijin frekwensi dari Menteri Perhubungan, yaitu radio siaran sebagai berikut.

Tabel X
Siaran Radio Non Pemerintah di Kotamadya Banda Aceh

No.	Nama	No. Surat Ijin Ment	Frek.	Cal Sign	Gelombang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Flamboyant	492/RSNP/75	1025/KHS	Pm2CRS	292,68 m	Banda Aceh
2.	Andalas IX	495/RSNP/75	1145/KHS	Pm2CRE	262,00 m	Banda Aceh
3.	MC.5	493/RSNP/75	1045/KHS	Pm2CRC	287,08 m	Banda Aceh
4.	Expo-75	494/RSNP/75	1065/KHS	Pm2CRD	281,69 m	Banda Aceh
5.	Toshiba - 71	496/RSNP/75	1165/KHS	Pm2CRE	257,51 m	Banda Aceh
6.	PT. Radio Cakrawala.	491/RSNP/75	1005/KHS	Pm2CRA	298,50 m	Kuala Simpang.

Radio-radio siaran non pemerintah ini pembinaan tekniknya diberikan oleh unsur-unsur telekom ABRI dan Sipil yang duduk dalam Tim Pembina Radio Siaran Non Pemerintah tersebut, sedangkan pembina di bidang kebijaksanaan siaran dan teknik broodcastingnya diberikan oleh Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi dan Stasiun RRI setempat. Pada tahun 1994 pemilikan radio meluas, hampir setiap keluarga memilikinya yang berguna untuk menerima siaran informasi lewat berita radio baik RRI maupun radio swasta.

2.3.3. Televisi

Selanjutnya Televisi, kita belum bisa berbicara banyak mengenai televisi di Banda Aceh. Sampai tahun 1976 di ibukota propinsi ini belum pernah mengenal alat baru di bidang mass media modern itu, meskipun beberapa orang yang mampu mencoba membuat antena tinggi, namun tidak pernah berhasil. Itu sebabnya program pembangunan mass media yang dilaksanakan pemerintah, terutama pembangunan stasiun - stasiun TV di tiap ibukota propinsi dan juga di Aceh dalam rangka memanfaatkan satelit domestic yang diluncurkan pada tahun 1976/1977 mendapat sambutan hangat dari pemerintah.

Untuk tahun-tahun berikutnya hingga sampai akhir tahun 1994 perkembangan pesawat televisi sangat pesat. Di ibukota propinsi ini telah terdapat pusat pemancar televisi. Peresmian TVRI saluran Banda Aceh memberikan tambahan bagi penerimaan informasi yang lebih lengkap bagi masyarakat sehingga televisi dengan cepat berkembang di masyarakat. Dengan kenyataan ini modernisasi telah berproses pula pada masyarakat kota Banda Aceh dalam menuju pemekaran serta perkembangan Banda Aceh sebagai sebuah kota besar yang sejajar dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

2.3.4. Telepon

Telepon, sebagai sarana komonikasi turut memberi andil dalam pemekaran kota Banda Aceh. Telepon sesungguhnya telah ada sejak zaman Belanda, hanya saja jaringan telepon pada saat itu terbatas pada kantor-kantor pemerintah Belanda dan beberapa *ambtenaar* Belanda. Dalam masa setelah pemulihan kedaulatan keadaannya hampir sama saja atau tidak banyak berubah. Baru setelah Kutaraja menjadi Banda Aceh jaringan telepon mulai mendapatkan tempat di masyarakat sebagai

sarana komunikasi yang sangat praktis. Setelah jaringan telepon dirubah ke dalam jaringan otomatis, maka telepon berkembang dan menjadi salah satu kepentingan utama bagi masyarakat kota. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pemilik pesawat telepon di Kotamadya Banda Aceh yang terus meningkat.

Di samping telepon, sarana komunikasi yang lain adalah jasa Pos dan Giro. Pos dan Giro ini keberadaannya dapat memperlancar hubungan surat menyurat, pengiriman wesel dan pengiriman barang (paket). Sejak dasa warsa terakhir pelayanan pos dan giro terus berkembang. Mengenai data surat menyurat dapat dilihat adanya kesibukan di kantor pos, baik kantor pos pembantu maupun kantor pos besar. Mengenai jumlah kantor pos yang ada di Banda Aceh ada 6 kantor pos pembantu dan 1 kantor pos besar. Perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel XI
Banyaknya Kantor Pos dan Giro dirinci per Kecamatan
Dalam Kotamadya Banda Aceh tahun 1994

No.	Kecamatan	Kantor Pos besar	Kantor Pos Pembantu/tambahan
1	2	3	4
1.	Meuraxa	-	1
2.	Baiturrahman	-	2
3.	Kuta Alam	1	1
4.	Syiah Kuala	-	2

Sumber : Kantor Pos dan Giro Banda Aceh.

2.3.5. Transportasi

Pembangunan sistem transportasi ini secara modern telah dimulai sejak pemerintahan kolonial di Kutaraja. Pada jaman Belanda telah dibangun jalan kereta api yang menghubungkan Kutaraja dengan kota-kota lain di daerah Aceh. Namun dalam perkembangan selanjutnya jaringan jalan kereta api ini mengalami kemacetan dan tidak dilanjutkan

lagi, hanya bekas-bekasnya di Banda Aceh sekarang masih ada.

Pembangunan jalan non kereta api dipandang perlu sehubungan dengan dimasukkannya sistem transportasi modern seperti angkutan mobil. Lebih-lebih setelah jumlah sarana angkutan di Banda Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat. Dengan kenyataan ini kemungkinan untuk perkembangan jalan-jalan baru di masa-masa kemudian akan bertambah panjang sesuai dengan pemekaran kota Banda Aceh yang bukan saja sebagai kota pemerintahan tetapi juga sebagai kota ekonomi.

Jalan yang dibangun dari tahun ketahun semakin panjang, bahkan dengan adanya pemukiman baru, jalan-jalan berkembang sesuai dengan kebutuhan penduduk kota Banda Aceh. Sektor perhubungan di Kotamadya Banda Aceh menjadi semakin ramai karena bukan saja jalan yang dibangun menghubungkan tempat-tempat tertentu seperti Banda Aceh ke kota-kota lain di Daerah Istimewa Aceh, tetapi jauh dari itu jalan-jalan telah menghubungkan pusat kota dengan pemukiman baru. Mengenai panjang jalan kota Banda Aceh berdasarkan data tahun 1994 ada 187,006 km dengan perincian jalan aspal 175,186 km, jalan kerikil 9,990 km dan jalan tanah 1,830 km untuk lebih jelasnya mengenai panjang jalan di Kotamadya Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel XII
Panjang jalan dirinci menurut jenis permukaan di Kotamadya
Banda Aceh tahun 1994

No.	Jenis permukaan	Panjang jalan (km)
1	2	3
1.	Diaspal	175,186
2.	Kerikil	9,990
3.	Tanah	1,830
4.	Tidak diperinci	-
	Jumlah	187,006

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tingkat II Kotamadya Banda Aceh.

Mengenai kondisi jembatan yang membentang di jalan-jalan Kotamadya Banda Aceh berdasarkan data yang dikutip tahun 1994 diantaranya yaitu kondisi jembatan yang baik ada 13 buah jembatan dengan panjang 640,40 meter. Selanjutnya kondisi jembatan yang sedang ada 1 buah dengan panjang 64,00 meter, dan kondisi jembatan yang rusak tidak ada. Jadi secara keseluruhan ada 14 jembatan dan semuanya berfungsi baik sehingga lalu lintas angkutan jalan menjadi lancar. ¹⁹⁾

Sejalan dengan perkembangan permukiman dan perkembangan jalan-jalan ini jumlah alat angkutan bertambah. Alat angkutan di Banda Aceh yang paling dominan adalah mobil barang yang jumlahnya mencapai 1342 unit (data terakhir tahun 1994). Mobil angkutan penumpang yang paling dominan adalah labi-labi menghubungkan dari pusat kota di Pasar Aceh ke daerah-daerah pinggiran kota. Ada juga yang sampai ke kota-kota kecamatan di wilayah kabupaten Aceh Besar.

Mengenai angkutan beca hanya menghubungkan pusat-pusat perbelanjaan ke daerah-daerah pemukiman yang tidak dilalui labi-labi dan biasanya hanya lingkungan yang dekat-dekat saja. Untuk angkutan bis ada beberapa bus kota, tetapi kebanyakan bis ini untuk trayek antar kota dalam propinsi dan antar kota antar propinsi. Mengenai jumlah angkutan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel XIII
Jumlah kendaraan bermotor wajib uji dalam Kotamadya Banda Aceh Tahun 1994

No.	Jenis kendaraan	Jumlah
1	2	3
1.	Beca bermesin	94
2.	Mobil penumpang	984
3.	Mobil Barang	1342
4.	Mobil bus	292
5.	Kereta tempel	1
6.	Kereta gandengan	-
	Jumlah	4683

Sumber : Kantor Wilayah LLAJR Kotamadya Banda Aceh.

¹⁹⁾ Sumber : Sub Dinas Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan pesatnya pertambahan penduduk dan meningkatnya kemakmuran, pemilikan kendaraan bermotorpun bertambah baik kendaraan bermotor roda dua, tiga maupun empat. Dari data statistik tahun 1994 dapat diketahui besarnya jumlah pemilikan kendaraan bermotor tersebut.

Tabel XIV
Banyaknya kendaraan bermotor tahun 1994.

No.	Jenis kendaraan	Jumlah / unit
1	2	3
1.	Kendaraan roda dua	23596
2.	Kendaraan roda tiga	230
3.	Kendaraan roda empat	9815
	Jumlah	33641

Sumber : Dinas LLAJR Tingkat II Kotamadya Banda Aceh.

Mengenai transportasi laut, Banda Aceh juga memiliki Pelabuhan Ulee lheu dan Pelabuhan Malahayati di Krueng Raya yang bisa menghubungkan antara Banda Aceh dengan kota-kota pelabuhan seperti Sabang dan pulau-pulau lainnya dengan menggunakan perahu atau kapal.

Banda Aceh telah memiliki pelabuhan udara di Blang Bintang yang terletak 16 km dari pusat Kota Banda Aceh ke arah selatan. Angka-angka penerbangan baik pesawat-pesawat yang pergi (*check out*) maupun yang datang (*check in*), dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Setiap hari ada penerbangan dari dan ke Banda Aceh yang menghubungkan kota-kota seperti Medan, Singapura dan beberapa kota lainnya. Dengan kenyataan ini dapatlah dimengerti betapa majunya transportasi di kota Banda Aceh, sehingga telah ikut pula memberikan andil dalam perubahan sosial yang terjadi dalam rangka pemekaran kota.

BAB III SEJARAH SINGKAT KOTA BANDA ACEH

3.1. Masa Kesultanan

Sejak kapan Banda Aceh muncul sebagai sebuah kota, belum dapat dipastikan secara tepat. Namun berdasarkan jejak-jejak sejarah dapat diketahui bahwa kota Banda Aceh sekarang, dahulunya adalah bekas tempat kedudukan ibukota Kerajaan Aceh yang bernama Bandar Aceh Darussalam. Menurut catatan Husein Djajadiningrat, kerajaan Aceh berdiri pada tahun 1514 dengan Sultannya yang pertama bernama Ali Mughayat Syah. ¹⁾ Nuruddin ar Raniri dalam karyanya *Bustanus Selatin* juga menyebutkan bahwa Sultan yang pertama memerintah kerajaan Aceh adalah Ali Mughayat Syah. ²⁾

Pada awal pertumbuhan kerajaan Aceh, lokasinya berada di ujung Utara Pulau Sumatera yang sekarang dikenal dengan Aceh Besar atau Aceh Rayeuk, Aceh Lhee Sagoe, Aceh Inti, Aceh Proper. ³⁾ Daerah tersebut merupakan wilayah Kerajaan Aceh yang beribukota di Bandar Aceh Darussalam.⁴⁾ Di ibukota kerajaan ini mengalir Sungai Krueng Aceh yang menghubungkan ibukota dengan pelabuhan pantai Cermen yang jaraknya sekitar 3 km. Pada waktu itu kapal-kapal dengan ukuran 60 - 70 ton dapat berlayar menyusuri Sungai itu menuju ibukota kerajaan. ⁵⁾ Di depan muara Sungai itu ada beberapa pulau, sehingga

¹⁾ Rusdi Sufi, *Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud Proses Adaptasi Sosial : Kehidupan di Perkampungan Miskin Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh : Depdikbud, Dirjenbud, Ditjarahnitra, 1982 / 1983), hal. 15

²⁾ Muhammad Ibrahim (et al.), *Sejarah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta : Depdikbud, Ditjarahnitra, Proyek IDSN 1991), hal 70.

Lihat juga *Nuruddin Ar-raniry, Bustanus Selatin*, disusun oleh T. Iskandar (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966) hal. 22

³⁾ Istilah ini dikemukakan oleh T. Ibrahim Alfian dalam karyanya, *Emas, Kafir dan Mauit*, Nusantara Nomor 2 (Kuala Lumpur : Juli 1972), hal. 270

⁴⁾ Teuku Iskandar, *De Hikajat Atjeh, Venhandelingen Van Het Koninklijk Instituut Voor Taal, Land en Volkenkunde*, (selanjutnya disingkat VKI 26, s-gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958), hal. 28

⁵⁾ Muhammad Ibrahim, *op. cit.*, hal. 71

antara muara Sungai dan pulau-pulau itu membentuk sebuah teluk yang luas yang dapat digunakan berlabuh beratus-ratus kapal.

Sultan lain yang berhasil membina kerajaan Aceh ialah Alaudin Riayat Syah yang memerintah tahun 1553 - 1571. Pada masa pemerintahannya Kerajaan Aceh berhasil melakukan perluasan wilayah ke kota-kota pelabuhan di Pantai Barat Sumatera. Di antara kota-kota pelabuhan yang dikuasainya adalah Barus, Singkil, Pasaman, Tiku, Pariaman dan Padang. Pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Mahmud Syah I, telah dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Baiturrahman. Masjid ini pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda diperbesar lagi, sehingga namanya menjadi Masjid Raya Baiturrahman. Di Masjid Raya Baiturrahman ini juga terdapat Perguruan Tinggi atau Universitas Baiturrahman,⁶⁾ yang memiliki banyak Fakultas serta telah menghasilkan sarjana-sarjana Islam dan ulama-ulama besar yang terkenal terutama dalam mengembangkan dan menyiarkan agama Islam di daerah-daerah lain di nusantara. Perguruan Tinggi ini juga melahirkan banyak ilmuwan dan penyalir-penyilir terkenal seperti Nuruddin Ar-Raniry, Syamsuddin Pase, Hamzah Fansuri, Abdur Rauf Singkel yang kemudian terkenal dengan nama Tgk. Syiah Kuala dan Fatahillah/Maulana Malaik Ibrahim dan lain-lain. Banyak para mahasiswa dari berbagai negara Islam yang belajar di Universitas Baiturrahman ini.

Tumbuh dan berkembangnya kota Bandar Darussalam berkaitan erat dengan keberhasilan Portugis menduduki kota Malaka pada tahun 1511⁷⁾ Sebelum kedatangan bangsa Portugis, Malaka terkenal sebagai pusat perdagangan internasional, sebagai basis segitiga emas yang menghubungkan tiga jurusan. Ketiga jurusan tersebut di antaranya yaitu negeri India, Cina dan negeri - negeri di Asia Tenggara. Kota Malaka

⁶⁾ Anonim, *Buku Objek Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Aceh Cab Sikureng (segel Sultan Aceh)*. (Banda Aceh : Perkumpulan Pecinta Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Aceh / P3SKA, 1996), hal. 1

⁷⁾ Marwati Djoenet Poesponegoro dan Noegroho Notosoesanto, *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta : Balai Pustaka 1992), hal. 103

banyak disinggahi armada dagang dari berbagai negara di kawasan Asia. Di sisi lain yang tak kalah pentingnya, Malaka juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Para pedagang yang sekaligus juga peniar agama Islam ini kebanyakan datang dari Gujarat dan Timur Tengah.

Setelah Malaka direbut oleh bangsa Portugis yang fanatik anti Islam, pedagang Islam Malaka yang berasal dari berbagai daerah banyak yang menyingkir ke tempat-tempat dagang lainnya, terutama sekali banyak yang menyingkir ke Aceh yaitu ke kota Bandar Darussalam. Dengan banyaknya pedagang Islam yang menyingkir ke kota Bandar Darussalam ini, maka Kota Bandar Darussalam menjadi ramai. Kota ini yang tadinya hanyalah kerajaan kecil mulai berkembang dan tumbuh menjadi Kerajaan yang besar. Munculnya Bandar Darussalam sebagai pusat perdagangan dan penyiaran agama Islam yang baru menjadikan Aceh kian makmur dan menjadi pesaing yang berat bagi Malaka yang telah dikuasai Portugis.

Pada abad ke XVII, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang sarjana berkebangsaan Perancis, Denys Lombard, penduduk kota Bandar Darussalam berjumlah sekitar 50.000 jiwa. Kota ini sangat kosmopolitan, karena terdapat berbagai suku bangsa yang umumnya sebagai pedagang seperti Gujarad, Keling, Arab, Jawa, Pegu (Birma) dan Tionghoa.⁸⁾

Selain itu juga banyak pengunjung yang berasal dari Turki, Persi, Belanda, Portugis, Inggris, Perancis, Sulawesi, Kedah dan Kalimantan. Pada umumnya para pedagang ini tinggal di kota secara berkelompok dalam perkampungan-perkampungan yang dinamai sesuai dengan negeri asalnya. Misalnya pedagang yang berasal dari Jawa, tinggal berkelompok dengan sesama orang Jawa. Demikian juga dengan para pedagang lainnya, mereka juga membentuk koloni tersendiri. Hal tersebut berlangsung terus menerus sehingga bekas ibukota kerajaan Aceh dahulu yang sekarang bernama Banda Aceh, masih terdapat nama-nama kampung yang mungkin sebagai bekas tempat pemukiman

⁸⁾ Rusdi Sufi, *op. cit.*, hal. 16

pedagang-pedagang dari berbagai negeri, seperti kampung Jawa, kampung Kedah dan Kampung Keling.

Masalah yang sering dihadapi oleh Bandar Aceh Darussalam pada waktu itu adalah kebakaran, sewa rumah yang mahal dan pengadaan beras.⁹⁾ Kendatipun secara fisik tidak terlalu hebat, bangunan-bangunan yang ada hampir semua terbuat dari kayu dan menurut musafir Eropa lebih seperti kampung besar daripada kota.

Perlu dicatat di sini Bandar Aceh Darussalam pada abad 17 sudah sangat ramai dan rakyatnya hidup makmur. Menurut laporan perjalanan Augustin de Beaulieu ke Aceh dikatakan bahwa, untuk keperluan pertahanan, Sultan telah memelihara 900 ekor gajah dan 200 orang pasukan berkuda yang bertugas melakukan patroli di lingkungan kota setiap malam. Di dalam istana Bandar Darussalam terdapat 300 orang pekerja pandai emas.¹⁰⁾

Pada masa Sultan Iskandar Muda, di kota Bandar Darussalam ini juga dibangun sebuah Taman Sari Gunongan Aceh. Gunongan ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda untuk memenuhi permintaan permaisurinya yang menggemari dan senang dengan gunung-gunung seperti yang biasa ia saksikan di daerah asalnya Pahang, salah satu negara bagian di Malaka. Dahulu Gunongan ini terletak di tengah-tengah sebuah Taman yang sangat indah. Luas taman tersebut kira-kira 1000 depa, di dalamnya terdapat tanaman bunga-bunga dan buah-buahan beraneka rupa serta sebuah kolam ikan. Taman tersebut dinamakan Taman Gairah. Di sekitar taman tersebut mengalir sebuah Sungai yang dikenal dengan nama Sungai Daroy.

Di sekitar taman ini juga terdapat sebuah bangunan yang bernama

⁹⁾ *Ibid.*

Lihat juga Denys Lombard, (terj.) Winarsih Arifin, *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607 - 1638)*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hal. 58, lihat juga Lance Castles dan Elizabeth C. Morris, *Pola Perkembangan Kota di Aceh*, dalam Seminar Wilayah Pembangunan III Daerah Istimewa Aceh, (Banda Aceh : 1976), hal. 99 - 102.

¹⁰⁾ *Laporan Perjalanan Augustin de Beaulieu ke Aceh*, dalam Muhammad Ibrahim (et al.), *Sejarah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta : Depdikbud 1991), hal. 76

Pintho Khop yaitu pintu keluar dari Istana menuju taman dengan melewati Krueng Daroy.¹¹⁾ Di sekitar Pintho Khop ini sekarang telah dibangun taman Putroe Phang yang dijadikan taman kota selain tamansari dan lain-lain.

Pada masa Pemerintahan Ratu Syafiatuddin di dekat Gunungan didirikan sebuah bangunan yang bernama Kandang Gunungan. Kandang ini dipakai sebagai tempat makam suaminya yang bernama Sultan Iskandar Thani, yang pernah menjadi Sultan sejak tahun 1637 - 1641. Setelah meninggal Sultan Iskandar Thani kedudukannya digantikan oleh permaisurinya bernama Ratu Syafiatuddin. Waktu dibangun Kandang Gunungan ini sangat indah berukir-ukir dan banyak bagiannya dilapisi dengan emas yang dirancang oleh tenaga ahli.¹²⁾ Taman Sari Gunungan Aceh tersebut sampai sekarang masih terdapat di Banda Aceh, tepatnya di tepi Krueng Daroy, Kampung Kleng, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman.

Pada masa kebesaran Kerajaan Aceh Bandar Darussalam mempunyai angkatan perang yang tangguh. Kekuatan yang terpenting berupa kapal-kapal Galley yang dimiliki oleh armada lautnya dan pasukan gajah yang dimiliki oleh pasukan daratnya. Jumlah kapal yang dimiliki oleh armada laut pada waktu itu ada 600 kapal dan 100 kapal Galley yang ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan besar seperti di Pelabuhan dekat Kota Bandar Darussalam sendiri, Daya dan Pedir. Seratus kapal yang tersebut terakhir adalah kapal-kapal yang berukuran besar yang dapat mengangkut 600 hingga 800 orang penumpang. Augustin de Beaulieu yang telah menyaksikan sendiri kapal-kapal Galley itu, menyatakan bahwa kapal-kapal itu besarnya 3 kali lebih besar daripada kapal-kapal yang dibangun di Eropah pada masa itu.¹³⁾ Selain besar kapal-kapal Galley itu juga mempunyai tempat menembak di haluan depan yang dilapisi dengan kepingan-kepingan

¹¹⁾ H. M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara I*, (Medan : Pustaka Iskandar Muda, cetakan pertama 1961), hal. 44 - 66. lihat juga buku *Objek Peninggalan Sejarah dan Kebudayaan Aceh Cap Sikureng (Segel Sultan Aceh)*, (Banda Aceh : P3SKA, 1996), hal. 9 - 10

¹²⁾ Muhammad Ibrahim, *op. cit.*, hal. 78

¹³⁾ *Ibid.*

emas murni. ¹⁴⁾ Salah satu di antaranya diberi nama Tjakra Donya. ¹⁵⁾

Gajah-gajah milik Kerajaan Aceh Darussalam merupakan kekuatan inti pasukan daratnya yang berjumlah 900 ekor. Binatang ini telah dilatih sedemikian rupa sehingga tidak takut pada api dan suara-suara tembakan. ¹⁶⁾ Mengenai persenjataannya Kerajaan Aceh Darussalam pada waktu itu mempunyai 2000 pucuk meriam, yang terdiri dari 800 meriam besar dan 1200 meriam biasa. Satu hal yang sangat menguntungkan angkatan perang Aceh pada waktu itu adalah didapatnya banyak belewang di Pulau Weh yang terletak beberapa km sebelah utara Pantai Aceh dan di sebuah gunung dekat Pedir. Dengan adanya belewang ini memudahkan tentara Aceh untuk membuat bahan-bahan peledak dan mesiu-mesiu bagi meriam-meriamnya. ¹⁷⁾ Selain itu juga diketemukan sumber - sumber minyak di dekat Deli, yang minyaknya juga dapat digunakan tentara Aceh untuk membakar kapal-kapal musuh. ¹⁸⁾

Bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan kerajaan Aceh adalah Gampong (Kampung) yang dikepalai oleh seorang Keuchik dan Wali (Wakil) dari Keuchik. Sebuah Gampong terdiri dari beberapa kelompok rumah yang mempunyai tempat ibadah sendiri yang disebut Meunasah. Dalam memerintah Gampong, Keuchik yang dibantu pula oleh pejabat keagamaan yang disebut Teungku Meunasah dan para orang tua kampung yang disebut Ureung Tuha.

Gampong-gampong letaknya berdekatan dan penduduknya melakukan ibadah bersama pada setiap hari Jum'at di sebuah masjid, merupakan suatu kekuasaan wilayah yang diberi nama Mukim. ¹⁹⁾ *Imeum* adalah pemimpin sembahyang pada setiap hari Jum'at yang diikuti sekurang-kurangnya oleh 40 orang laki-laki dewasa. Pada

¹⁴⁾ Denys Lombard, *op. cit.*, hal 202

¹⁵⁾ Mengenai asal nama Cakra Donya, lihat G. L. Tichelman, "*Cakra Donya*" *The Indische Gids* 61. (Amsterdam : N. V. Drukkerij), 1939, hal. 23 - 27

¹⁶⁾ Muhammad Ibrahim, *op. cit.*, hal. 75

¹⁷⁾ *Ibid.*, hal. 141

¹⁸⁾ *Ibid.*

¹⁹⁾ *Ibid.*

mulanya tiap-tiap Mukim, ditetapkan harus berpenduduk 1000 orang laki-laki yang dapat memegang senjata.²⁰⁾ Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan politis, sehingga mukim ini selain bersifat teokratis juga politis. Dalam perkembangannya, fungsi dari imeum mukim berubah menjadi kepala pemerintahan di sebuah mukim yang mengkoordinir kepala-kepala gampong atau keuchik-keuchik. Dengan berubahnya fungsi imeum mukim, berubah pula nama panggilannya yaitu kepala mukim. Untuk pengganti sebagai imeum sembahyang pada setiap hari Jum'at disebuah masjid, diserahkan kepada orang lain yang disebut imeum masjid.

Bentuk wilayah kekuasaan yang lebih besar dari mukim disebut *nanggroe* (Negeri). Di Aceh Inti (Aceh Proper), *nanggroe* adalah gabungan dari beberapa buah mukim yang dikepalai oleh seorang Uleebalang.²¹⁾ Di luar daerah Aceh Inti, yaitu daerah-daerah yang termasuk dalam kekuasaan Kerajaan Aceh, statusnya juga disamakan dengan *Nanggroe* seperti di Aceh Inti.²²⁾ Para Uleebalang menerima kekuasaan langsung dari Sultan Aceh. Di daerah kekuasaannya mereka memerintah secara turun-temurun, namun sewaktu akan memegang jabatan sebagai pimpinan di daerahnya, maka mereka harus disahkan pengangkatannya oleh Sultan Aceh.²³⁾ Di dalam surat pengangkatan itu harus dibubuhi cap stempel kerajaan Aceh, yang disebut cap Sikureung (cap sembilan) atau juga disebut cap halilintar.²⁴⁾

²⁰⁾ *Ibid.*

²¹⁾ Uleebalang berarti selain sebagai pimpinan ketentaraan, juga sebagai pimpinan dalam suatu daerah yang ditunjuk oleh Sultan Aceh. Menurut C. Snouck Hurgronje, asal mula uleebalang adalah ketika salah seorang Sultan Aceh memberikan gelar tersebut kepada seseorang penguasa di suatu tempat, karena ingin membalas jasa atas pengabdianya kepada Sultan Aceh. Kepada penguasa itu diberi kepercayaan sebagai pimpinan ketentaraan di daerahnya, tapi kemudian berusaha memonopoli kekuasaan di daerahnya itu. Lihat C. Snouck Hurgronje *Di Mata Kolonialis*, (Jakarta : Yayasan Soko Guru, 1985), hal. 4

²²⁾ Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh Dalam Tahun 1550 sampai 1675*, (Medan : Monora, 1972), hal. 89

²³⁾ Mengenai contoh surat pengangkatan yang dibuat oleh Sultan Aceh, lihat G. L. Tichelman, *Een Atjehsche Sarakata, Afschrift Van Een Besluit Van Sultan Iskandar Muda*, TBG. 73 (1933), hal. 368 - 373

²⁴⁾ Mengenai asal usul cap stempel kerajaan Aceh, lihat G. P. Rauf Feer, *DE Hindustance Oorsprong Van Het Negenvanding Sultan Zegel Van Atjeh*, (BKI, 1906), hal. 349 - 384

Tugas Uleebalang adalah memimpin nanggroenya dan mengkoordinasi tenaga-tenaga tempur dari daerah kekuasaannya bila ada peperangan ²⁵⁾. Selain itu juga menjalankan instruksi-instruksi dari Sultan, menyediakan tentara dan perbekalan perang bila dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan membayar upeti kepada Sultan Aceh. Meskipun demikian mereka masih merupakan pimpinan yang sangat berkuasa di daerahnya. ²⁶⁾ Mereka masih tetap sebagai pemimpin yang merdeka di daerahnya dan bebas melakukan apa saja terhadap rakyatnya. Misalnya dalam hal pengadilan dan menjatuhkan hukuman. ²⁷⁾

Ketika Kerajaan Aceh berada di bawah kekuasaan Sultan Nurul Alam Nakiatuddin Syah (1675 - 1678), Aceh Inti dibagi menjadi Lhee Sagoe (tiga sagi). Tiap Sagi terdiri dari sejumlah mukim. Berdasarkan jumlah mukim-mukim yang disatukan, maka ketiga sagi ini adalah Sagi XXII Mukim, Sagi XXV Mukim dan Sagi XXVI Mukim. Pimpinan sagi ini juga disebut Uleebalang. ²⁸⁾

Tingkat tertinggi dalam struktur pemerintahan Kerajaan Aceh adalah pemerintah pusat, yang berkedudukan di ibukota Kerajaan yaitu di kota Bandar Darussalam. Kepala pemerintahan pusat adalah Sultan. Dalam mengendalikan pemerintahan, Sultan dibantu oleh beberapa pembantu yang membawahi bidang masing-masing. Ketika kedatangan pedagang-pedagang Belanda dan Inggris pertama ke Aceh, Sultan dalam memerintah kerajaan dibantu oleh lima orang, yaitu satu orang bendahara dan empat orang syahbandar. ²⁹⁾

Dalam perjalanan sejarahnya kota Bandar Darussalam, selain sebagai ibukota kerajaan Aceh dan berperan sebagai pusat kedudukan pemerintahan, juga pernah berperan sebagai salah satu pusat

²⁵⁾ Muhammad Ibrahim, *op. cit.*, hal. 76

²⁶⁾ *Ibid.*

²⁷⁾ A. Mukti Ali, *An Introduction To The Government Of Ache's Sultanate*, (Yogyakarta : Nida, 1970), hal. 16

²⁸⁾ Mengenai fungsi dan latar belakang pembentukan sagi, lihat ; Muhammad Said, *Atjeh Sepanjang Abad jilid I*, (Medan : Penerbitan Sendiri, 1961), hal. 209-211

²⁹⁾ Muhammad Ibrahim, *op. cit.*, hal. 77

perdagangan Tamaddun di kawasan Asia Tenggara. Hal ini terjadi pada masa jaya-jayanya kerajaan Aceh, yaitu pada abad ke 16 dan abad 17.

Keadaan ini tidaklah berlangsung lama. Pada abad 18 kerajaan Aceh secara berangsur-angsur mengalami kemunduran. Selanjutnya menginjak abad 19 Kerajaan Aceh telah merosot sama sekali, kendatipun secara juridis formal masih diakui sebagai kerajaan yang berdaulat penuh. Sejalan dengan kemerosotan Kerajaan Aceh, peranan kota Bandar Darussalam sebagai kota perdaganganpun mengalami kemunduran. Hal ini dapat terjadi karena daerah-daerah kekuasaan Aceh, satu persatu lepas dan dikuasai oleh negara lain. Melihat kenyataan ini, Belanda mulai mengincar Aceh, mencari kesempatan yang baik untuk menguasainya. Disamping mengacaukan dan merebut daerah-daerah taklukan Aceh, Belanda juga berusaha mendekati Inggris untuk membenarkan tindakannya di Sumatera.

3.2. Masa Kolonial Belanda.

Peristiwa penting yang terjadi setelah Muhammad Daud Syah naik tahta adalah ditandatanganinya Traktat London pada tanggal 17 Maret 1824. Isi perjanjian menyebutkan tentang pembagian wilayah jajahan Inggris dan Belanda di Indonesia dan semenanjung Malaya.

Untuk memperlicin jalan menguasai Aceh, pada tahun 1871 Belanda membuat perjanjian lagi dengan Inggris yang dikenal dengan nama **Traktat Sumatera**. Isi dari Traktat Sumatera ini menyebutkan bahwa Belanda bebas bergerak dan mengadakan perluasan wilayah di Aceh.

Setelah persiapan tersebut dirasa cukup, maka pada tanggal 5 April 1873, Belanda dengan kekuatan 3.000 orang tentara menyerang Aceh.³⁰⁾ Belanda berhasil menduduki Masjid Baiturrahman, namun dapat direbut kembali oleh tentara Aceh setelah Panglima tentara Belanda JHR Kohler ditembak mati oleh pejuang Aceh pada tanggal 14 April

³⁰⁾ Jumlah pasukan tersebut tidak termasuk angkatan laut dan lain-lain, perincian secara mendetail, lihat : Muhammad Said, *op. cit.*, hal. 401 - 402

1873. Akhirnya penyerbuan tidak diteruskan, malahan ekspedisi ditarik kembali.

Pada bulan Nopember 1873 dikirimlah ekspedisi kedua dipimpin oleh Van Swieten dengan tentara sebanyak 13.000 orang. Serbuan kali ini berhasil menduduki Masjid Raya Baiturrahman. Dalam perkembangan selanjutnya Kerajaan Aceh berhasil diduduki Belanda, namun demikian perang tak pernah berakhir, karena rakyat Aceh terus melakukan perlawanan. Perang Kolonial ini oleh pihak Belanda diperkenalkan dengan nama Perang Aceh, sedangkan rakyat Aceh lebih mengenalnya dengan nama Perang Belanda yang dalam istilah perjuangan rakyat Aceh disebut *Perang Kaphee Ulanda*.³¹⁾ Dalam perang kolonial ini rakyat Aceh berjuang dengan gigih. Para pemimpin perjuangan banyak yang tak mengenal kata menyerah, patah tumbuh hilang berganti. Peperangan di Aceh ini berlarut-larut hingga berlangsung sekitar 40 tahun lamanya.³²⁾ Kerajaan Aceh Darussalam dinyatakan berakhir setelah Sultan Aceh terakhir yang bernama Sultan Muhammad Daudsyah dan Panglima Polem beserta pengikutnya menyerah pada Belanda pada bulan Januari 1903.

Selama kesultanan Aceh berkuasa, Ibukota Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota perdagangan, tetapi setelah pemerintah kolonial Belanda menduduki ibukota kerajaan pada tahun 1874, peranan kota tersebut telah berubah. Dan namanya diganti menjadi Kutaraja.³³⁾ Untuk membangun pertahanan, pemerintah kolonial Belanda kemudian merubah kedudukan kota niaga menjadi kota garnizun, yang merupakan tipe kota baru. Berpuluh tahun Kutaraja menjadi pusat kegiatan militer Belanda. Pada beberapa bagian kota dibangun tangsi-tangsi pemukiman Belanda. Untuk memperlancar arus transportasi, Belanda membangun

³¹⁾ Uraian secara menyeluruh, ringkas dan memadai (dalam bahasa Indonesia) mengenai perang Belanda di Aceh, lihat ; Teuku Ibrahim Alfian, *Sejarah Singkat Perang di Aceh*, dalam Buku Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme*. (Jakarta : Departemen Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, 1973)

³²⁾ Rusdi Sufi, *Banda Aceh Pada Masa Pendudukan Belanda*, (naskah belum diterbitkan), hal. 2

³³⁾ *Ibid.*, hal. 3

jalan kereta api yang menghubungkan Kutaraja dengan kota-kota lain di daerah Aceh. Di Kotamadya Banda Aceh, warisan ini hingga sekarang secara fisik masih bisa kita saksikan.

Di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda, Kutaraja dijadikan sebagai tempat kedudukan Gubernur Militer dari tahun 1874 - 1918 dan Gubernur Sipil tahun 1918 - 1936. Gubernur ini membawahi Aceh dan daerah-daerah takluknya yang dalam istilah Belanda disebut *Atjeh en onder hoorigherden*. Wilayahnya meliputi seluruh Propinsi Daerah Istimewa Aceh sekarang. Sejak tahun 1936 Pemerintah Belanda merubah status Aceh dari Gubernemen menjadi Keresidenan dan juga berkedudukan di Kutaraja.³⁴⁾ Status Keresidenan ini berlangsung hingga saatnya Belanda menyerah kalah kepada Bala Tentara Jepang tahun 1942.

Untuk kelancaran administrasi pemerintahan di daerah Aceh, pemerintah kolonial Belanda membangun sebuah gedung dalam kompleks bekas Keraton Aceh. Pembangunan gedung ini diprakarsai oleh Letnan Jendral Karel Van der Heijden yang pada waktu itu menjabat sebagai komandan Militer dan Sipil Belanda di Aceh (Juni 1877 - 1881). Gedung yang dibangun di Kutaraja ini sangat megah dan merupakan satu-satunya gedung yang paling anggun di Aceh pada waktu itu. Gedung ini digunakan pertama kali oleh Letnan Jendral Van der Heijden pada tahun 1880. Bangunan ini hingga sekarang masih bisa dilihat di Kota Banda Aceh yang populer dengan nama Pendopo Gubernur Aceh.³⁵⁾

Pada tahun 1881 Pemerintah Kolonial Belanda membangun Masjid Baiturrahman yang dulu pernah dibakar dalam perang Aceh tahun 1873. Masjid ini semula berdiri megah sejak ratusan tahun silam hingga

³⁴⁾ Kuta dalam bahasa Aceh berarti benteng ; jadi Kutaraja berarti benteng raja. Lihat pula : Castles dan Elizabeth C. Morris, *Pola Perkembangan Kota di Aceh*, dalam Seminar Wilayah Pembangunan III Daerah Istimewa Aceh, (Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala dan Pemda Daerah Istimewa Aceh, 1976), hal. 103 - 105

³⁵⁾ Uraian tentang asal mula bangunan ini lihat ; T. A. Talsya, *Pendopo Gubernur Aceh Bangunan Tua Abad XIX*, (Medan : Harian Waspada, Rabu 29 Januari 1986)

saatnya mendapat serangan Belanda tahun 1873. Berhubung Masjid ini dijadikan pusat pertahanan dan markas pejuang-pejuang Aceh dalam melakukan serangan balasan, maka oleh tentara Belanda Masjid Raya ini dibakar, apalagi setelah Jendral Belanda JHR Kohler mati ditembak oleh pejuang Aceh di depan Masjid Raya tersebut.

Untuk menarik hati para pejuang Aceh, supaya tidak lagi melakukan perlawanan, maka pada tanggal 24 Safar 1299 H atau 27 Desember 1881, Belanda membangun kembali Masjid Raya Baiturrahman.³⁶⁾ Peletakan batu pertama masjid ini dilakukan oleh Letnan Jendral Karel Van der Heijden dan di pihak yang mewakili rakyat Aceh yaitu Teungku Kadhi Malikul Adil.

Keinginan untuk membangun kembali Masjid Raya Baiturrahman ini sebenarnya sudah dirintis oleh Jendral Van Swieten, yang memimpin peperangan tahap kedua terhadap Aceh. Sebelum kembali ke Batavia, Van Swieten memaklumkan bahwa Pemerintah Belanda menghormati sepenuhnya kemerdekaan beragama orang-orang Aceh dan hendak membangun kembali masjid yang telah dibakar oleh tentara Belanda. Penanggung jawab pembangunan masjid ini diserahkan kepada seorang arsitek Belanda yang bernama Bruins dari *Departement Van Burgelijke Openbare Werken* (Departemen Pekerjaan Umum) di Batavia. Untuk pengawasannya dilakukan oleh insinyur L. P. Luyke dan dibantu oleh beberapa insinyur lainnya. Untuk urusan keagamaan diminta bantu kepada Penghulu Besar Garut agar polanya tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama Islam. Pelaksana pembangunan Masjid ini dilakukan oleh seorang pemborong keturunan Cina, bernama Lie A. Sie, seorang Letnan Cina yang berkedudukan di Kutaraja. Seluruh bahan bangunan didatangkan dari luar negeri. Sebagian materialnya didatangkan dari Penang. Batu marmer dari negeri Belanda, batu pualam untuk tangga dan lantai didatangkan dari negeri Cina, besi jendela dari negeri Belgia, kayu dari Birma dan tiang-tiang besi dari Surabaya.

Masjid Raya Baiturrahman ini selesai dibangun pada tahun 1882,

³⁶⁾ Rusdi Sufi (et al.), *Tingkat Kesadaran Sejarah Siswa SMTA dan Masyarakat Di Kota Banda Aceh*, (Jakarta : Depdikbud, Ditjarahnitra, Proyek IDSN, 1986) hal 5

dan memiliki sebuah kubah. Pada tahun 1936 oleh Gubernur Van Aken masjid ini dipugar lagi dan diperbesar sehingga memiliki tiga buah kubah. Pada masa kemerdekaan dalam tahun 1958, ketika Aceh di bawah pimpinan Gubernur Ali Hasymi masjid ini diperbesar lagi menjadi lima kubah dan ditambah dua menara di sampingnya.

Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam meningkatkan kecerdasan rakyat, pemerintah Belanda mulai membangun sekolah-sekolah, baik sekolah - sekolah kejuruan maupun sekolah-umum. Untuk keperluan itu di Kutaraja kemudian didirikan tiga buah sekolah Belanda yang diberi nama *Ver Volgschool Met Nederlandsche* yaitu sekolah sambungan yang menggunakan bahasa Belanda. Kemudian dibangun sebuah Sekolah Dasar untuk anak-anak puteri yang ditambah pelajaran jahit-menjahit. Sekolah Puteri ini diberi nama *Meisjeskap School*. Sebuah Sekolah *Holandsche Inlansche School* (HIS) yaitu sekolah sambungan yang mempunyai tujuh kelas dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sebuah Sekolah *Europesche Lagere School* (ELS) ialah sekolah-sekolah untuk anak-anak orang Belanda dan beberapa anak Bangsawan. Juga dibangun sekolah untuk orang-orang Cina yang bernama *Holandsche Chinese School* (HCS) dan orang-orang Ambon yang bernama *Holandsche Ambonsch School* (HAS) berdiri tahun 1917. Di samping itu juga mendirikan sekolah lanjutan yang bernama MULO berdiri tahun 1922.³⁷⁾

Dalam rangka penataan kota Banda Aceh (Kutaraja) Pemerintah Belanda membangun dan membuka sebuah kompleks pemakaman serdadu-serdadu Belanda yang tewas di Aceh dan kemudian juga untuk keluarganya yang meninggal di Kutaraja. Kuburan Belanda ini disebut *Kerkhoff*.³⁸⁾ Kompleks pemakaman ini secara resmi mulai digunakan untuk pemakaman serdadu-serdadu Belanda pada tahun 1880, hingga akhir masa pendudukan Belanda di Aceh. Ada 2200 orang serdadu

³⁷⁾ *Monografi Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta : Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Depdikbud, 1976), hal. 160

³⁸⁾ Rusdi Sufi, *op. cit.*, Lihat juga ; Tjoetje, *Perkoeboeran Belanda Peutjoet Membuka Tabir Sedjarah Kepahlawanan Rakyat Atjeh*, 1972, hal. 4

Belanda yang dimakamkan di sini. Kuburan ini hingga sekarang masih dapat dilihat di kota Banda Aceh.

Tahun 1900 di dekat Masjid Raya Baiturrahman Pemerintah Belanda membangun sebuah Kantor Percetakan yang bernama **Da Atjehdrukkerij**. Bangunan ini sekarang dijadikan Metro Market yang terletak di depan terminal Pasar Aceh.

Pada tahun 1916, Pemerintah Belanda membangun gedung **Da Javasche Bank**. Gedung ini pada zaman sekarang digunakan untuk kepentingan Bank Indonesia. Pada saat itu gedung **Da Javasche Bank** merupakan gedung terindah di kota Banda Aceh. Gedung lain yang dibangun Pemerintah Belanda yaitu Kantor **Der Nederlandsche Handelmaatschappij**. Gedung ini kemudian digunakan untuk Kantor Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Di depan sebelah selatan Masjid Raya Baiturrahman dibangun sebuah hotel yang bernama **Atjeh Hotel**.

Ketika diadakan pameran di kota Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1914, Pemerintah Belanda membangun **Rumoh Atjeh** (Rumah Aceh), untuk tempat pameran barang-barang yang berasal dari Aceh. Setelah selesai pameran, bangunan ini dibongkar dan dibawa kembali ke Kutaraja, selanjutnya dibangun sesuai dengan bentuknya semula dan dijadikan sebagai Musium Aceh yang ditempatkan di samping lapangan eksplanade Kutaraja. Selain itu Belanda juga membangun Musium Militer yang disebut **Het Legermuseum**.³⁹⁾

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Kutaraja merupakan tempat Gubernur Militer / Sipil Belanda yang membawahi Aceh dan daerah-daerah takluknya, namun demikian Kutaraja tidak mencapai status sebagai Kotapraja atau Gemente. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk kota tidak memenuhi syarat sebagai sebuah gemente. Corak dan pertumbuhan kota itu masih sangat ditentukan oleh kepentingan dan kebudayaan asing. Orang-orang Aceh sendiri yang

³⁹⁾ *Ibid.*, hal. 17

berdomisili di Kutaraja sangat minim jumlahnya. Hal ini karena keengganan mereka tinggal bersama-sama orang Belanda dan suku-suku lain yang dianggapnya pro Belanda.

Menurut sensus penduduk tahun 1930, di Kutaraja sedikit sekali didiami oleh suku Aceh, yaitu hanya 746 jiwa. Sebagian besar penduduk pribumi (inlander menurut istilah Belanda) yang tinggal di Kutaraja terdiri dari Suku Jawa sebanyak 1937 jiwa, orang Melayu 676 jiwa dan Minangkabau 482 jiwa. Sedangkan seluruh penduduk Kutaraja termasuk orang-orang Eropa, Cina dan Timur Asing lainnya ada 10.726 jiwa. ⁴⁰⁾

3.3. Masa Pendudukan Jepang

Dalam masa pendudukan Jepang, Banda Aceh dijadikan sebagai kota garnizon. Sebelum berakhirnya pendudukan Belanda di Aceh dan menjelang datangnya bala tentara Jepang, pada bulan Desember 1941 di Kutaradja telah berlangsung suatu musyawarah kecil, tetapi telah menghasilkan suatu keputusan penting. Musyawarah itu antara lain dihadiri oleh Teuku Nyak Arif, Teuku Panglima Polem Muhammad Ali, Teuku Ahmad (Uleebalang Jeunieb), Tengku Daud Beureueh, dan Abdul Wahab Seulimum. Dari musyawarah ini tercetus suatu pernyataan sumpah setia mereka terhadap agama Islam, bangsa dan tanah air serta menyusun pemberontakan bersama melawan penjajahan Belanda dan bekerja sama dengan pemerintahan Jepang. ⁴¹⁾

Keputusan ini diambil karena kemarahan rakyat terhadap Belanda dan permintaan Teuku Nyak Arif pada Residen Pauw untuk menyerahkan pemerintahan kepadanya dengan menjamin keselamatan orang-orang Belanda pun ditolak oleh Residen Pauw. Selain itu propaganda yang dilakukan pemerintah Jepang dengan apa yang disebut cita-cita "Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" semakin gencar

⁴⁰⁾ *Ibid.*, hal. 26

⁴¹⁾ Zakaria Ahmad, dkk, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta : Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1982), hal. 96

dilakukan. Radio Tokyo selalu menutup siarannya dengan lagu Indonesia Raya.

Sebelum Jepang melakukan pendaratan di Indonesia, dari udara disebarakan bendera Jepang dan Indonesia yaitu Hino Maru dan Merah Putih yang disertai dengan tulisan "satu warna satu bangsa". Kesemuanya ini dilakukan untuk mengambil simpati rakyat Indonesia.

Propaganda Jepang tersebut memang menarik sebagian para pemimpin rakyat Aceh terutama dari kalangan ulama PUSA, sehingga sebelum Jepang menaklukkan Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 dengan tanpa syarat, mereka secara rahasia tanpa diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda telah menjalin hubungan dengan Jepang yang berada di Malaysia. Keadaan ini sebenarnya menimbulkan kontraversial di dalam pemerintahan, mengingat ada sebahagian masyarakat yang masih menginginkan pemerintahan tetap dipegang oleh Belanda yaitu kaum feodal. Sebagian lagi para pemimpin rakyat Aceh yang melakukan kerja sama dengan Jepang sebagai siasat untuk mengusir pemerintahan Hindia Belanda dari tanah Aceh. Termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah Teuku Nyak Arif.

Tanggal 24 Pebruari 1942 terjadi pemberontakan pertama terhadap pemerintah Belanda di bawah pimpinan Teuku Muhammad Ali Panglima Polem di Seulimum. Pemberontakan yang menewaskan Controler Tigerman ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang telah mereka putuskan pada bulan Desember 1941 di Banda Aceh. Berita pemberontakan ini tersiar ke seluruh Aceh, maka terjadilah pemberontakan di beberapa tempat yang membuat pemerintah Belanda menjadi panik.

Tanggal 12 Maret 1942 Jepang resmi mendarat di Aceh, yaitu di Krueng Raya Aceh Besar, Sabang dan Peureulak Aceh Timur. Pendaratan Jepang ini berjalan lancar tanpa rintangan baik dari pemerintah Belanda maupun rakyat Aceh. Sebaliknya kedatangan Jepang ini disambut baik oleh rakyat Aceh. Jepang yang mendarat di Krueng Raya langsung menuju Kutaradja dan bermarkas di sana. Tindakan yang dilakukan pertama-tama adalah bersama rakyat membentuk barisan Fujiwara. Barisan Fujiwara ini kemudian melakukan

penekanan dan penyerangan terhadap Belanda.

Dalam kontak senjata yang dilakukan Belanda mengalami kekalahan dan lari meninggalkan tanah Aceh menuju Pantai Barat melalui Meulaboh. Tapaktuan dan terus ke Tanah Karo. Ada yang melalui pegunungan Tangse, Geumpang dan terus ke Takengon kemudian juga ke tanah Karo / Blang Kejeren. Akibat dikejar dan terus-menerus mendapat tekanan dari rakyat dan tentara Jepang akhirnya Kolonel Gesenson terpaksa menyerah pada tanggal 28 Maret 1942 di Blang Kejeren, dengan demikian berakhirilah kekuasaan Belanda secara resmi di daerah Aceh. ⁴²⁾

Tanggal 21 April 1942 Pemerintah Persiapan di Aceh diresmikan dengan pusat pemerintahannya di Kutaraja. Tugas pertama Pemerintah Persiapan pada saat itu hanya terbatas pada beberapa hal saja seperti menjaga keamanan, pengadaan listrik dan air minum serta memfungsikan kembali fasilitas komunikasi.

Untuk mendukung pelaksanaan operasional pemerintahan dengan aparaturanya yang sangat terbatas tentu akan menyulitkan. Oleh karena itu Jepang memerlukan adanya kerja sama dengan para pemimpin rakyat Aceh terutama dengan mereka yang berada di Kutaraja. Kerjasama ini dapat berlangsung karena para pemimpin di Kutaraja pada saat itu percaya akan janji Jepang, bahwa mereka datang ke Indonesia bukan untuk menjajah.

Kepala pemerintahan sipil Syo Tyokang Tuan Ino mengangkat Teuku Nyak Arif sebagai *Guntjo* di Kutaraja dan Teuku Muhammad Ali Panglima Polim sebagai *Guntjo* di Seulimum serta seluruh Uleebalang kemudian diangkat menjadi *Suntjo*.

Di dalam menjalankan pemerintahan, Jepang tidak melakukan perubahan struktur pemerintahan yang bersifat fundamental, karena tetap menggunakan struktur pemerintahan yang telah dijalankan pada masa pendudukan Belanda. Perubahan yang dilakukan adalah seluruh nama dan istilah ditransformasikan ke dalam istilah Jepang seperti ;

⁴²⁾ *Ibid.*, hal. 99

afdeling diganti dalam bahasa Jepang menjadi *bunshu*, *onderafdeling* menjadi *gun*, *Son* pengganti *Ulee Balangsckaaf*, *ku* untuk kemukiman dan kumi sebagai pengalih kata *Gampoong*.⁴³⁾

Selama hampir tiga setengah tahun Jepang berkuasa di Aceh khususnya di Kutaraja hampir tidak terjadi perubahan yang menggembirakan, bahkan yang terjadi sebaliknya. Begitu Jepang telah dapat menjalin kerjasama dalam menjalankan pemerintahannya dengan merekrut semua elite politik ke dalamnya, maka Jepang mulai melakukan manuver-manuver yang hanya membawa keberuntungan bagi kepentingan Jepang belaka dan sangat merugikan rakyat. Di awal pemerintahannya tindakan yang dilakukan Jepang adalah menekan organisasi-organisasi dan partai - partai politik yang ada di Kutaraja yang mulai tampak sedang berkembang. Tindakan ini menurut anggapan mereka untuk menjaga stabilitas sebagai dalih suasana masih dalam keadaan perang. Akibat dari perlakuan tersebut organisasi - organisasi dan partai - partai politik yang sudah ada seperti Taman Siswa, PUSA, Parindra dan Muhammadiyah menjadi lumpuh dan mengalami pasang surut.⁴⁴⁾

Akibatnya jika sebelumnya para elite politik menaruh simpati kepada Jepang kini mulai mengalami erosi yang mengakibatkan hubungan para elite politik dengan pemimpin pemerintahan menjadi dingin dan mengalami kerenggangan.⁴⁵⁾ Sebagai perwujudan dari rasa tidak senang terhadap Jepang, Teuku Nyak Arif suatu ketika pernah berucap "Kita usir anjing, kita datangkan babi" maksudnya Jepang lebih jahat dari Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang rakyat sangat menderita terutama dalam bidang ekonomi, rakyat sangat sulit memperoleh bahan-bahan keperluan sehari-hari seperti kain, minyak tanah dan lain-lain. Bahan-bahan yang didatangkan oleh Jepang pada masa itu umumnya

⁴³⁾ *Ibid.*, hal. 100

⁴⁴⁾ *Ibid.*, hal. 101

⁴⁵⁾ *Ibid.*, hal. 102

dipergunakan untuk kebutuhan militer dan bukan untuk kepentingan rakyat banyak.

Tenaga rakyat dikuras untuk kepentingan seperti membangun benteng-benteng pertahanan, pembuatan jalan, jembatan dan proyek-proyek besar yang memerlukan tenaga romusha secara besar-besaran. Proyek tersebut antara lain pembangunan jalan raya Takengon-Blangkejeren dan proyek pertahanan Gunung Setan di tanah Alas. Pengerahan tenaga romusha ini didatangkan dari daerah keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan sebagian romusha dari Jawa.⁴⁶⁾

Penderitaan rakyat mulai berubah setelah Jepang mengalami kekalahan dalam perang Pasifik. Jepang mulai melakukan perubahan kebijaksanaan di daerah pendudukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan kembali dengan rakyat. Menjelang jatuhnya beberapa front pertahanan Jepang terhadap Sekutu di Pasifik, Jepang mulai mengambil langkah-langkah pengamanan terutama terhadap rakyat umum. Semua radio yang dimiliki rakyat disita, kantor berita Domei diawasi dengan ketat, begitu pula dengan surat kabar Aceh *Shimbun*. Akan tetapi betapapun ketatnya Jepang menutupi berita kekalahannya, namun berita tersebut dapat juga diterima di Kutaraja.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Berita kekalahan Jepang ini dapat diketahui di Kutaraja berkat keberanian seorang pemuda yang bernama Abdullah. Ia merupakan orang yang dipercayakan oleh Kepala Kepolisian Jepang di Langsa. Abdullah menyampaikan berita ini di Kutaraja pada Teuku Nyak Arif yang sudah terkenal sejak zaman Hindia Belanda dan zaman Pendudukan Jepang.

Bersamaan dengan kekalahan Jepang tersebut, Soekarno - Hatta telah kembali ke Jakarta sesudah menemui Marsekal Terauci di Saigon. Soekarno - Hatta sebagai pemimpin Indonesia terkemuka segera

⁴⁶⁾ Muhammad Ibrahim, *op. cit.*, hal 182

mengadakan pertemuan dengan pemimpin lainnya. Sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan dipersiapkan dengan matang, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur no. 56 pukul 10.00 pagi diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok tanah air dan ke seluruh penjuru dunia.

Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini oleh pihak Jepang berusaha ditutupi, namun dapat juga diterima di Kutaraja pada hari itu juga oleh para pekerja di kantor berita Domei yang selanjutnya menyampaikan berita tersebut kepada rekan-rekan para pekerja di surat kabar Aceh Shimbun. Kendatipun demikian pada tanggal 18 Agustus 1945 salah seorang direktur pengawas Aceh Shimbun yang berkebangsaan Jepang yaitu K. Yamada memberitahukan juga berita Proklamasi tersebut kepada para pemuda yang bekerja di surat kabar Aceh Shimbun itu.

Selanjutnya berita tersebut oleh para pemuda yang bekerja pada kantor berita Domei di antaranya adalah Armyn, Amiruddin, Ghazali Yunus dan Bustami memberitahukan pada Teuku Nyak Arif pada tanggal 21 Agustus 1945. Salah seorang di antara mereka dengan keberaniannya menempelkan berita tersebut pada dinding bioskop garuda sekarang. Berita dan instruksi selanjutnya diterima melalui radiogram dari Bukit Tinggi yang dikirim oleh Adinegoro.

Setelah berita itu diterima di Aceh, berbagai reaksi dari masyarakat bermunculan di Kutaraja, ada yang bingung, ada yang tidak percaya, ada juga yang langsung menyatakan dukungannya dan secara umum memang mendukungnya.

Kemudian melalui Syamaun Gaharu dan Teuku Hamid Azwar, Teuku Nyak Arif menganjurkan agar para pemuda bekas Gyu Gun, Heiho, Hikoyo Tokubetsu, Kinutai tokubetsu Kaisatsutai dan lain-lain termasuk mereka bekas anggota KNIL untuk berkumpul ke dalam suatu wadah organisasi supaya mempertahankan kemerdekaan negara yang telah diproklamasikan. Agar maksud tersebut dapat berjalan, dengan mendapat dukungan semua rakyat, dalam suatu pidatonya di depan Kantor Kas Negara di Kutaraja Teuku Nyak Arif mengatakan "Kalau para pemimpin tidak berani bergerak dan bertindak, maka

pemuda akan mengambil tindakan lebih dahulu". Pidatonya memotivasi rakyat untuk berjuang mempertahankan proklamasi kemerdekaan.⁴⁷⁾

Sementara itu situasi di Aceh sudah tidak menentu, karena pihak Jepang disamping tetap berusaha menutup-nutupi berita proklamasi kemerdekaan Indonesia mereka juga masih tetap bekerja dan bertugas seperti biasa. Para pemimpin Aceh antara lain Tengku Daud Beureueh, Tuanku Mahmud, Ali Hasjmy, Syamaun Gaharu dan Teuku Nyak Arif datang menemui Tyokang S. Lino beserta para stafnya untuk menuntut agar Jepang menyerah kekuasaan dan senjata kepada orang Indonesia. Permintaan ini jelas ditolak, karena Jepang masih ditugaskan oleh Sekutu untuk menjaga status quo sampai mereka tiba. Akibatnya perebutan senjata Jepang dilakukan secara paksa oleh rakyat.

Kemudian pada malamnya secara nekat tiga orang pegawai pada kantor Kepolisian di Kutaraja mengibarkan bendera merah putih di kantor tersebut, dengan harapan esok harinya dapat dilihat oleh masyarakat sebagai tanda bahwa Indonesia sudah merdeka. Tindakan ini merupakan penaikkan bendera merah putih pertama kali di Kutaraja yang menimbulkan kehebohan di kantor kepolisian Aceh, dalam hal ini Jepang tidak dapat berbuat apa-apa. Disamping usaha tersebut pada hari itu juga tanggal 24 Agustus 1945 Teuku Nyak Arif dengan keberaniannya memasang bendera merah putih dimobilnya dan berkeliling kota juga dengan maksud agar masyarakat tahu bahwa Indonesia sudah merdeka dan rakyat tidak perlu lagi tunduk kepada penjajahan Jepang. Demikian di antara cara-cara para pemimpin kita menyampaikan/memberitahukan bahwa Indonesia sudah merdeka yang dilakukan di Kutaraja.

Selanjutnya setelah usaha memberitahukan berita tersebut dilakukan barulah kemudian mereka mengadakan mufakat melalui berbagai diskusi dan segera menyusun penggalangan kekuatan melalui organisasi yang teratur dan kuat. Untuk itulah maka dibentuklah IPI (Ikatan Pemuda

⁴⁷⁾ Mardanas Safwan, *Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arif*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), hal. 120

Indonesia) yang berkantor di kantor Aceh Shimbun dengan pengurusnya terdiri dari ketua, Ali Hasjmy, sekretaris Teuku Ali Talsya dan dibantu oleh Abdullah Arif, Ghazali Yunus, dan Said Ahmad Dahlan. Disamping membentuk IPI musyawarah inipun bertekad menyebarluaskan berita proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia keseluruh pelosok Aceh.

Kemudian dari pada itu, Teuku Nyak Arif, Teuku Muhammad Ali Panglima Polim mengambil inisiatif memanggil para pemimpin dan tokoh-tokoh serta orang-orang yang dirasa penting untuk bersumpah setia kepada negara. Setelah bermufakat dengan rekan-rekan kemudian Teuku Nyak Arif melakukan penaikkan bendera merah putih di depan kantor urusan Kesejahteraan Rakyat yaitu pada Kantor Departemen Agama Kotamadya Banda Aceh sekarang ini. Kemudian di pusat pemerintahan Jepang yaitu pada kantor Tyokan (kantor BAPERIS sekarang). Penaikkan kedua bendera tersebut pertama tidak mendapat reaksi apa-apa dari Jepang, akan tetapi bendera di depan kantor Tyokan sepulang mereka diturunkan oleh tentara Jepang. Tidak lama kemudian Teuku Nyak Arif kembali lagi dan menyuruh menaikkan kembali bendera tersebut dengan cara memanjat tiang lalu kemudian memerintahkan polisi istimewa yang telah terlebih dahulu dibentuknya untuk mengawal dan menembak mati bagi siapa yang berani menurukannya, maka berkibarlah sang merah putih dari siang hingga malam.

Untuk lebih meratakan pengibaran bendera merah putih sampai ke pelosok desa dan sejalan pula dengan memperingati dua bulan proklamasi kemerdekaan, tanggal 13 Oktober 1945 Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Aceh melalui maklumat nomor 2 secara resmi memerintahkan pengibaran bendera sampai tanggal 17 Oktober 1945 pada tiap-tiap rumah di seluruh daerah Aceh.

Bersamaan dengan usaha penyempurnaan aparatur negara dan keluarnya surat keputusan pengangkatan Teuku Nyak Arif sebagai Residen Aceh, maka dibentuklah berbagai organisasi kepemudaan untuk menjaga agar perjuangan mempertahankan kemerdekaan dapat terus berjalan dan api revolusi tetap menyala di Kutaraja. Adapun organisasi

yang dibentuk itu antara lain : API (Angkatan Pemuda Indonesia) yang dibentuk di awal kemerdekaan dari bekas anggota Gyu-gun, Heiho, Hikoyo tokubetsu, Kinutai tokubetsu, Kaisatutai dan lain-lain termasuk juga bekas anggota KNIL disahkan di Kutaraja secara resmi sebagai alat negara oleh Residen Aceh pada tanggal 12 Oktober 1945, BKR (Badan Keamanan Rakyat), BRI (Barisan Republik Indonesia), BPRI (Barisan Pemuda Republik Indonesia) dan pemuda PUSA. Kesemua organisasi pemuda ini kemudian dileburkan ke dalam suatu wadah yaitu TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan terakhir menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Keberadaan organisasi kepemudaan ini memang sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk merebut berbagai perlengkapan bagi kepentingan perjuangan seperti : senjata, sarana komunikasi, sarana angkutan kereta api, percetakan, kantor pos dan lain-lain. Kesemuanya ini bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta menjaga keamanan dan ketenteraman umum.

3.4. Masa Perjuangan Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan.

Pada masa ini peranan Kutaraja sebagai pusat pemerintahan sangat penting, karena di sini nantinya akan keluar keputusan-keputusan, petunjuk-petunjuk, intruksi-intruksi, kebijaksanaan serta komando bagi usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Jepang menyerahkan kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintahan Republik Indonesia yang diikuti dengan pelucutan senjata secara resmi di Kutaraja pada tanggal 15 Oktober 1945. Mulai saat ini tanggung jawab pemerintahan dan keamanan rakyat terletak di tangan kita sendiri. Oleh karena itu pelucutan senjata dari Jepang di Daerah tingkat II seluruh Daerah Aceh perlu segera dilanjutkan. Pelucutan senjata ini tidak semuanya dapat dilakukan secara mulus. Untuk menyelesaikan tugas yang demikian itu dua kompi API dari Kutaraja selalu diikutsertakan untuk menuntaskan tugas tersebut.

Sementara itu angkatan bersenjata kita sudah mulai kuat, karena telah memiliki senjata hasil rampasan dari tentara Jepang, maka usaha untuk mewujudkan sumpah setia berjuang untuk mempertahankan

kemerdekaan terus dilakukan dengan menyempurnakan aparatur pemerintah lainnya. Usaha penyempurnaan ini dimulai sejak diangkatnya Teuku Nyak Arif sebagai residen Aceh, lalu dengan kewenangan yang ada padanya ia membentuk Komite Nasional Daerah Aceh serta Dewan Komite Daerah Aceh. Penyempurnaan aparatur ini diawali di Kutaraja kemudian ke kabupaten dan sampai kecamatan di seluruh daerah Aceh.

Sebagaimana diketahui bahwa satu-satunya daerah dari wilayah Aceh yang berhasil diduduki oleh sekutu / Belanda selama revolusi kemerdekaan adalah Pulau Weh (Sabang). Pulau yang terletak di ujung Sumatera itu dilihat dari segi kemiliteran memang cukup strategis, sebagai basis terdepan dari arah Barat Laut Indonesia; karena itu tidak mengherankan apabila Jepang menjelang saat kekalahannya menempatkan kira-kira 10.000 kekuatan di sana di bawah komando Vice Admiral Hirose. Demikian pula dengan tentara sekutu / Belanda, pertama-tama perhatiannya diarahkan ke pulau tersebut.

Di wilayah daerah Aceh lainnya, juga sekutu berusaha untuk mendaratkan pasukannya, beberapa waktu menjelang kekalahan Jepang tanggal 14 Agustus 1945, sekelompok pasukan dari 1.3.6. force, dibawah pimpinan bekas kepala pabean Belanda di Sigli, BW. Lefrandt, telah berada di sekitar pegunungan Seulimum (Aceh Besar) dalam rangka membuat persiapan untuk memungkinkan penerjunan pasukan payung sekutu yang akan menunjang rencana penyerbuan pertahanan pantai Jepang di pesisir Aceh.

Ancaman akan masuknya kembali tentara sekutu belum lagi reda, tanggal 30 Desember 1945 di Kutaraja diadakan rapat pembentukan Markas Umum Daerah. Rapat yang dipimpin oleh Soeratno ini dihadiri oleh para wakil dari berbagai organisasi, badan-badan perjuangan, laskar-laskar yang ada pada saat itu seperti : API / TKR, polisi, Pesindo, Mujahiddin dan lain-lain. Rapat ini bertujuan untuk mengkoordinir semua alat perjuangan bersenjata. Sementara Markas Umum Daerah telah terbentuk di Kutaraja, di Luhak Pidie terjadi suatu insiden antara para ulama PUSA dengan para Ulee Balang yang dikenal dengan peristiwa Cumbok.

Akibatnya markas umum yang baru seminggu terbentuk langsung mengadakan rapat untuk membahas masalah di Luhak tersebut. Rapat menghasilkan resolusi-resolusi yang disampaikan kepada pemerintah daerah, dan melakukan berbagai bujukan serta pendekatan pada pihak pembangkang agar tidak melanjutkan tindakan mereka, namun tidak membuahkan hasil karena tidak dihiraukan oleh pihak yang bertikai. Sehingga pada tanggal 8 Januari 1946 terpaksa diadakan sidang yang kedua. Sidang inipun menghasilkan resolusi - resolusi. Salah satu resolusi terpenting diantaranya adalah menyatakan bahwa "Tindakan pembangkang di Cumbok adalah merupakan kegiatan yang menghinai perjuangan bangsa dan negara serta dapat dipandang sebagai musuh negara".⁴⁸⁾

Sidang juga mengeluarkan maklumat yang intinya memperingatkan kepada yang sedang bertikai dan pengikut-pengikutnya bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan yang bertentangan dengan perjuangan negara Republik Indonesia. Peringatan ini diiringi dengan ultimatum agar terhenti mulai hari Kamis tanggal 10 Januari 1946 pukul 12.00 WIB semua kegiatan bersenjata di Cumbok Lam Meulo harus dihentikan. Dengan dikeluarkannya ultimatum tersebut pasukan segera disiapkan baik dari Kutaraja dan daerah lain disekitar Pidie / Cumbok. Dari Kutaraja diberangkatkan polisi istimewa dan API / TKR. Cumbok diserang dari tanggal 13 s/d 16 Januari 1946 dan para pembangkang dapat ditumpas.

Setelah perang Cumbok berakhir kini giliran Kutaraja diguncang. Tanggal 1 Maret 1946 sepasukan rakyat yang mengatasnamakan TPR (Tentara Perjuangan Rakyat) dengan kekuatan 50 truk disamping yang datang dengan kereta api tiba di Kutaraja dari Idi. Kedatangan pasukan yang dipimpin oleh Amir Husin Al Mujahid sangat mengejutkan para pemimpin dan warga di Kutaraja sehingga menimbulkan suasana tegang. Adapun maksud kedatangan TPR ke Kutaraja menginginkan agar Teuku Nyak Arif, Syamaun Gaharu dan Teuku Hamid Azwar

⁴⁸⁾ Ramadhan KH. - Hamid Jabar, *Syamaun Gaharu, Cuplikan Perjuangan Di Daerah Modal*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 218

melepaskan kepemimpinan dan jabatannya dari TRI Aceh dan menyerahkannya pada mereka, dengan alasan untuk memperbaiki pemerintahan Daerah Aceh yang sedang labil.

Untuk menghindarkan pertumpahan darah diantara sesama anggotanya, Teuku Nyak Arif yang memiliki pola pikir nasionalis, mengambil kebijaksanaan dengan memenuhi permintaan mereka. Serah terima dilakukan di Kutaraja, kemudian mereka menahan para tokoh TRI terkecuali Teuku Nyak Arif yang diasingkan ke Takengon. Dalam status tahanan mereka dipindahkan ke Tangse. Di Tangse kedok mereka terbuka oleh rakyat, akibatnya Amir Husin Almujaheed kemudian hari diculik dari Aceh Hotel Kutaraja. Para penculik menginginkan agar Husin Al Mujaheed juga dibawa ke Tangse untuk diadili namun gagal karena diperjalanan mereka dihadang dan Amir Husin Al Mujaheed bebas, kemudian kembali memimpin TRI.

Tanggal 21 Juli 1947 hampir seluruh wilayah tanah air melalui agresi militer I Belanda diserang dan diduduki tentara Belanda, Kutaraja dengan pertahanan yang memadai pada saat itu terlindungi. Hal ini berkat adanya kekuatan yang tangguh dan senjata yang dimiliki hasil rampasan dari Jepang sedikit lebih lengkap dari daerah-daerah lain di Indonesia. Jika Belanda mampu menguasai Sabang itu sebenarnya memang dibiarkan, karena Aceh yang telah mengirimkan pasukannya ke Medan sejak tahun 1946, kini lebih memusatkan perhatian dan pertahanan pada pintu masuk sebelah Timur.

Berhubung Medan telah dikuasai oleh Belanda, maka dari Kutaraja Aceh harus mengirimkan pasukan tambahan untuk membebaskan kota medan dan sekaligus untuk menghambat keinginan Belanda untuk menginjakkan kakinya kembali ke tanah Aceh.

Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 1947 di Kutaraja diadakan pertemuan Dewan Pertahanan Daerah. Hasil pertemuan ini membentuk Badan Koordinasi Daerah Aceh. Adapun tujuan daripada dibentuk badan ini adalah :

1. Mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan 100 % Negara Republik Indonesia atas dasar kesatuan dan persatuan.

2. Membina Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
3. Mengusahakan dan menegakkan suatu pemerintahan yang kokoh, progresif dan berdaulat.
4. Melaksanakan Mobilisasi Umum.
5. Menyesuaikan kehidupan politik, ekonomi dan sosial untuk kepentingan pertahanan tanah air.

Dalam rangka memperingati dua tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Kutaraja tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1947 diresmikan Tugu Peringatan Kemerdekaan Indonesia yang sampai saat ini masih berdiri kokoh di Taman Sari depan Balai Kota Kotamadya Banda Aceh.

Tanggal 17 Januari 1948, dicapai persetujuan Renvil yang diterima rakyat Aceh dengan perasaan was-was. Untuk itu pada tanggal 10 Maret 1948 tiba di Kutaraja 3 orang opsir dari Komperensi Tiga Negara untuk melakukan peninjauan dan pertemuan dengan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo yaitu Tgk. Mohd Daud Beureueh.

Dalam kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh, saat beliau berpidato di lapangan Blang Padang Kutaraja tanggal 16 Juni 1948 Bung Karno mengatakan bahwa Aceh adalah **Daerah Modal**. Beliau mengibaratkan Aceh sebagai sebuah payung : *Kalaupun Republik hanya tinggal selebar payung, kita akan terus berjuang. Dengan Modal Daerah selebar payung itulah kita akan merebut daerah lain.* Pada pertemuan jamuan makan bertempat di Aceh Hotel Kutaraja bersama saudagar yang tergabung dalam GASIDA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh).

Presiden setelah menguraikan tentang keadaan negara, meminta agar GASIDA menyumbangkan sebuah pesawat terbang jenis Dakota. Hal ini disambut oleh pengurus GASIDA yang hadir pada waktu itu antara lain; lalu para sesepuh GASIDA diantaranya ketua Gasida M. Djunet Jusuf, Pak Haji Amin orang tua dalam Gasida memberi isyarat kepada Teuku Muhammad Ali Panglima Polim sebagai juru bicara

untuk menyampaikan persetujuan atas permintaan Presiden tersebut. Jawaban yang disampaikan oleh Teuku Muhammad Ali Panglima Polim ini langsung mendapat aplus dan tepuk tangan hadirin.

Dalam Agresi ke II yang dilancarkan oleh Belanda Yogyakarta sebagai Ibukota RI jatuh ke tangan Belanda. Berita tersebut dapat diterima di Aceh pada sore harinya, setelah melapor pada Gubernur Militer A. Gani Mutyara sebagai kepala jawatan penerangan TNI pada waktu itu menjelaskan situasi yang sedang dihadapi melalui Radio Republik Indonesia Kutaraja. Bersamaan dengan itu Mr. Syafruddin yang sebelumnya memimpin negara dari Bukit Tinggi pindah ke Kutaraja, karena pada saat itu memang Aceh satu-satunya daerah yang belum diduduki Belanda.

Selama di Kutaraja ia memimpin pemerintahan darurat. Awal Januari 1949 Belanda melalui radio Medan melakukan provokasi dengan mengadakan bahwa seluruh Aceh telah dikuasai oleh Tentara Belanda, namun tidak lama kemudian berita ini dibantah oleh Radio Rimba Raya (Radio Pemerintah Republik Indonesia di Aceh pada saat itu).

Usaha Belanda ingin menguasai Aceh tidak hanya sampai di situ saja, mereka melakukan dengan cara yang lain yaitu dengan mengundang Tgk. Mohd. Daud Beureueh untuk menghadiri Seminar Sumatera, dengan harapan Aceh mau masuk ke dalam negara federal, negara boneka hasil rekayasa Van Mook. Undangan yang disampaikan dalam bentuk surat yang dijatuhkan melalui pesawat udara di lapangan Neusu Kutaraja ini di tolak mentah-mentah oleh Tgk. Mohd. Daud Beureueh yang dimuat di surat kabar Semangat Merdeka Kutaraja pada tanggal 23 Maret 1949.

Demikianlah serangkaian peristiwa demi peristiwa yang telah terjadi selama masa perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Kutaraja dari awal kemerdekaan hingga pengakuan negara Republik Indonesia oleh Belanda pada tanggal 29 Desember 1949.

3.5. Pasca Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Setelah selesainya perang pisik mempertahankan kemerdekaan

Kutaraja masih dirongrong oleh berbagai gejolak, baik pemberontakan maupun perselisihan antara pemerintah dengan rakyat Aceh, antara lain menurut pandangan dan perasaan orang Aceh, pemerintah pusat tidak mau memperhatikan aspirasi rakyat Aceh yang telah berjasa besar berkorban, berjuang mempertahankan kemerdekaan dalam perang pisik 1945 - 1949.

Kutaraja sebagai ibukota Sumatera Utara yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 10 tahun 1949 tidak lama bertahan disebabkan Indonesia masih harus berhadapan dengan Agresi Belanda. Tahun 1949 Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan keputusannya No. 21/Pem/PDRI tanggal 16 Mei 1949 menetapkan semua alat-alat kekuasaan sipil dan militer dipusatkan di bawah Gubernur Militer. Keputusan ini diikuti dengan keputusan No. 22 / Pem / PDRI tanggal 17 Mei 1949 yang membagi propinsi Sumatera Utara menjadi dua daerah militer. Untuk Aceh, Langkat dan Tanah Karo Gubernur Militernya adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan markas komandonya Kutaraja. Dengan demikian Kutaraja yang sebelumnya menjadi ibukota Propinsi Sumatera Utara kini berubah menjadi sebagai pusat / markas daerah militer.

Keluarnya Peraturan Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor. 8 / Des / WKPM / 1949 membentuk Propinsi Aceh yang ditambah dengan sebagian dari Kabupaten Langkat. Propinsi Aceh diresmikan pada tanggal 31 Januari 1950 dengan ibukotanya Kutaraja dan sebagai Gubernurnya adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Tidak lama setelah Propinsi Aceh diresmikan tiba-tiba masyarakat Aceh terutama bagi mereka yang berdomisili di Kutaraja dikejutkan dengan keterangan Menteri Dalam Negeri Mr. Santoso Tirtoprodjo yang datang ke Kutaraja pada bulan Maret 1950. Beliau mengatakan bahwa pemerintah pusat belum lagi menetapkan adanya Propinsi Aceh, lalu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950. Dimana dalam Peraturan Pemerintah ini Propinsi Aceh dan Kabupaten - Kabupaten yang ada di sekitarnya masuk kembali ke dalam Propinsi Sumatera Utara yang dengan serta merta menonaktifkan Gubernurnya. Hal ini sangat ditentang oleh

masyarakat dan rakyat Aceh, sehingga menimbulkan persoalan dan gejolak antara rakyat Aceh dengan pemerintah pusat. Akibat dari kebijaksanaan ini menimbulkan keresahan dikalangan rakyat yang berkepanjangan.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi meningkatnya keresahan dan kejengkelan rakyat Aceh pada saat itu antara lain adalah : perubahan Devisi Tentara Territorium Aceh yang diperkecil menjadi Brigade Aceh di tahun 1951, kemudian diikuti dengan pemecahan pasukan dan penggantian kesatuan militer Aceh. Batalion - batalion yang ada di Aceh dikerahkan ke daerah lain di Indonesia untuk menumpas berbagai pemberontakan. Kemudian dilanjutkan dengan penangkapan - penangkapan terhadap para pemimpin Aceh, kecuali Teungku Muhammad Daud Beureueh, namun rumah mantan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo ini dikawal ketat oleh para pemuda dan sempat juga digeladahi.

Keresahan dan kejengkelan rakyat Aceh yang berkepanjangan ini akhirnya sampai pada puncaknya yang ditandai dengan meletusnya peristiwa DI / TII di Aceh pada tanggal 20 September 1953. Setelah peristiwa ini terjadi pemerintah berusaha untuk meredakan ketegangan ini. Di antaranya, kedatangan Menteri Dalam Negeri Mr. Soesanto Tirtoprodjo pada bulan Maret 1950 ke Kutaraja, dan disusul dengan pengutusan Menteri Dalam Negeri Mr. Asaat pada tanggal 26 September 1950, lalu mengutus lagi Mr. Teuku Muhammad Hasan dan terakhir dengan mempertaruhkan kedudukan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Semua usaha yang dilakukan oleh para utusan itu tidak membawa hasil apapun yang diharapkan. Termasuk usaha yang dilakukan oleh Wakil Presiden sekalipun.

Kekacauan ini terus berlangsung di Aceh, rakyat yang jadi serba salah karena mereka diteror oleh kedua belah pihak yaitu malam diteror oleh DI / TII, Siang diteror oleh tentara pemerintah. Penghapusan Propinsi Aceh yang diikuti dengan peristiwa DI / TII di Aceh mengakibatkan pembangunan di Aceh terhambat total, begitu pula dengan Kutaraja sebagai ibukotanya. Keadaan ini berlangsung cukup lama.

Pada pertengahan tahun 1955 dengan lahirnya konsep yang diberi nama "Konsepsi Prinsipil Bijaksana" yang dikemukakan oleh Syamaun Gaharu kepada Wakil Presiden sedikit membawa harapan untuk meredakan pemberontakan di Aceh. Untuk menindaklanjuti konsep ini, maka oleh pemerintah menugaskan Syamaun Gaharu untuk menyelesaikannya.

Dalam masa persiapan untuk mewujudkan konsep tersebut, muncul perkembangan lain di Sumatera dengan dibentuknya dewan-dewan di Sumatera. Pembentukan Dewan Gajah di Medan pada tanggal 22 Desember 1956. Sementara Dewan Gajah di bentuk di Medan di Kutaraja Komandan Resimen I Tentara Teritorium bersama seluruh aparatnya menarik diri dari Tentara Teritorium I Bukit Barisan dan menyatakan tunduk langsung kepada Kepala Staf Angkatan Darat, lalu membentuk Komando Daerah Militer Aceh (KDMA). Keputusan ini ternyata mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan dengan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts - 358/12 - 1956, tanggal 27 Desember 1956 yang berlaku surut terhitung tanggal 22 Desember 1956 menetapkan Komando Resimen I Tentara Teritorium I Bukit Barisan menjadi Komando Daerah Militer Aceh. Terakhir KDMA ini menjadi Kodam I Iskandar Muda dengan Kutaraja sebagai markas besarnya.

Tanggal 7 Januari 1957, Ali Hasjmy dilantik menjadi Gubernur Aceh. Pelantikan ini menandakan Aceh kembali menjadi Propinsi, keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Januari 1957. Tetapi situasi di Aceh juga belum pulih, karena rakyat Aceh bukan hanya menuntut propinsinya saja. Sehingga Presiden mengeluarkan keputusan No. 40/1957 yang menyatakan Aceh diberlakukan keadaan darurat perang. Pada tanggal 14 Maret 1957 Menteri Pertahanan dengan keputusannya No. MP/4/222/57 mengangkat Syamaun Gaharu sebagai penguasa Militer Daerah Aceh, dan kemudian berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 222 / 1957 menetapkan Syamaun Gaharu sebagai Ketua Penguasa Perang Daerah Aceh.

Berbekal jabatan terakhir yang dipercayakan kepadanya Syamaun Gaharu mulai melakukan kontak dengan mengunjungi basis-basis pemberontak seperti Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur.

Selama kunjungan yang dilakukan berulang kali itu sambil menjelaskan beberapa hal yang dirasa perlu, dan melakukan dialog-dialog, hasilnya sedikit mempengaruhi perubahan di Aceh menjadi positif.

Perkembangan selanjutnya atas jasa dua orang penghubung yaitu Ishak Amin dan Ayah Pawang Leman diadakan pertemuan I antara pemerintah dengan pihak DI / TII di Desa Lamteh pada tanggal 5 April 1957. Kemudian dilanjutkan pertemuan ke II pada tanggal 7 April 1957 dan melahirkan **Ikrar Lamteh**. Seiring dengan lahirnya ikrar ini maka pada tanggal 8 April 1957 Penguasa Perang Daerah Aceh dari Kutaraja mengumumkan penghentian permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa di Aceh. Setelah itu keadaan di Aceh berubah secara drastis, sehingga serombongan pejabat negara tiba di Kutaraja untuk melakukan peninjauan. Peninjauan ini berlangsung dari tanggal 19 - 25 Oktober 1957. Rombongan terdiri dari Perdana Menteri Juanda dan disertakan oleh beberapa orang Menteri Kabinet.

Dari sekian banyak proses dan usaha untuk meredakan ketegangan dan gejolak di Aceh walau telah keluarnya memorandum Perdana Menteri Juanda pada tanggal 17 Desember 1958 belum juga membawa hasil yang memuaskan sebagaimana yang dikehendaki.

Pada tanggal 15 Maret 1959 sebagian dari tokoh DI / TII yang masih tidak setuju diadakan pertemuan Lamteh melakukan kudeta dan membentuk Dewan Revolusi di Sigli. Dewan Revolusi yang dibentuk di Pidie ini dikomandoi oleh Hasan Saleh dengan tugas pokoknya adalah melanjutkan dan menyelesaikan pemberontakan di Aceh. Dengan mendapat bantuan suplai senjata dari PRRI pada suatu ketika mereka datang dan mengempung untuk menyerang Kutaraja.

Bersamaan dengan itu secara kebetulan sekali pasukan RPKAD sedang berada di Medan. Kesempatan ini digunakan oleh Syamaun Gaharu untuk mengundang satu Peleton RPKAD itu agar beristirahat sambil melakukan Show of force di Kutaraja. ⁴⁹⁾ Tindakan ini sekaligus sebagai *mop* kepada pasukan DI / TII, seandainya sampai keesokkan

⁴⁹⁾ *Ibid.*, hal. 349

harinya posisi DI / TII masih belum mau mundur, Syamaun Gaharu akan meminta bantuan kepada RPKAD yang masih berada di Kutaraja untuk melakukan perintah perang. Artinya, Syamaun Gaharu melaksanakan tugasnya sebagai Penguasa Perang Daerah Aceh. Mop ini membawa keberhasilan pasukan DI / TII pun mundur secara teratur dan kembali kepangkalannya di Sigli, Kutaraja akhirnya selamat dari bahaya perang saudara untuk yang kedua kalinya.

Tanggal 23 Mei 1959 tiba di Kutaraja suatu misi dari pemerintah pusat yang lebih dikenal dengan Misi Hardi, keesokkan harinya misi ini melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah guna mempersiapkan segala sesuatunya bagi pertemuan selanjutnya dengan utusan Dewan Revolusi. Sidang pertemuan kemudian berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 25 - 26 Mei 1959 yang dilakukan secara meraton hingga hampir tidak ada waktu istirahat, akhirnya membuahkan hasil yang sangat memuaskan kedua belah pihak dan ditandai dengan lahirnya Propinsi Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan keputusan Perdana Menteri tanggal 26 Mei 1959 Nomor. I / Misi / 1959.

Dengan berakhirnya Misi Hardi ini, serta lahirnya Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka berakhirilah gejolak yang meresahkan masyarakat dan rakyat Aceh umumnya dan Kutaraja khususnya. Selama masa ini Aceh bukanlah membangun tetapi yang ada adalah kehancuran total. Akibatnya Aceh penuh ketinggalan, keterlambatan dalam bidang pembangunan, begitu juga dengan Kutaraja sebagai ibukotanya.

BAB IV PERKEMBANGAN KEHIDUPAN KOTA BANDA ACEH

4.1. Pemekaran Kota

Luas kotamadya Banda Aceh tahun 1979 meliputi 11,08 km², tetapi berhubung penduduk kota terus bertambah dengan pesat, berdasarkan peraturan pemerintah nomor : 5 tahun 1983, kotamadya Banda Aceh diperluas dari dua kecamatan menjadi empat kecamatan atau dari 20 desa menjadi 90 desa. Adanya perluasan tersebut, maka luas wilayah kotamadya Banda Aceh kini menjadi 6.136 hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut yang dirinci berdasarkan luas perkecamatan yang ada di kotamadya Banda Aceh.

Tabel XV

Luas Kotamadya Banda Aceh dirinci per kecamatan tahun 1994.

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	2	3	4
1.	Meuraxa	16,04	26,14
2.	Baiturrahman	10,16	16,56
3.	Kuta Alam	14,77	24,07
4.	Syiah Kuala	20,39	33,23
	Jumlah	61,36	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Banda Aceh.

Dengan adanya perluasan wilayah kotamadya Banda Aceh maka ibukota Aceh Besar yang semula berada di Kecamatan Kuta Alam dipindah ke Jantho. Hal ini dilakukan untuk memisahkan secara administrasi antara Kabupaten Aceh Besar dengan op kotamadya Banda Aceh sehingga tidak terjadi dualisme pemerintahan dalam satu kota, urusan-urusan administrasi pemerintahanpun menjadi lebih tertib dan

lancar. Adapun batas wilayah administrasi kotamadya Banda Aceh, setelah adanya perluasan tersebut adalah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan selat malaka, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Pada saat kotamadya Banda Aceh masih terdiri dari dua Kecamatan yaitu kecamatan Kuta Alam dan kecamatan Baiturrahman, kedua kecamatan ini dibatasi oleh Kreung Aceh yang membelah kota Banda Aceh. Setelah mengalami perluasan kota perluasan wilayah kota, posisinya berada pada garis antara 05°30' - 05°35' lintang utara dan pada garis bujur 95°22' - 99°16' bujur timur. Tinggi rata-rata 0,80 meter diatas permukaan laut. ⁹⁾ (sumber : Kantor Statistik Kotamadya Banda Aceh tahun 1994).

Adanya peraturan pemerintah No. 5 tahun 1983 tersebut membagi wilayah administrasi kotamadya Banda Aceh sebagai berikut :

1. Kecamatan Meuraxa 36 desa dengan Ibukota Ulee Lheu
2. Kecamatan Baiturrahman terdiri dari 20 desa dengan Ibukota Neusu Jaya.
3. Kecamatan Kuta Alam terdapat 15 desa dengan Ibukota Peunayong.
4. Kecamatan Syiah Kuala, ada 19 desa dengan Ibukota Lamgugob.

Sebagian besar tanah bekas *Erfacht* telah dijadikan tanah-tanah untuk bangunan seperti pendirian perkampungan Bandar Baru (Lampriet) dan Kota Baru Lam pineng. Di daerah ini juga didirikan bangunan perkantoran pemerintah seperti Kantor Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh, kantor-kantor pemerintah dari berbagai departemen, sekolah dan perumahan penduduk. Kawasan baru ini dianggap sebagai kawasan elit di kotamadya Banda Aceh.

Melihat tata kota dan dan posisi bangunan yang ada di kota Banda Aceh sama dengan kota-kota lain di Indonesia pusat perkantoran berada di jantung kota, letaknya strategis dan mudah dijangkau oleh daerah sekelilingnya. Pusat kota Banda Aceh terletak pada dua kecamatan, yaitu kecamatan Kuta Alam dan kecamatan Baiturrahman. Pada

kecamatan Kuta Alam banyak terdapat perkantoran, sekolah dan perumahan penduduk, dan di kecamatan Baiturrahman terletak terminal dalam kota, pusat pasar, dan pertokoan.

Ulee Lheu dan Darussalam berada dalam kecamatan Meuraxa dan Syiah Kuala. Ulee Lheu yang dahulunya adalah pelabuhan tempat bersandarnya kapal-kapal dari pelabuhan Sabang juga pernah menjadi tempat keramaian bagi berkumpulnya para pedagang yang akan membawa dagangannya ke *pasar jengek* (nama pasar yang saat ini dikenal dengan Pasar Aceh setelah dibangun kembali sehabis terbakar di tahun 1984).

Setelah pelabuhan bebas Sabang ditutup dan pelabuhan penyeberangan Banda Aceh - Sabang dipindahkan ke Pelabuhan Malahayati Kreung Raya di Kabupaten Aceh Besar, Ulee Lheu menjadi sepi. Fungsinya saat ini hanya sebagai objek rekreasi di hari Minggu pagi oleh masyarakat Banda Aceh sekitarnya, juga tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan. Kecamatan Syiah Kuala yang di dalamnya terdapat kampus Darussalam adalah kota baru yang semakin ramai seiring dengan semakin majunya pendidikan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Banyak mahasiswa yang berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Selain kebutuhan akan tempat tinggal perdagangan juga menjadi lahan baru bagi masyarakat, sehingga mulai berkembang pertokoan yang menjual berbagai jenis kebutuhan akan mahasiswa, juga rumah makan dan kafetaria.

4.2. Kehidupan Sosial Politik

Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda terhadap negara Republik Indonesia, perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya mulai dijalankan. Hal ini terlihat dari usaha pemerintah melalui pembangunan di segala bidang di setiap wilayah Republik Indonesia. Usaha pemerintah untuk memacu pembangunan pada masa Orde lama tidak dapat dijalankan dengan baik, hal ini disebabkan situasi politik yang dihadapi oleh pemerintah.

Berbicara masalah politik pada masa pemerintahan Orde lama, ditandai dengan terdapatnya banyak partai politik. Di antara partai-partai tersebut berusaha ingin menguasai pemerintah, yang berakibatkan

turun naiknya pemerintahan. Perebutan kekuasaan politik oleh partai-partai politik pada masa ini sangat dirasakan yang pada akhirnya membawa bangsa Indonesia kepada tragedi nasional terjadinya pemberontakan G.30.S.PKI. Partai ini berusaha untuk merebut pemerintahan, merubah ideologi negara melalui jalan kekerasan dengan menggunakan senjata.

Selain terjadinya perebutan kekuasaan oleh partai politik seperti yang telah dijelaskan, pada masa ini terjadi pula pemberontakan-pemberontakan di daerah seperti yang terjadi di Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan termasuk di Aceh. Dengan terjadinya kekalutan politik seperti ini, menyebabkan pemerintah tidak dapat memantapkan usaha-usaha pembangunan yang telah diprogramkan.

Seperti halnya yang terjadi di Aceh pada skala nasional daerah Aceh pada masa ini mengalami nasib yang sama. Pembangunan di Aceh pada masa ini belum memungkinkan, salah satu penyebabnya karena terjadinya pemberontakan DI. TII sejak September 1953. Kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat sangat dirasakan akibat dari terputusnya hubungan dengan luar daerah, terbelakangnya lapangan kerja dan sarana transportasi yang buruk. Tidaklah dapat dipungkiri bahwa pada masa ini pun usaha pembangunan telah dilaksanakan dan sangat dirasakan oleh rakyat Aceh adalah pembangunan di bidang pendidikan yang sejak 1958 telah digalakkan secara besar-besaran. Pada tanggal 2 September 1959 diresmikan kampus Darussalam sebagai pusat pendidikan tinggi untuk daerah Aceh, di Kabupaten-Kabupaten didirikan pusat-pusat pendidikan yang bersifat daerah.

Ternyata pemberontakan G.30.S.PKI merupakan titik awal lahirnya Orde Baru. Pada masa ini pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Soeharto berusaha menata kembali kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya. Penataan di bidang politik ditandai dengan penyederhanaan politik, pelaksanaan demokrasi melalui pemilu, pemantapan pemerintahan melalui penyederhanaan kabinet, pemantapan keamanan dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan politik.

Kepemimpinan Orde Baru membawa rakyat Indonesia ke arah stabilitas politik dan demokratisasi. Upaya pemerintah untuk mewujudkan demokrasi adalah dengan mencapai pelaksanaan pemilu ke dua tahun 1971. Dengan adanya pemilu tersebut kemudian dapatlah dilengkapi lembaga-lembaga demokrasi sesuai dengan kehendak UUD 1945.

Pada masa pemerintahan Orde Lama pernah dilakukan pemilihan umum yang pertama bagi rakyat Indonesia dan berlangsung di tiap-tiap propinsi. Melihat latar belakang sejarah dan budaya, di dalam berpolitik masyarakat Aceh dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Pada pemilihan umum ini misalnya, di daerah ini didominasi oleh partai Islam, Masyumi. Padahal waktu itu, selain Aceh masih jadi bagian dari Sumatera Utara, juga di sana sedang berlangsung pemberontakan DI / TII. Pengalaman tahun 1955 itu membuktikan bahwa tingginya tingkat kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program nasional.

Setelah partai Masyumi bubar menyusul Dekrit Presiden untuk kembali kepada UUD 1945 tanggal 5 Juli 1959, dan Aceh telah menjadi Propinsi sendiri, peranannya diteruskan oleh berbagai partai politik Islam lainnya seperti NU, PSII, dan Perti. Sehingga pada saat pemberontakan G/30S/PKI meletus tahun 1965, daerah dapat dikatakan tidak mengalami keguncangan yang berarti karena kecilnya pengaruh PKI.

Pada saat pemilu pertama setelah Orde Baru di tahun 1971, saat itu partai-partai Islam belum berfungsi sekalipun telah berbentuk Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Golongan Karya (Golkar) dianggap sebagai kekuatan penghancur PKI masih hampir 50 % suara sendiri. Setelah keempat partai Islam berfungsi dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dalam pemilu 1977 dengan lambang Ka'bah, PPP berhasil mendominasi suara. PPP memperoleh 57 % suara, sementara Golkar tertinggal dengan meraih hanya 41 % suara. Keadaan bertambah gawat bagi Golkar ketika pada pemilu berikutnya tahun 1982 angka yang diperoleh PPP meningkat menjadi 59 %. Sebaliknya Golkar merosot menjadi sekitar 37 %.

Karena itu kenaikan perolehan suara Golkar dalam pemilu 1987 yang menapai 52 % merupakan suatu prestasi luar biasa yang diperoleh Golkar dalam sejarah Pemilu di Aceh. PPP dapat ditekan dan PDI mulai muncul. Sehingga dari 10 jatah kursi di DPR RI yang pada pemilu sebelumnya PPP memperoleh 6 kursi, Golkar 4 kursi, PDI 1 kursi.

Pada pemilu 1992 Golkar benar-benar mampu memantapkan posisinya di urutan pertama di Propinsi ini dengan meraih lebih 57 % suara. Sehingga komposisi kursi di DPR RI menjadi : Golkar 6 kursi, PPP 3 Kursi, PDI 1 kursi. Pada tahun 1992 ini Golkar untuk pertama kalinya memperoleh kemenangan mutlak di seluruh daerah Aceh, karena sebelumnya Golkar hanya mampu memperoleh kemenangan di tingkat Propinsi.

Pembinaan sosial politik di Aceh adalah salah satu hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Konsep pembinaan selalu disesuaikan dengan dinamika masyarakat di daerah ini. Oleh karena itu pembinaan politik dilakukan mengikuti kemajuan di bidang pembangunan ekonomi dan sosial. Semua kekuatan sosial politik diupayakan memiliki visi yang sama dan bergerak sejalan sehingga merupakan suatu kekuatan yang ampuh untuk menunjang usaha pembangunan di daerah.

Salah satu usaha konkret untuk menyatukan visi masyarakat terhadap pembangunan pada tahun 1987 dibentuk kelompok kerja (pokja) pada tingkat propinsi. Kelompok ini menghimpun politikus, ulama, cendikiawan, dan pemuda yang bertugas menyerap, mendiskusikan dan memformulasikan berbagai masalah pembangunan yang berkembang di masyarakat. Hasil konkret pembicaraan-pembicaraan pokja diserahkan kepada pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh untuk dikembangkan lebih lanjut.

Pembentukan kelompok kerja membuahkan hasil ganda. Pertama, terciptanya visi yang bulat terhadap pembangunan, dan kedua, meredanya suara-suara sumbang yang lazimnya diutarakan terhadap program-program pembangunan. Selain itu untuk memantapkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menangkal

bahaya laten yang akan mencoba merongrong Pancasila dan UUD 1945, pemerintah sejak tahun 1978 melalui TAP/MRP/II/1978 perlunya melaksanakan penataran-penataran P4 disetiap instansi, sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA, Universitas, ormas-ormas serta masyarakat. Dengan demikian suasana perpolitikan yang sehat dan kesadaran bernegara yang tinggi diharapkan akan tercipta.

4.3. Perkembangan Ekonomi

Banda Aceh di samping dikenal sebagai Ibukota Propinsi, kota budaya, kota pendidikan, juga dikenal sebagai kota perdagangan. Sebagai kota perdagangan, Banda Aceh telah memiliki faktor penunjang, di antaranya yaitu jalan raya yang menghubungkan Banda Aceh dengan kota-kota lain, pelabuhan Malahayati, Bandar Udara Blang Bintang yang sejak awal tahun 1995, telah diganti namanya menjadi Bandara Sultan Iskandar Muda. Walaupun Pelabuhan Malahayati dan Bandara Sultan Iskandar Muda berada di wilayah Kabupaten Aceh besar, namun peranannya dalam bidang perekonomian dan perdagangan kota Banda Aceh sangatlah besar. ¹⁾

Sebelum pelabuhan Malahayati dipergunakan, pelabuhan laut satu-satunya sejak jaman Belanda adalah pelabuhan Ulee Lheu yang kini telah ditutup. Untuk kelancaran perekonomian pada awal kemerdekaan dibuka pelabuhan udara sipil / militer Lhoknga. Setelah Lapangan Udara Blang Bintang difungsikan dalam bidang perekonomian dan kelancaran bisnis, maka pangkalan udara Lhoknga ditutup, dan kemudian dirubah statusnya sebagai lapangan golf Seulawah.

Pada masa Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh merupakan pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan yang sangat ramai. Pedagang-pedagang Aceh membeli hasil-hasil bumi seperti kopra, cengkih dan pala yang diperoleh dari daerah pedalaman dan menjualnya kepada pedagang-pedagang asing. Setelah Malaka jatuh ketangan Portugis pada tahun 1511 hubungan perdagangan semakin berkembang dan meluas

¹⁾ A. Hasjmy, (et al.) *Lima Puluh Tahun Aceh Membangun*, (Banda Aceh : MUI Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1995), hal. 371

sehingga banyak pedagang-pedagang dari kota ini yang mencari hasil bumi ke wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Bengkulu.

Setelah Belanda masuk ke Aceh pada tahun 1873, kegiatan ekonomi rakyat mulai hancur. Perang yang berlangsung cukup lama, telah meruntuhkan sendi-sendi perekonomian rakyat. Kondisi ini sampai beberapa puluh tahun, setelah Belanda angkat kaki dari Aceh masih tetap terasa pengaruhnya sehingga tarap hidup rakyat masih sangat rendah.

Sejak masa penjajahan Jepang sampai sekitar tahun 1960 an, mata pencaharian penduduk masih mengandalkan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang diperdagangkan di Banda Aceh. Sumber keuangan Pemda sebagian besar masih mengandalkan sumber pembiayaannya dari sektor retribusi dan pajak bumi dan bangunan, sehingga pendapatan asli pemerintah daerah masih sangat rendah. Akibatnya pembangunan disegala bidang menjadi terhambat karena masih sangat kekurangan dana.

Struktur ekonomi masyarakat kotamadya Banda Aceh mengalami perubahan ke arah meningkatnya kesejahteraan dan perekonomiannya sejak masa Orde Baru yaitu setelah dimulainya masa pembangunan lima tahun tahap pertama yang juga digalakkan di Aceh. Pertumbuhan ekonomi berlangsung pesat setelah di Banda Aceh dibangun pabrik semen PT Semen Andalas yang berlokasi di Lhoknga sekitar 15 km dari Banda Aceh.

Pusat-pusat kegiatan ekonomi terutama berada di pasar, pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan, pergudangan, perbankan dan lain-lain kegiatan yang mendorong kemajuan ekonomi di tempat itu. Mengenai pasar yang ada di Banda Aceh di antaranya yaitu pasar Beurawe, pasar Seutui, pasar Ulee kareung, pasar Peunayong, pasar Aceh dan pasar Ulee Lheu.

Selanjutnya pasar swalayan atau pusat perbelanjaan yang lebih modern adalah Suzuya Pasar Aceh, Metro Pasar Aceh dan Metro Penayong. Kegiatan perbankan ada di beberapa tempat di Banda Aceh baik Bank-Bank swasta maupun pemerintah seperti Bank Bumi Daya,

Bank Pembangunan Daerah, BTPN, BRI, Bapindo, BNI 1946, BCA dan lain-lainnya yang semuanya itu sangat membantu kelancaran kegiatan ekonomi di Banda Aceh, baik dalam bentuk pemberian pinjaman modal maupun pemberian kredit kepada para pengusaha dan pengrajin dari berbagai lapisan masyarakat. Sebagai contoh adanya kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Usaha Tani (KUT), dan lain-lain, serta bantuan modal bagi para peternak, para nelayan dan usaha-usaha lainnya yang membutuhkan pinjaman modal Bank. Di sini peranan Bank menjadi sangat penting bagi usaha-usaha perekonomian masyarakat di kota ini.

Pasar-pasar yang ada merupakan pusat berkumpulnya para pedagang dan pembeli. Sedangkan barang-barang yang diperdagangkan di antaranya yaitu bermacam-macam sayur-sayuran, bermacam-macam bumbu dapur, buah-buahan, perabot rumah tangga, alat-alat dapur, pakaian dan lain sebagainya. Untuk kelancaran dan ketertiban pasar Peunayong, maka diadakan pengelompokan penjualan barang dagangan seperti misalnya khusus ikan hanya dijual di pasar ikan Penayong, yang memperdagangkan berbagai jenis ikan laut besar maupun kecil. Demikian juga untuk buah-buahan dipusatkan pada pasar buah-buahan yang membentuk kios-kios darurat di pasar Penayong. Sayur-sayuran di pusatkan di pasar sayuran yang menempati lantai atas pasar Peunayong, di lantai bawah khusus untuk bumbu dapur, kelapa dan ikan kering. Hal yang sama juga diterapkan di pasar Aceh, sehingga pembeli akan lebih mudah mencari barang-barang yang diperlukannya karena tempatnya sudah jelas dan permanen.

Untuk memenuhi kebutuhan kota, terutama kebutuhan dari hasil pertanian didatangkan dari daerah-daerah sekitarnya seperti daerah kabupaten Aceh Besar, kabupaten Pidie, kabupaten Aceh Barat dan kabupaten - kabupaten lain di Daerah Istimewa Aceh. Sementara untuk kebutuhan barang-barang import yang diperlukan dan diperdagangkan pada umumnya didatangkan dari kota Medan.

Sebenarnya ketergantungan akan barang import yang diperdagangkan melalui kota Medan seperti tersebut di atas, merupakan masalah tersendiri bagi kotamadya Banda Aceh. Berdasarkan

pengamatan dapat dikatakan bahwa kota Banda Aceh belum berkembang ke arah suatu kota yang berperanan sebagai kota pengeksport. Bahkan jika dibandingkan dengan masa-masa yang sudah silam, kegiatan di bidang eksport ini cenderung berkurang. Hal ini mungkin sebagai akibat kurangnya fasilitas yang mendukung perdagangan eksport, terutama yang berhubungan dengan pelabuhan, sedangkan pelabuhan yang ada seperti pelabuhan Malahayati, belum berfungsi sebagai pelabuhan eksport, pergudangan, ekspedisi dan sebagainya, tetapi hanya sebagai pelabuhan penyeberangan dari dan ke Sabang.

Walaupun kota Banda Aceh didukung oleh daerah belakang yang relatif cukup mempunyai potensi eksport, tetapi Banda Aceh tidak berkembang ke arah kota pengeksport. Banyak eksport produksi pertanian dan perkebunan yang dihasilkan Aceh seperti kopi, karet, minyak nilam, rotan, pinang, lada dan lain-lain yang seharusnya dieksport lewat Banda Aceh, terpaksa dieksport lewat pelabuhan Belanda di propinsi Sumatera Utara. Hal ini merupakan kerugian bagi Banda Aceh, karena seandainya pelabuhan Malahayati dapat ditingkatkan dengan fasilitas yang memadai untuk kepentingan eksport tersebut, maka eksport hasil-hasil produksi pertanian dan perkebunan Aceh dapat dilaksanakan di Banda Aceh. Hal ini tentunya dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan pendapatan daerah kotamadya Banda Aceh, baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah.

Di kotamadya Banda Aceh banyak diusahakan industri kerajinan tangan. Hasil produksi tersebut pada umumnya adalah untuk memenuhi permintaan terhadap kebutuhan di Banda Aceh dan sekitarnya, belum ada yang dieksport ke daerah lain di luar Aceh. Adapun jenis industri kerajinan tangan tersebut di antaranya yang bahannya dari rotan yaitu alat meubel berbagai jenis, tikar, topi, keranjang, sangkar burung dan lain-lain. Yang berasal dari bahan benang sutera alam seperti kain sarung Aceh yang disebut sarung Lam Ugob karena daerah penghasil utama di daerah Lam Ugob (Lam Nyong, Aceh Besar) yang bentuknya mirip kain sarung songkit. Mengenai industri percetakan juga banyak

terdapat di Banda Aceh, baik milik perusahaan swasta maupun milik pemerintah, yaitu percetakan negara.

4.4. Kehidupan Sosial Budaya

Menurut pengamatan sejarah bahwa pada masa-masa sebelum abad ke 15, penduduk Aceh adalah orang Aceh. Pada masa Sultan Iskandar Muda memerintah di kerajaan Aceh berusaha memperluas kekuasaannya sampai ke Sumatera Timur, bahkan ke Siak dan sebagian Sumatera Tengah. Dengan demikian terjadilah percampuran suku bangsa, misalnya perpindahan orang Minang dari Sumatera Barat ke Aceh menghasilkan percampuran dan membentuk kebudayaan baru yang lebih dikenal dengan sebutan *aneuk jamee*. Migrasi penduduk Sumatera Timur yang bertemu dengan penduduk Aceh melahirkan kebudayaan Tamiang di Aceh Timur. Percampuran ini telah juga terjadi pada bangsa-bangsa lain di luar nusantara seperti Arab, Persi, Cina, India dan Portugis. Bahkan kata Aceh diartikan sebagai asal suku bangsa yaitu Arab, Cina, Eropa, Hindu.

Banda Aceh sebagai ibukota dari Propinsi Daerah Istimewa Aceh dihuni etnis Aceh dan sebagian pendatang. Adat istiadat Aceh mewarnai kehidupan masyarakat. Kebudayaan yang berkembang dan menjadi norma-norma kehidupan berakar dari agama Islam yang telah berkembang sejak abad ke 13.

Kesenian tradisional Aceh mempunyai identitas yang religius, komunal, demokratis dan heroik. Kesusasteraan Aceh ada dalam bahasa Aceh dan Melayu (Jawi). Sementara bahasa Arab, baik kata maupun ibaratnya banyak sekali mempengaruhi kesusasteraan Aceh. Contoh adat istiadat yang Islami dilihat dalam tata krama kehidupan masyarakat, apabila dua orang bertemu, mereka saling menyapa dengan mengucapkan *assalamualaikum* dengan jawaban *waalaikumsalam*, orang pertama memberikan salam kepada orang lain biasanya diikuti dengan saling berjabat tangan, salam ini juga digunakan pada forum-forum formal.

Jiwa adat yang sejalan dengan agama Islam masih dihayati oleh

masyarakat Aceh, sesuai dengan ungkapan dalam adat Meukuta Alam yaitu :

Adat bak po teumeureuhom

Hukum bak Syiah Kuala

Kanun bak Putroe Phang

Reusam bak Laksamana

Hukom ngon adat lagee' zat ngon sipheut

Ungkapan tersebut mengandung arti bahwa adat (dalam arti peraturan-peraturan kenegaraan) bersumber pada kebijaksanaan Sultan dan penasehat-penasehatnya yang dalam hal ini dilambangkan kepada Sultan Iskandar Muda. Hukum dalam arti peraturan-peraturan dalam agama Islam merupakan wewenang para ulama, yang dalam hal ini dilambangkan dengan ulama besar yang terkenal dengan Teungku Syiah Kuala (Syech Abdurrauf).

Urusan *Kanun* seperti tertib sopan santun, adat di dalam perkawinan dan lain-lain, diserahkan menjadi urusan *Maharani* yang dilambangkan dengan Putroe Phang. Urusan reusam (kebiasaan) menjadi wewenang Panglima *Kaum* dan *bentara-bentara* di masing-masing tempat atau negeri. *Hukom ngon adat lagee' zat ngon sipheut* berarti hukum dengan adat terjalin erat seperti zat dengan sipat.

Selain adat istiadat yang telah berakar pada kehidupan masyarakat tetap berjalan misalnya pada upacara perkawinan yang masih tetap dijalankan dalam masyarakat, upacara daur hidup dan lain-lain. Di kota Banda Aceh sentuhan Islam dapat dilihat pada markas jalan-jalan protokol di kota Banda Aceh yaitu kata-kata yang dikutip dari ayat-ayat Al'Quran dalam membimbing pengguna jalan raya, seperti bacaan Bismillahirrahmannirrahim, Innazofatu minal iman (untuk memberikan peringatan terhadap tanggungjawab kebersihan kota), busana yang dikenakan oleh wanita Aceh umumnya busana muslim, mengenakan tutup kepala (jilbab). Selain itu perayaan hari-hari besar Islam diperingati secara besar-besaran dan agung mulai dari rumah ke rumah sampai tingkat kotamadya, seperti acara kenduri Maulid Akbar yang

dilaksanakan setiap tahunnya dan dipusatkan di Mesjid Raya Baiturrahman. Tradisi ini tidak dijumpai di manapun daerah lain di Indonesia.

Tata adat yang diperlakukan di Banda Aceh lebih dilihat pada keuntungan ekonomis dan praktis, sesuai dengan kemampuan pihak keluarga masing-masing. Dalam hubungan sosial terlihat keluarga batih sangat dominan, sedangkan hubungan keluarga luas (*extended family*) hampir tidak nampak. Keluarga inti merupakan kesatuan orang-orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum berumah tangga. Disamping itu sebuah keluarga inti adalah satu kesatuan ekonomi. Perkawinan yang sering terjadi adalah antar orang se daerah, tetapi akhir-akhir ini perkawinan antar suku juga sudah biasa terjadi.

Pengembangan seni budaya terus dibina dan dikembangkan, Lembaga Adat Kebudayaan Aceh adalah salah satu wadah pembinaan adat Aceh agar terjaga dan tetap lestari, selain itu juga didukung oleh instansi pemerintah yang terkait dalam hal ini Pemda dan Depdikbud. Pembinaan ini tidak saja melalui penyuluhan, seminar, dan lokakarya. Ajang festival budaya dan Pameran Pembangunan juga digelar sebagai salah satu usaha pemerintah untuk menarik minat masyarakat terhadap kesenian daerah sekaligus mempromosikan kebudayaan daerah ke tingkat nasional dan internasional.

4.5 Kehidupan Beragama

Orang Aceh di Banda Aceh seluruhnya beragama Islam. Mereka mengikuti mazhab Syafii. Qur'an dan hadist Nabi Muhammad S.A.W adalah pedoman hidup mereka. Pengaruh agama Islam dalam masyarakat sangat berhubungan dengan kerohanian dan kepribadian seseorang. Lembaga Pengadilan Agama sangat berperan dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan masyarakat baik dalam perkawinan, warisan, serta kekeluargaan.

Faham Muhammadiyah juga berkembang di Aceh, faham ini lebih banyak diikuti oleh pendatang. Dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, tidak ada perbedaan antara kaum Muhammadiyah dengan kaum

tua karena itu kegiatan sosial yang diikuti oleh Muhammadiyah seperti di bidang pendidikan dan kesehatan mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat Aceh yang berdiam di Banda Aceh. Masyarakat juga secara spontan turut mensukseskan Muktamar Muhammadiyah ke 43 yang berlangsung mulai tanggal 9 Juli 1995 sampai dengan 10 Juli 1995 di Banda Aceh.

Kehadiran Belanda ke Nusantara yang tidak terlepas dari misi *gold, glory and gosty* (kekayaan, agama dan kekuasaan) menjadi salah satu sebab berkembangnya agama kristen di Nusantara. Agama Kristen yang dibawa oleh zending Kristen sudah tentu tidak bisa diterima oleh masyarakat Aceh, sebagai alasan kekafiran adalah musuh umat Islam. Berkembangnya Kota Banda Aceh tidak dapat membendung siapa saja yang akhirnya datang dan menjadi penghuni kota ini, terbukti dengan adanya gereja methodis yang cukup megah di bangun di kota ini untuk menampung umat Kristen yang datang dari berbagai daerah di luar Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Setidaknya hingga tahun 1996 telah ada 2 buah gereja berdiri di kotamadya Banda Aceh.

Tempat peribadatan lainnya adalah kuil, tempat peribadatan umat Hindu yang umumnya bermukim di kampung Keudah. Menurut sumber umumnya penduduk Tamil yang ada di daerah ini adalah suku bangsa keturunan yang telah lama bermukim di daerah ini dan telah banyak yang beragama Islam. Selain itu bagi warga negara keturunan Cina mereka lebih memilih agama leluhur mereka yang dikenal dengan agama Confusius. Dalam beribadat mereka kebanyakan melakukannya di rumah-rumah atau toko-toko yang mereka tempati. Tempat sembahyang bersama dilakukan di klenteng yang masih berdiri megah di kawasan Peunayong. Jumlah tempat ibadah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel XVI
Banyaknya Tempat Peribadatan di Kotamadya Banda Aceh
Tahun 1994.

No.	Jenis	Jumlah
1.	Mesjid	69
2.	Meunasah	103
3.	Mushalla	45
4.	Gereja Protestan	1
5.	Gereja Katolik	1
6.	Kuil	2
7.	Klenteng	2
	Jumlah	223

Sumber : Kantor Departemen Agama Kotamadya Banda Aceh 1994.

Kehidupan beragama di kota yang sangat Islami ini cukup terjaga, masyarakat saling menghormati dan tidak ada saling merasa tertekan dengan lingkungannya. Ini dapat dilihat pada masyarakat di lingkungan kelurahan Peunayong yang mayoritas dihuni oleh etnis Cina dan sebagian pribumi.

Mesjid Baiturrahman adalah jantung kota Banda Aceh. Letaknya yang tepat di tengah-tengah kota menjadikan pusat perekonomian berada di sekitarnya yaitu pertokoan, terminal kota dan pasar. Kondisi seperti ini mengacu kepada ciri-ciri yang menandai ciri-ciri Gordon Childe yang dipakai oleh Prof. Muarif Ambary dalam analisa makalahnya "Banda Aceh sebagai Pusat Kebudayaan dan Tammaddun. Konsep Gordon Childe untuk mengamati beberapa aspek dari tammaddun yang berkembang di Banda Aceh terutama pada abad-abad ke 16 - 18 Masehi, yaitu :

1. Berkembangnya pendirian bangunan untuk umum (istana, pusat kebudayaan, peribadatan, perkembangan irigasi, gudang dan taman sari, pusat pasar dan sebagainya).
2. Meningkatnya (bekembangnya) ekspresi simbol-simbol. Meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan baik karena kemajuan teknologi maupun karena kemakmuran yang bersifat ekonomis.²⁾

Jika demikian artinya melihat tata kota Banda Aceh dari zaman pemerintahan kerajaan di abad ke 16 hingga sekarang masih tetap bertahan. Pada pemerintahan Belanda tata kota biasanya ditandai dengan kantor pusat pemerintahan, lapangan (alun-alun) kantor pos dan stasiun kereta api disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian dan perang.

Contoh lain yang dapat dilihat dalam kehidupan beragama adalah suasana di sekitar mesjid Raya Baiturrahman yang sangat ramai, tetapi masyarakat telah terbiasa dengan peraturan yang tidak tertulis untuk tetap menghormati waktu-waktu ibadah, diantaranya azan shalat Jum'at. Toko-toko, pusat perbelanjaan yang ada di kota Banda Aceh tutup pada jam 12.00 wib setiap hari Jum'at dan buka kembali pada pukul 14.00 wib setelah turun shalat Jum'at. Ini tidak saja diterapkan oleh pedagang pribumi (Islam) tetapi juga pedagang Cina yang tetap menghormati waktu ibadah umat Islam.

4.6 Pariwisata

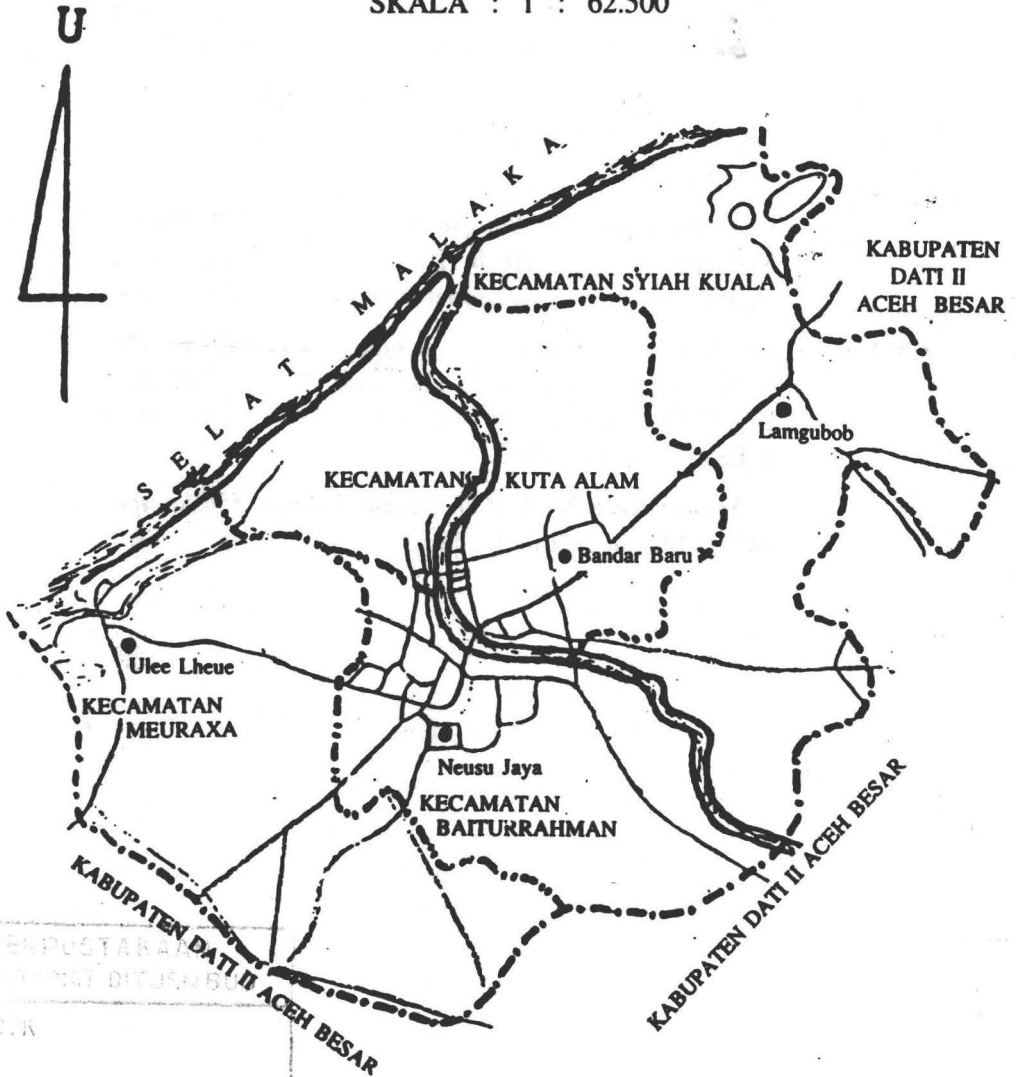
Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, akan tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan guna memenuhi keinginan dan kebutuhan yang beraneka ragam.

Sektor pariwisata komoditi non material yang mempunyai devisa cukup besar bagi Indonesia. Penerimaan devisa untuk Indonesia dari 1.625.965 wisatawan di tahun 1989 adalah sebesar 1.284 juta US\$.

²⁾Hasan Muarif Ambary, Banda Aceh Sebagai Pusat Kebudayaan dan Tamadun, dalam *Kota Banda Aceh Hampir 1000 Tahun*. (Banda Aceh : Pemerintah Kotamadya Tk. II Banda Aceh, 1988), hal. 89

PETA KOTAMADYA BANDA ACEH

SKALA : 1 : 62.500



- Keterangan :**
- Pusat Pemerintahan
 - - - - - Batas Kotamadya
 - · - · - · - Batas Kecamatan

Martinus Nijhoff, 1958.

1. Muhammad Ibrahim, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta : Depdikbud, Dirjen Jarahnitra, Proyek Inventarisasi Dokumentasi Sejarah Nasional, 1991.
 2. Ramadhan KH. – Hamid Jabar, *Syamaun Caharu Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal*, Jakarta : Pustaka sinar Harapan, 1995.
 - T. Syamsuddin, *Pemetaan Suku Bangsa Melalui Aspek Budaya di Kotamadya Banda Aceh*, Banda Aceh : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1995 / 1996.
- Zakaria Ahmad, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta : Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1982.
- , *Sekitar Keradjaan Atjeh Dalam Tahun 1550 Sampai 1675*, Medan : Monora, 1972.

- Muhammad Said, *Atjeh Sepandjang Abad Jilid I*, Medan : Penerbitan Sendiri, 1961.
- Pasifikus Ahok, *Kembalinya Pengusaha Tionghoa di Banda Aceh*, Banda Aceh : Pusat Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1976.
- R.E. Soeatmadja, *Ilmu Lingkungan*, Bandung : ITB, 1997.
- Rusdi Sufi, *Banda Aceh Pada Masa Pendudukan Belanda* (naskah asli belum dicetak).
- , *Beberapa Catatan Tentang Banda Aceh Pada Masa Pendudukan Belanda*, (Bulletin Cakra Himas Nomor. 5), Banda Aceh : Himpunan Mahasiswa Sejarah, FKIP Unsyiah, 1993.
- , *Perkampungan di perkotaan Sebagai Wujud Proses Adaptasi Sosial Kehidupan di Perkampungan Miskin Kota Banda Aceh*, Banda Aceh : Depdikbud, 1993.
- , *Tingkat Kesadaran Sejarah Siswa SMTA dan Masyarakat di Kota Banda Aceh*, Jakarta : Depdikbud, Ditjarahnitra, Proyek Inventarisasi Dokumentasi Sejarah Nasional, 1986.
- Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme*, Jakarta : Departemen Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, 1973.
- Soemargono, et al., *Profil Propinsi Republik Indonesia Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta : Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992.
- TA. Talsya, *Pendopo Gubernur Aceh Bangunan Tua Abad XIX*, (artikel di Harian Waspada), Medan : Rabu 29 Januari 1986.
- Team Monografi Daerah Istimewa Aceh, *Monografi Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta : Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Depdikbud, 1976.
- Teuku Iskandar, *De Hikajat Atjeh*, Vanhandeligen Van Het Koninklijk Instituut Voor Taal, Land en Volkenkunde, s-gravenhage,

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy, et al., *Lima Puluh Tahun Aceh Membangun*, Medan : MUI Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1995.
- A. Mukti Ali, *An Introduction to The Government of Ache's Sultanate*, Yogyakarta : Nida, 1970.
- Anonim, *Buku Objek Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Aceh Cap Sikureng (Segel Sultan Aceh)*, Banda Aceh : Perkumpulan Pecinta Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Aceh (P3SKA), 1996.
- , *Kota Banda Aceh Hampir 1000 Tahun, Banda Aceh*, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh, 1988.
- Astrid S, Soesanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta : Bina Cipta, 1977.
- Catles dan Elizabeth C. Morris. *Pola Perkembangan Kota di Banda Aceh*, (Makalah Seminar Pembangunan III Daerah Istimewa Aceh), Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala dan Pemda Daerah Istimewa Aceh, 1976.
- Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607 - 1636)*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991.
- G.L. Tichelmān, *Cakra Donya*, The Indische Gids 61, Amsterdam : N. V. Drukkerij, 1939.
- H. M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara 1*, Medan : Pustaka Iskandar Muda, 1961.
- Mardanas Safwani, *Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arief*, Jakarta : Balai Pustaka, 1992.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Noegroho Notosoesto, *Sejarah Nasional Jilid III*, Jakarta : Balai Pustaka, 1992.

menonjol pada masa revolusi kemerdekaan (1945 - 1949) ini adalah Banda Aceh tampil sebagai daerah modal.

Kemerdekaan yang telah dicapai setelah lepas dari cengkraman kolonial tidak serta merta diikuti oleh pembangunan. Ketidak puasan akan kebijakan pemerintah dan gerakan sparatis membuat malapetaka bagi kehidupan sosial ekonomi daerah Aceh. Setelah stabilitas keamanan terjamin baru dapat diikuti oleh pembangunan. Masa Orde Baru adalah masa pencerahan, pembangunan yang direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan diupayakan merambah ke seluruh pelosok tanah air, sehingga setiap daerah bergiat untuk melaksanakan pembangunan.

Banda Aceh yang semula hanya terdiri dari 2 kecamatan dimekarkan menjadi 4 kecamatan, sarana dan prasarana untuk meningkatkan sosial ekonomi penduduk dibangun tahap demi tahap. Kota Banda Aech mulai berkembang secara perlahan. Kondisi lingkungan kota diperhatikan seperti layaknya kota-kota yang tumbuh di Indonesia. Sarana ekonomi dengan adanya pasar sebagai sumber pendistribusian barang, perkantoran, pertokoan, dan sarana pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia, jalan dan angkutan menjadikan kota ini disibuki oleh penduduk yang terus melaju baik melalui angka kelahiran dan migrasi.

Satu hal yang terpenting adalah ciri khas yang dimiliki Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah yang memiliki sentuhan budaya Islam yang dimiliki sebagai tatanan kehidupan sosial masyarakat tetap eksis dipertahankan. Sehingga kota Banda Aceh yang dijuluki sebagai kota pendidikan, agama dan budaya cukup relevan untuk disandangnya.



BAB V KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab di atas, dapat ditarik kesimpulan antara lain; Banda Aceh telah memiliki usia yang relatif cukup tua. Dalam perjalanan sejarahnya kota ini selain sebagai ibukota Kerajaan Aceh dan berperan sebagai pusat kedudukan pemerintah, juga pernah berperan sebagai salah satu pusat perdagangan dan tamaddun di kawasan Asia Tenggara. Hal ini terjadi pada masa jaya-jayanya Kerajaan Aceh, yaitu pada abad ke 16 dan 17.

Sejak tahun 1874 nama kota Banda Aceh Darussalam diganti menjadi Kutaraja, seiring dengan berkecamuknya perang antara Belanda dengan Kerajaan Aceh dan penguasaan Belanda terhadap kota Banda Aceh, kejayaan Banda Aceh semakin memudar, meskipun kota ini tetap ditata sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Belanda.

Selama pendudukan Belanda kota Banda Aceh dijadikan sebagai tempat kedudukan Gubernur, baik Gubernur Militer (sebelum tahun 1918) maupun Gubernur Sipil (1918 - 1936). Suasana perang yang terus-menerus mengakibatkan kehidupan sosial ekonomi di kota Banda Aceh mengalami berbagai hambatan. Masuknya Jepang tidak merubah keadaan kota Banda Aceh. Struktur pemerintahan dan pendidikan tetap dijalankan, hanya nama-nama dan istilah saja yang diganti.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Banda Aceh yang masih dengan namanya Kutaraja pemberian Belanda tidak saja menjadi ibukota propinsi daerah Aceh, tetapi juga pernah menjadi tempat kedudukan propinsi Sumatera Utara dan bahkan pernah ditetapkan pemerintah pusat sebagai tempat kedudukan resmi Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia mulai tanggal 4 Agustus 1949.

Banda Aceh pernah pula dijadikan pusat pengatur perlawanan terhadap pasukan penjajah yang datang kembali ke Indonesia, yaitu tempat kedudukan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Pada saat pemerintah pusat Republik Indonesia di Yogyakarta sekali lagi Banda Aceh berperan besar dalam membantu pemerintah pusat. Dari kota inilah semua kebijaksanaan dirumuskan. Peran lain yang

Tabel : XVI
Banyaknya Malam kamar, Tempat Tidur Terjual dan Ganda Pemakaian Atas Kamar Hotel Bintang Tahun 1994

B U L A N	SELURUH HOTEL BERBINTANG		
	Malam kamar	Tp. Tdr. Terjual	Ganda Pemakaian Kamar
Januari	5.855	10.069	1,72
Pebruari	4.590	8.379	1,83
Maret	5.607	10.831	1,93
April	6.223	12.024	1,93
Mei	5.336	10.238	1,92
Juni	6.372	11.172	1,75
Juli	7.090	11.236	1,58
Agustus	7.108	12.358	1,74
September	7.208	11.996	1,66
Oktober	7.801	12.973	1,66
Nopember	6.299	11.686	1,86
Desember	6.538	11.745	1,80
J u m l a h	76.027	134.707	1,77

Sumber : Kantor statistik Kotamadya Banda Aceh 1994.

Tingkat penghunian tempat tidur (TPTT) untuk hotel berbintang tertulis sebesar 44,96 %, dan hotel melati 38,86 %. Dari angka tersebut terlihat adanya kenaikan sebesar 1,84 % untuk hotel bintang dan 1,76 % untuk hotel melati. Hal ini menggambarkan bahwa industri perhotelan menunjukkan kemajuan karena tempat tidur yang terjual mengalami peningkatan, dengan kata lain tamu yang menginap di hotel berbintang maupun melati semakin meningkat. Lihat tabel di atas.

Permasalahan yang dihadapi pada kepariwisataan Daerah Istimewa Aceh adalah wisatawan yang datang ke Aceh masih limpahan dari Sumatera Utara yang menjadi pintu utama kedatangan wisatawan untuk Indonesia bagian Barat, sehingga promosi lokasi dan objek wisata di Sumatera Utara lebih utama di promosikan oleh daerah ini.

Dalam tiga tahun terakhir industri pariwisata di Daerah Istimewa Aceh menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Kondisi ini dapat dilihat dari meningkatnya kunjungan wisatawan sejak tahun 1992. Peningkatan tersebut terjadi pada wisatawan mancanegara dan nusantara. Pada tahun 1993 wisatawan yang datang ke Daerah Istimewa Aceh sebanyak 287.401 orang dan tahun 1994 tercatat sebanyak 312.206 orang, sehingga terjadi peningkatan sebesar 8,63 %.

Wisatawan yang datang ke Daerah Istimewa Aceh menggunakan fasilitas hotel berbintang maupun hotel melati. Malam tamu pada hotel berbintang sebanyak 134,707 malam, sedangkan hotel melati 643.160 malam. Dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 119.524 malam dan 606.474 malam, maka terjadi kenaikan 12,70 % untuk hotel bintang dan 6,15 % untuk hotel melati. Selanjutnya rata-rata lama tinggal (*Average length of stay*) untuk hotel bintang sebanyak 2,46 hari dan hotel bintang sebanyak 2,40 hari dan hotel melati 2,51 hari. Keadaan tahun 1993 hotel bintang sebanyak 2,52 hari dan hotel melati 2,53 hari.

Tingkat penghunian kamar (TPK) tercatat 44,15 % untuk hotel berbintang dan 45,44 % untuk melati. Dari angka tersebut mencerminkan bahwa hotel bintang dan melati lebih diminati wisatawan daripada hotel berbintang, perbedaan ini membuktikan bahwa hotel bintang dan melati pelayanan sudah cukup baik. Adapun angka TPK tahun sebelumnya, sebesar 44,58 % untuk hotel berbintang dan 45,09 % untuk hotel melati. Dengan kata lain TPK hotel berbintang mengalami penurunan sebesar 0,43 %, sedangkan hotel melati naik sebesar 0,35 %.

Ganda pemakaian atas kamar (*guest per room = GPR*) untuk hotel bintang tercatat 1,77 artinya 77 % dari kamar terjual dihuni 2 orang tamu, sedangkan 23 % sisanya hanya dihuni 1 orang. GPR hotel melati tercatat sebesar 1,78.

yang cukup baik dan menurut inventarisasi yang dilakukan dinas pariwisata Daerah Istimewa terdapat 112 objek wisata di seluruh Aceh yang terdiri dari objek wisata alam dan objek wisata budaya serta ditambah dengan kesenian / budaya yang sudah lama ada dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Pariwisata spiritual ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan ke objek wisata ziarah yang mengeksploitasi peninggalan - peninggalan sejarah yang ada dan bersifat ritual seperti pada makam-makam raja dan ulama di daerah ini.

Peninggalan sejarah yang dapat dijadikan objek wisata spiritual di Aceh antara lain :

- Masjid Raya Baiturrahman
- Makam-makam para Sultan Aceh Darussalam, Kerajaan Pasai, Kerajaan Peureulak dan lain-lain.
- Makam tokoh-tokoh pejuang seperti Makam Laksamana Keumalahayati.

Disamping objek-objek monumental tersebut dapat juga ditawarkan objek-objek yang hidup antara lain :

- Tatanan hidup masyarakat yang Islami, baik di dalam bertani, berdagang dan berusaha berinteraksi sosial / masyarakatnya termasuk alat-alat yang dipakai dalam berusaha dan berkarya.
- Kesenian yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk tarian dan seni rupa lainnya.

Dalam menarik orang untuk menikmati pariwisata spiritual, pada hakekatnya kita telah memiliki suatu nama yang sudah cukup dikenal di Nusantara yaitu dengan julukan *Serambi Mekah*. Julukan ini sebenarnya dapat dijadikan *trade mark* dalam mempromosikan pariwisata Aceh.

Pendapatan ini lebih besar dari pendapatan ekspor karet (yaitu sebesar 960 juta US\$), dimana karet ditanam pada lahan lebih dari 3 juta hektar. Tahun 1989 pariwisata juga telah menampung tenaga kerja sebesar 1,36 juta orang, untuk itulah pemerintah memiliki pertimbangan untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan nasional non migas.

Pengembangan pariwisata Indonesia bukanlah keinginan orang-perorangan, akan tetapi merupakan amanat rakyat yang tercermin dari produk wakilnya melalui MPR, yaitu GBHN, Tap MPR RI. NO. IV / MPR / 1978 menunjukkan pentingnya peningkatan dan perluasan sub sektor pariwisata. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan memperkenalkan kebudayaan.

Melihat potensi pariwisata yang ada di Aceh, pada tahun 1970 Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh membentuk Badan Pengembangan Pariwisata Daerah (BAPPARDA), namun perkembangannya belum menggembirakan. Hal ini disebabkan belum mendukungnya sarana dan prasarana yang memadai serta kurangnya promosi.

Daerah Istimewa Aceh melalui DPRD nya telah melahirkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 10 tahun 1981 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Propinsi daerah Istimewa Aceh. Dalam melahirkan produk hukum ini wakil rakyat di DPRD ini telah membahas lebih mendalam dan memilih mengembangkan atau tidaknya pariwisata di daerah ini yang dikenal dengan kuatnya budaya Islam. Hasil rapat kerja DPRD Daerah Istimewa Aceh dengan ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh diputuskan bahwa pariwisata di Aceh tidak menghendaki adanya pariwisata yang menawarkan pelacuran, perjudian dan minuman keras di daerah. Pariwisata adalah suatu peluang bagi masyarakat Aceh untuk berdakwah (*bil hal*) mengenai eksistensi masyarakat dan keislamannya di daerah ini. Pariwisata yang dikembangkan di Aceh adalah pariwisata spiritual.

Sektor pariwisata di Daerah Istimewa Aceh mempunyai potensi

002756.1



G3.3

Kel